

**PEREMPUAN DAN POLITIK:  
STUDI STRATEGI PEMENANGAN NUR AZIZAH PADA PILKADES DI  
DESA GUBUGSARI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun oleh:

**Nafisa Bintang Diya'ulhaq**

**2006016091**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2024**

## NOTA PEMBIMBING

Lam : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswi :

Nama : Nafisa Bintang Diya`ulhaq

NIM : 2006016091

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : Perempuan Dan Politik: Studi Strategi Pemenangan Nur Azizah Pada Pilkada Di Desa Gubugari Kabupaten Kendal Tahun 2020

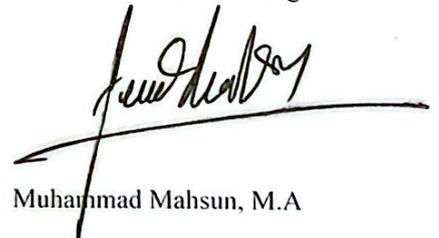
Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 13 Juni 2024

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A

# PENGESAHAN SKRIPSI

## PEREMPUAN DAN POLITIK

(Studi Strategi Pemenangan Nur Azizah Pada Pilkada Di Desa Gubugsari Kabupaten Kendal Tahun 2020)

Di susun oleh:

Nafisa Bintang Diya'ulhaq  
2006016091

Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 26 Juni 2024 dan dinyatakan lulus

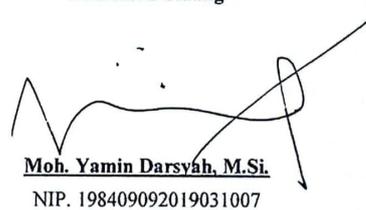
Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



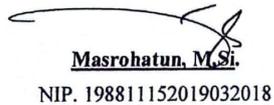
Muhammad Mahsun, M.A.  
NIP. 198505102023212058

Sekretaris Sidang



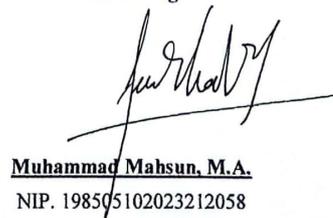
Moh. Yamin Darsyah, M.Si.  
NIP. 198409092019031007

Penguji Utama



Masrohatun, M.Si.  
NIP. 198811152019032018

Pembimbing 1

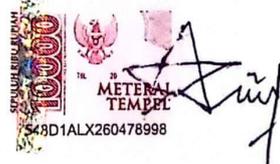


Muhammad Mahsun, M.A.  
NIP. 198505102023212058

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 7 Juli 2024



**Nafisa Bintang Diya'ulhaq**

2006016091

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Wa Syukurillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perempuan dan Politik: Studi Strategi Pemenangan Nur Azizah Pada Pilkada di Desa Gubugsari kabupaten Kendal Tahun 2020”. Shalawat teriring salam kepada para Rasul yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk kita semua.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya keterbatasan dan kekurangan penulis, dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo. Penulis mengetahui dan menyadari bahwa, tulisan ini jauh dari kata sempurna, dan mudah-mudahan nantinya dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang bersedia membacanya.

Perjalanan panjang yang penulis lalui dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan dan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini dibuat dengan ketulusan hati penulis dengan mendapat banyak dukungan, semangat, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak secara moril, ataupun materil dan alhasil skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu izinkan penulis untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan kesehatan bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendukung penulis melakukan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Mahsun, M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran serta motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingannya kepada penulis, dari mulai penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai dibuat. Terimakasih telah menyempatkan waktu untuk pembimbing penulis ditengah kesibukannya.
6. Moh. Yamin Darsah, M.Si selaku Wali Dosen penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berbagi ilmu dan mengajarkan penulis tentang berbagai pengetahuan baru yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan Program Studi Saarlana Prodi Ilmu Politik.

8. Seluruh jajaran Staf Tenaga Pendidik dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membantu penulis dalam kebutuhan administratif penelitian skripsi.
9. Kepala Desa Gubugsari, seluruh narasumber dan masyarakat Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang telah bersedia menerima penulis, untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir. Sehingga, penulis mendapatkan berbagai data-data yang dapat mendukung penelitian ini.
10. Paduka Raja Wahyono dan Bunda Ratu Ria Watiningsih, selaku orang tua penulis yang sangat luar biasa dalam mendukung penulis, terutama saat mengerjakan skripsi. Penulis sadar saat menjalankan proses dari mulai masuk kuliah hingga selesai mengerjakan tugas akhir, yang berjuang tidak hanya penulis, tetapi juga orang tua yang ikut terlibat dalam semua proses penulis. Perjuangan yang luar biasa hingga bisa sampai pada titik ini. Doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan dari orang tua penulis adalah solusi dan jalan keluar terbaik untuk melewati kesulitan-kesulitan yang dialami penulis. Love you sekebon untuk kedua orang tua penulis.
11. Adik-adik penulis Fiqrotulael Muhamad Fadlanilah dan Alaika Wulan Syaumina yang selalu memberikan semangat dan selalu menanyakan kapan skripsinya selesai karna ingin ke Semarang untuk jalan jalan, penulis jadikan itu sebagai motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mendoakan dan sama-sama berjuang, mengantikan posisi penulis dirumah, untuk membantu dan melindungi kedua orang tua. Love you bro and sist.
12. Diri saya sendiri, terimakasih sudah berjuang sampai detik ini. Kamu luar biasa dengan segala perjuangan hebat selama ini, meskipun tidak sama dengan pencapaian-pencapaian orang lain, tapi luar biasa dengan segala proses yang dilalui. Jangan terlalu melihat sinar orang lain, karena kamu punya sinar tersendiri untuk menerangi sekelilingmu. Proud of me
13. Nur Latifah, sahabat seperjuangan penulis dalam mengerjakan Skripsi, dari awal mengajukan judul sampai mendapat dosbing yang sama, selalu bimbingan bareng, nugas bareng diperpus hampir setiap hari sudah seperti penunggu perpustakaan. Begadang bareng, kejar deadline, overthinking bareng, sempro, hingga sampai pada skripsi ini selesai dibuat. Penulis tidak tahu bagaimana jika tidak memiliki teman yang sama-sama mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih anak Bengkulu, sukses terus dimanapun berada, meskipun nantinya penulis hanya sebagai penonton story saja.
14. Rekan rekan seperjuangan dalam mengerjakan skripsi, Rif'an, Dimas, Liya Muna. Terimakasih sudah mau direpotkan dengan kebawelan-kebawelan penulis yang tidak sudah-sudah.
15. Rekan-rekan dekat penulis, Latiana, Fina, Ida, Selma, Aqilla, Rif'an, Dimas, Restri, Irma, Halizah yang selalu memberikan dukungan motivasi dan semangat yang tak terhingga. Terimakasih sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis.
16. Teman-teman 'daftar yu', Silvy, Nurul, dan Denti terimakasih telah sama-sama berjuang dalam mempersiapkan pendaftaran untuk ujian munaqosah yang mepet-mepet ini.
17. Sahabat penulis yaitu The Capruk, yang ikut merasakan dan mendengarkan perjuangan penulis dalam mengerjakan skripsi, tidak lupa memberikan dukungan dan semangatnya.
18. Temen-teman Program Studi Ilmu Politik terutama untuk kelas Politik C angkatan 2020 UIN Walisongo Semarang atas pengalaman dan kebersamaannya dalam melewati masa perkuliahan.

Semoga setelah lulus ini kita bisa sama-sama sukses diluar sana dan meraih apa yang telah kita cita-citakan, aamiin...

19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, dan menjadi bagian dalam perjalanan penulis untuk menyelesaikan studi ini sampai selesai

Penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan walau bagaimanapun penulis berusaha memberikan yang terbaik. Penulis menerima kritik dan saran dengan kelapangan hati, demi tercapainya hal terbaik dari penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian yang diberikan.

Semarang, 13 Juni 2024

Penulis,

Nafisa Bintang Diya'ulhaq

NIM. 2006016091

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan segala rasa syukur kepada Allah SWT.

Alhamdulillahil'alamin, Saya persembahkan sebuah skripsi ini:

Untuk dua orang hebat dalam hidup saya, Paduka Raja Wahyono dan Bunda Ratu Ria Watiningsih dan dua adik saya Fiqrotulael Muhammad Fadlanilah dan Alaika Wulan Syaumina yang selalu memberikan seluruh doa dan dukungan yang berarti dalam setiap langkah kehidupan saya. Selalu mendukung saya, dan tidak pernah mengeluh dengan segala keterbatasan proses saya.

Untuk dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Mahsun, M.A yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi.

Untuk diri saya sendiri yang sudah mau berjuang sampai pada titik ini.

Dan untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Politik yang menjadi tempat untuk saya berproses memulai pendidikan perkuliahan baru mulai dari 0 pada saat awal pandemi covid-19 yang menghancurkan kuliah online selama kurang lebih 2 tahun, hingga pada titik sejauh ini.

## **MOTTO**

“Allah reassured ‘them’, “Have no fear! I am with you, hearing and seeing”

(20:46)

“Jagalah sholatmu, ketika kamu kehilangan sholat, kamu akan kehilangan segalanya”

(Umar Bin Khattab)

“Wisuda itu panggung, bukan bukti... pembuktian bukan dengan toga dan ijazah tapi dengan upaya dan jerih payah dan itu dimulai dari hari ini...”

(Najwa Shihab)

## ABSTRAK

Reformasi pasca orde baru telah membuka keran politik bagi semua elemen masyarakat dalam berbagai jabatan, termasuk jabatan kepala Desa yang diisi oleh perempuan. Pemimpin perempuan sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat, karena seharusnya yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikaji terkait calon kepala Desa Perempuan di Desa Gubugsari Kabupaten Kendal yaitu Nur Azizah yang berhasil keluar sebagai pemenang dengan mengalahkan seorang laki-laki yang juga merupakan petahana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Nur Azizah membangun tim sukses untuk memenangkan pilkades, dan bagaimana strategi yang dilakukan Nur Azizah dalam memobilisasi pemilih untuk memenangkan Pilkades Desa Gubugsari tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan teori mesin politik dan patronase dari Edward Aspinall. Pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan naratif dengan menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan, lalu informasi tersebut diceritakan kembali oleh peneliti dengan gaya naratif untuk dapat mengetahui kejadian atau fenomena yang terjadi pada saat pemilihan kepala Desa Gubugsari tahun 2020. Data informasi didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yaitu Nur Azizah sebagai calon kepala desa perempuan yang terpilih, tim sukses Nur Azizah, dan masyarakat Desa Gubugsari. Informasi juga didapatkan melalui dokumentasi berupa laporan pilkades dan foto foto, serta studi literatur terkait penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tim sukses berasal dari warga Desa Gubugsari yang aktif di Desa, dikenal banyak orang, dan bisa mempengaruhi masyarakat. yang dimana tugas tim sukses adalah untuk menyebarkan patronase goods dan penghubung antara Nur Azizah dengan masyarakat. Tim sukses Nur Azizah terbagi menjadi sebuah piramida broker yang terdiri dari tim inti, koordinator masing-masing RT, dan broker akar rumput atau partisipan. Sedangkan strategi mobilisasi pemilih yang dilakukan Nur Azizah dengan menggunakan isu perempuan, kepemudaan, dan pembangunan. Selain itu, Nur Azizah juga menggunakan politik patronase untuk mempengaruhi pilihan masyarakat di pilkades 2020 Desa Gubugsari.

**Kata Kunci: Pilkades, Nur Azizah, Tim Sukses, dan Politik Uang**

## ABSTRACT

*Post-New Order reforms have opened up political opportunities for all elements of society in various positions, including the position of village head which is filled by women. Women leaders are often looked down upon by society, because men should be the leaders. Therefore, this research will examine the candidate for female village head in Gubugsari Village, Kendal Regency, namely Nur Azizah, who managed to emerge as the winner by defeating a man who was also the incumbent. This research aims to see how Nur Azizah built a successful team to win the village election, and what strategy Nur Azizah used in mobilizing voters to win the 2020 Gubugsari Village Village Election.*

*This research uses the theory of political machines and patronage from Adward Aspinall. This research also uses qualitative research methods and a narrative approach by investigating the lives of individuals and asking a person or group of individuals to tell the story, then the information is retold by the researcher in a narrative style to be able to find out about events or phenomena that occurred during the election of the head of Gubugsari Village. 2020. Information data was obtained through in-depth interviews with sources, namely Nur Azizah as the selected candidate for female village head, Nur Azizah's success team, and the people of Gubugsari Village. Information was also obtained through documentation in the form of village election reports and photographs, as well as literature studies related to previous research.*

*The results of this research show that the successful team came from residents of Gubugsari Village who were active in the village, known to many people, and could influence the community. where the task of the success team is to spread patronage goods and liaise between Nur Azizah and the community. Nur Azizah's success team is divided into a broker pyramid consisting of the core team, coordinators of each RT, and grassroots brokers or participants. Meanwhile, Nur Azizah's voter mobilization strategy uses women's, youth and development issues. Apart from that, Nur Azizah also used patronage politics to influence people's choices in the 2020 village elections in Gubugsari Village.*

***Keyword: Village Election, Nur Azizah, Successful Team, and Money Politic***

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....                                     | i    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....                           | ii   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                         | iii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                      | iv   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | vii  |
| <b>MOTTO</b> .....   | viii |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | ix   |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | x    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | xi   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | xiii |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                       | xiv  |
| <b>BAB I</b> .....   | 1    |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....   | 1    |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....                                   | 1    |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....                                  | 3    |
| <b>C. Tujuan</b> .....   | 3    |
| <b>D. Manfaat</b> .....  | 3    |
| <b>E. Kajian Pustaka</b> .....                                   | 4    |
| <b>F. Metode Penelitian</b> .....                                | 7    |
| <b>G. Sistematika Penulisan</b> .....                            | 9    |
| <b>BAB II</b> .....  | 11   |
| <b>KERANGKA TEORI</b> .....                                      | 11   |
| <b>A. Definisi Konseptual</b> .....                              | 11   |
| 1. Politik Perempuan .....                                       | 11   |
| 2. Partisipasi Politik .....                                     | 11   |
| 3. Tim Sukses.....   | 12   |
| 4. Strategi Mobilisasi .....                                     | 12   |
| 5. Kampanye Politik.....   | 13   |
| <b>B. Landasan Teoritik</b> .....                                | 14   |
| 1. Mesin Politik (Jaringan Mobilisasi) .....                     | 14   |
| 2. Patronase.....  | 21   |
| <b>BAB III</b> .....   | 27   |
| <b>LANDSCAPE DESA GUBUGSARI DAN DINAMIKA PILKADES 2020</b> ..... | 27   |
| <b>A. Gambaran Umum Desa Gubugsari</b> .....                     | 27   |
| <b>B. Sejarah Desa Gubugsari</b> .....                           | 31   |
| <b>C. Profil Nur Azizah</b> .....                                | 34   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>D. Dinamika Pilkades Desa Gubugsari 2020 .....</b>        | <b>35</b> |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>41</b> |
| <b>STRATEGI MEMBANGUN TIM SUKSES.....</b>                    | <b>41</b> |
| <b>A. Gambaran Umum Bentuk Tim Sukses (Tim Ad Hoc) .....</b> | <b>41</b> |
| <b>B. Proses Membangun Tim Sukses .....</b>                  | <b>43</b> |
| <b>C. Alur Kerja Tim Sukses .....</b>                        | <b>48</b> |
| <b>D. Relasi Nur Azizah dengan Tim Suksesnya .....</b>       | <b>52</b> |
| <b>BAB V .....</b>   | <b>55</b> |
| <b>STRATEGI MOBILISASI PEMILIH .....</b>                     | <b>55</b> |
| <b>A. Isu-isu pemenangan kampanye.....</b>                   | <b>55</b> |
| 1. Isu Perempuan.....  | 57        |
| 2. Isu Kepemudaan.....                                       | 59        |
| 3. Isu Pembangunan .....                                     | 61        |
| 4. Visi dan Misi Nur Azizah.....                             | 63        |
| <b>B. Politik Uang.....</b>                                  | <b>64</b> |
| 1. Patronase.....  | 65        |
| 2. Door to Door.....   | 71        |
| <b>BAB VI .....</b>  | <b>74</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>   | <b>74</b> |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>                                    | <b>74</b> |
| <b>B. Saran .....</b>  | <b>75</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                   | <b>76</b> |
| <b>LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA .....</b>                   | <b>79</b> |
| <b>LAMPIRAN DOKUMENTASI.....</b>                             | <b>81</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                            | <b>87</b> |

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Mesin-Mesin Politik

Tabel 2. Membandingkan Broker Filipina dan Indonesia

Tabel 3. jaringan Mobilisasi dan Pola patronase di Asia Tenggara

Tabel 4. Statistik Penduduk Desa Gubugsari Berdasarkan jenis Kelamin Tahun 2020

Tabel 5. Statistik Penduduk Desa Gubugsari Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

Tabel 6. Statistik Penduduk Desa Gubugsari Berdasarkan Pendidikan Akhir Tahun 2020

Tabel 7. Statistik Penduduk Desa Gubugsari Berdasarkan Agama Tahun 2020

Tabel 8. Nama-nama Demang/Lurah/Kepala Desa Gubugsari

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Pialang di Indonesia dan Filipina

Gambar 2. Tingkat mikro partikularisme (a) dan meso partikularisme (b) di atas siklus pemilu

Gambar 3. Peta Wiayah Administrasi Desa Gubugsari

Gambar 4. Pendaftaran Calon Kepala Desa Gubugsari Masa Jabatan 2020-2026

Gambar 5. Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa Sekaligus Penetapan dan Pengambilan Nomor Urut Calon Kepala Desa

Gambar 6. Sertijab Kepala Desa Gubugsari Masa Jabatan 2020-2026

Gambar 7. Piramida Broker Nur Azizah

Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Kepala Desa Terpilih

Gambar 9. Wawancara dengan Tim Sukses

Gambar 10. Wawancara dengan Tim Sukses

Gambar 11. Wawancara dengan Masyarakat

Gambar 12. Wawancara dengan Masyarakat

Gambar 13. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Gubugsari

Gambar 14. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Gubugsari Tahun 2020

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Reformasi pasca orde baru telah membuka keran politik bagi semua elemen masyarakat dalam berbagai jabatan, termasuk dalam konteks desa dengan hadirnya kepala desa dari beragam kalangan, termasuk dari kalangan perempuan (Nasution, 2019, p. 135). Di Indonesia sendiri masih banyak yang beranggapan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang seutuhnya, karena perempuan lebih menggunakan emosi ketimbang laki-laki yang menggunakan logika. Budaya patriarki pun melekat dengan melebelkan bahwasannya tugas perempuan bukan sebagai pemimpin tapi sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan anak dan suaminya, tugasnya hanya dirumah saja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dengan didorong oleh perjuangan para perempuan yang menyuarakan aspirasi mereka agar kedudukan mereka dimata politik sama dengan laki-laki. (Warjiyati, 2016, pp. 4-14).

Saat ini keterlibatan perempuan dalam politik elektorat dan pemimpin sebuah wilayah masih minim jumlahnya, seperti halnya presiden perempuan yang pernah menjabat di Indonesia hanya satu, yaitu Megawati Soekarno Putri (Hartono, 2021, p. 89). Berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 diperoleh sekitar 21,09% keterlibatan perempuan dalam parlemen di Indonesia, sedangkan di Jawa Tengah sendiri keterlibatan perempuan pada tahun 2020 sekitar 18,8%, dan di Kendal yaitu 24,44% (BPS, 2024). Pada Pilkada yang dilaksanakan 3 gelombang yaitu 2015, 2017, dan 2018 diperoleh bahwasannya total ada 92 perempuan yang terdiri dari kepala dan wakil kepala daerah atau sekitar 8,49% dari total 542 daerah yang melaksanakan pilkada (Perludem, 2018). Sedangkan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah diperoleh bahwasannya hanya sekitar 10,5% atau 30 orang perempuan yang menjabat sebagai kepala desa/lurah dari 286 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kendal pada tahun 2020 (Dokar, 2024). Dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2020 diperoleh hasil 76,96 yang menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Kendal cukup aktif terlibat dalam politik, akan tetapi masih adanya ketimpangan di masyarakat (BPS, 2024). Meskipun begitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2020 sudah cukup bagus yaitu 93,19 (BPS, 2024).

Pembahasan terkait keterlibatan perempuan dalam politik praktis, serta berbagai tantangan perempuan untuk ikut serta dalam kontestasi politik ini telah menarik sejumlah sarjana untuk mengkaji tentang tema ini. Beragam kajian tersebut umumnya menekankan pada partisipasi perempuan dalam pemilu, pilkada, dan pilkades. Studi partisipasi perempuan dalam pemilu yang telah dikaji oleh Saputra, Mutiarin, & Nurmandi (2020); Tuter (2022); dan Marzoeki (2022) secara umum menjelaskan bahwa adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan untuk terlihat dalam kontestasi pemilu, seperti budaya patriarki dll. Sedangkan Perspektif Quraish Shihab yang bersumber dari Al-Qur'an, ternyata perempuan boleh menjadi pemimpin asalkan memenuhi dua syarat yaitu dicintai dan memiliki kemampuan (Tuter, 2022). Adapun contoh minimnya partisipasi perempuan dalam pemilu adalah di Bekasi pada tahun 2019 dilihat dari pemilih, kontestan, dan penyelenggaranya (Marzoeki, 2022). Studi lain tentang partisipasi perempuan dalam pilkada yang terjadi di Indonesia, seperti yang dikaji oleh

Bintari (2020) diperoleh bahwasannya dalam pilkada bagi perempuan tetap memiliki tantangan-tantangan di masyarakat, akan tetapi tetap dibarengi dengan peluang.

Adapun juga contoh-contoh partisipasi perempuan dalam pilkada seperti yang dikaji oleh Haboddin (2023); Edrial, Nurhidayati, & Syatri (2019); dan Haboddin & Damayanti (2021). Seperti Bupati Banyuwangi dan Walikota Batu, dimana yang terpilih selanjutnya adalah istri petahana itu sendiri (Haboddin, 2023). Contoh lain yaitu seperti munculnya calon wakil Gubernur perempuan di NTB yaitu Sitti Rohmi Djalilah sebagai wakil yang berusaha untuk menarik simpati pemilih perempuan (Edrial, Nurhidayati, & Syatri, 2019). Dan contoh terakhir yaitu pada pilkada kabupaten malang yang diikuti oleh 3 pasang calon dari berbagai kalangan dan jalur yang berbeda, termasuk dari kaum perempuan (Haboddin & Damayanti, 2021). Sedangkan studi lainnya mengkaji partisipasi perempuan dalam pilkades di Indonesia, seperti yang dikaji oleh wawan & Rosyid (2023) yang menemukan bahwa terpilihnya sosok perempuan yaitu Heni Hendrawati sebagai Kepala Desa Cijaku ternyata dipengaruhi oleh *local strongman* dibelakangnya (Wawan & Rosyid, 2023). Studi yang dilakukan Tokan, Gai, & Negong (2020) mengkaji partisipasi perempuan jika dilihat dari relasi kuasa dan aksesnya. Sedangkan Adella, Murtasidin, & Ranto (2023) mengkaji Amnah yang keluar sebagai pemenang dalam pilkades Padang Baru dengan memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya, serta didukung juga dengan modal kultural, simbolik (identitas) yang dilegitimasi, dan ekonomi.

Studi-studi yang telah dilakukan oleh para sarjana di atas lebih banyak mengkaji partisipasi perempuan dalam tatanan politik elektoral di level lokal beserta hambatan dan tantangan yang dialami perempuan dalam politik. Sedangkan studi yang mengeksplorasi tentang keterlibatan perempuan dalam politik di level kekuasaan Desa masih belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penulis memperkaya wawasan tentang perempuan dan politik dilihat dari kontestasi politik pada tingkat desa yang diikuti oleh calon perempuan. Penulis mengkaji bagaimana calon perempuan membangun tim sukses yang bisa menjadi kendaraan dalam mengikuti kontestasi politik untuk memperoleh kemenangan. Serta strategi apa yang digunakan oleh calon kepala desa perempuan ditengah hambatan dan tantangan perempuan di masyarakat dikarenakan masih menjamurnya budaya patriarki yang membuat stigma negatif dan membatasi perempuan dalam berpolitik.

Studi ini dilakukan di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon kabupaten Kendal, karena pada pilkades 2020 di Desa Gubugsari muncul calon kepala desa perempuan yaitu Nur Azizah, dimana sebelumnya di Desa Gubugsari tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Yang menarik di Desa Gubugsari ini masih sangat kental dengan kultur NU, dimana masyarakat masih sangat agamis, dan diikuti oleh budaya patriarki yang membatasi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin (Nurmila, 2015, p. 4). Tidak hanya itu tantangan yang harus dihadapi Nur Azizah, akan tetapi dalam perebutan kursi kepala desa ini Nur Azizah harus berhadapan dengan lawan yang kuat yaitu incumbent yang sudah berasal dari dinasti politik Rofi'i. Dimana sebelumnya jabatan kepala desa di pegang oleh Rofi'i 1988-1998, kemudian periode berikutnya dipimpin oleh orang lain yaitu Achmad Khudlori 1999-2007. Pada periode selanjutnya dipimpin lagi Rofi'i 2007-2013, Selanjutnya kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya Rofi'i yaitu Amri 2013-2019. Pada pikades 2020 Amri mencalonkan diri lagi melawan Nur Azizah, tapi yang keluar menjadi pemenang adalah Nur Azizah. Sehingga saya mengkaji lebih dalam strategi yang digunakan Nur Azizah agar bisa keluar sebagai pemenang ditengah tantangan-tantangan yang dihadapi Nur Azizah dalam pilkades 2020 di Desa Gubugsari.

Studi ini berfokus pada dua ranah kajian, pertama, bagaimana Nur Azizah membangun tim sukses untuk memenangkan pilkades 2020 di Desa Gubugsari. Pentingnya tim sukses sebagai kendaraan calon untuk menarik simpati masyarakat. Kedua, studi ini mengkaji bagaimana strategi yang dilakukan Nur Azizah dalam memobilisasi pemilih pada pilkades di Desa Gubugsari tahun 2020. Jika tim sukses nya sudah terbangun dengan baik, langkah selanjutnya adalah membangun strategi untuk memobilisasi masyarakat Desa Gubugsari agar mau memilih Nur Azizah sebagai kepala Desa Gubugsari. Studi ini juga melihat bagaimana patronase yang digunakan oleh Nur Azizah dan bagaimana Nur Azizah membangun mesin politiknya.

Kajian ini penting untuk dilakukan dengan dua argumentasi, yaitu secara teoritis studi ini akan menyumbang diskursus tentang perempuan dan politik khususnya dalam pilkades. Sedangkan secara praktis studi ini bisa menjadi referensi bagi para perempuan diluar sana bahwasannya perempuan juga bisa berpolitik. Budaya patriarki tidak menjadi alasan untuk perempuan mundur sebagai pemimpin, tantangan dinasti politik bukan hal yang mustahil untuk diatasi. Dan juga sebagai referensi bagi perempuan untuk membangun tim sukses dan strategi-strategi yang digunakan untuk bisa memperoleh suara dari Masyarakat. Oleh karena itu, melalui kajian ini penulis ingin melihat dinamika yang terjadi didalamnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini akan dilakukan dengan menjawab dua pertanyaan kunci berikut:

1. Bagaimana Nur Azizah membangun tim sukses untuk memenangkan Pilkades di Desa Gubugsari Kabupaten Kendal tahun 2020?
2. Bagaimana strategi Nur Azizah mobilisasi pemilih pada Pilkades di Desa Gubugsari Kabupaten Kendal tahun 2020?

## **C. Tujuan**

Setelah melakukan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, selanjutnya akan diuraikan mengenai tujuan dari penelitian dengan topik Perempuan dan Politik sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Nur Azizah membangun tim sukses untuk memenangkan Pilkades di Desa Gubugsari Kabupaten Kendal tahun 2020
2. Mengetahui bagaimana strategi Nur Azizah mobilisasi pemilih pada Pilkades di Desa Gubugsari Kabupaten Kendal tahun 2020

## **D. Manfaat**

Manfaat penulisan skripsi ini akan dijabarkan menjadi dua manfaat yaitu secara teoritik dan manfaat secara praktis. Adapun mengenai penjelasannya dapat dituliskan di bawah ini:

### 1. Manfaat Teoritik

Dilihat dari manfaat secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perempuan dan politik. Dan lebih membuka luas pikiran masyarakat Indonesia terkait dengan perempuan yang berada dalam dunia politik serta bagaimana strategi yang harus dilakukan baik itu dalam membentuk tim sukses maupun memobilisasi pemilih.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan semangat bagi para perempuan diluar sana bahwasannya semua golongan masyarakat bisa terjun dalam panggung politik. Penulisan penelitian ini juga menjadi rujukan bagi para penulis atau peneliti lain yang sedang melakukan penelitian dengan kesamaan tema seputar perempuan dan politik.

## **E. Kajian Pustaka**

Studi tentang politik dan perempuan sudah banyak dilakukan sarjana lain. Berdasarkan pada pembacaan literatur yang ada, setidaknya studi-studi itu dapat dikelompokkan menjadi tiga tema kajian, yaitu kajian partisipasi perempuan dalam Pemilu, kajian partisipasi perempuan dalam Pilkada, dan kajian tentang partisipasi perempuan dalam Pilkadaes. Peneliti mencoba melihat pola serangkaian penelitian terdahulu dan melakukan analisa untuk kebaruan dalam penelitian ini. Berikut adalah kajian Pustaka dari penelitian ini:

### 1. Partisipasi Perempuan dalam Pemilu

Studi partisipasi perempuan dalam pemilu dilakukan oleh peneliti sebelumnya, mereka melihat dari berbagai sudut seperti hambatan-hambatan yang dialami oleh para perempuan untuk ikut serta dalam politik elektoral, perspektif seorang tokoh islam yaitu Quraish Shibah dalam melihat dalam melihat partisipasi perempuan apalagi menjadi seorang pemimpin, dan salah satu contoh studi yang dilakukan di Kota bekasi untuk melihat seperti apa partisipasi perempuan dalam pemilu. Seperti studi yang sudah dilakukan oleh Saputra, Mutiarin, & Nurmandi (2020); Tuter (2022); dan Marzoecki (2022).

Studi yang dilakukan oleh Saputra, Mutiarin, & Nurmandi (2020) berkaitan dengan kurangnya partisipasi perempuan dalam politik yang sampai saat ini masih belum memberikan kontribusi secara masif dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan dalam dunia politik, khususnya dalam pemilihan legislatif dan eksekutif. Adapun hambatan - hambatan yang dijabarkan yaitu seperti masih mengakarnya budaya patriarki, adanya pengaruh keturunan tokoh politik, partai politik masih belum memberikan pemberdayaan secara penuh kepada perempuan, dan masih minimnya pendidikan politik. Dimana seharusnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dimata negara yang berdasarkan pada UUD 1945, termasuk dalam menduduki jabatan politik.

Studi lain yang dilakukan oleh Tuter (2022) berkaitan dengan peraturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif minimal sebesar 30% di Indonesia dilihat dari perspektif Quraish Shihab, yang kajiannya bersumber dari Al-Qur'an. Ternyata kuota 30% untuk perempuan itu ternyata belum bisa terpenuhi dikarenakan kurangnya kesadaran perempuan dan stigma di masyarakat bahwasannya

pemimpin harus dijabat oleh laki-laki. Menurut perspektif Quraish Shihab perempuan boleh menjadi pemimpin, dalam islam sendiri ada dua syarat kepemimpinan yaitu dicintai dan memiliki kemampuan, jika perempuan memenuhi syarat tersebut maka diperbolehkan untuk ikut berpartisipasi. Meskipun begitu tetap ada batasan-batasan bagi perempuan yaitu menjaga kehormatan, mendidik anak-anaknya memastikan mereka tidak kekurangan kasih sayang, dan taat kepada suaminya.

Studi selanjutnya yang dilakukan oleh Marzoeki (2022) berkaitan dengan salah satu contoh partisipasi perempuan pada pemilu 2019 di Bekasi, dilihat dari partisipasi perempuan dalam pemilihan, penyelenggara, dan peserta pemilu. Perbandingan pemilihan tetap di Kota Bekasi ternyata jumlah pemilihan perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, akan tetapi tidak seimbang dengan keterwakilan perempuan dalam legislatif yang tidak mencapai kuota 30% hanya sekitar kurang lebih 16%. Hal ini memicu kekhawatiran tidak terwakilinya suara-suara perempuan dalam pembuatan kebijakan-kebijakannya. Sedangkan dilihat dari penyelenggaranya masih sangat kurangnya partisipasi perempuan, padahal dalam undang-undang penyelenggara pemilu disebutkan bahwa “memperhatikan untuk keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”, akan tetapi banyak yang masih menyepelekan dikarenakan kata memperhatikan berarti tidak ada kewajiban untuk itu baik di KPU maupun di Bawaslu.

## 2. Partisipasi Perempuan dalam Pilkada

Studi partisipasi perempuan dalam pilkada yang telah dikaji oleh para sarjana sebelumnya, seperti yang dikaji oleh Bintari (2020) yang lebih berfokus pada peluang dan tantangan perempuan ikut serta berpartisipasi dalam pilkada. Jumlah perempuan pun masih terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki, akan tetapi hal tersebut tidak menghentikan perempuan untuk ikut berkontribusi. Adapun studi lain yang dilakukan oleh Haboddin (2023); Edrial, Nurhidayati, & Syatri (2019); dan Haboddin & Damayanti (2021) yang menjelaskan partisipasi perempuan dalam pilkada dengan memberikan contoh langsung di masyarakat, sehingga bisa dibandingkan pilkada antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Ditambah dengan isu perempuan yang dijadikan sebagai alat oleh petahana pemimpin daerah untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya.

Studi yang dilakukan oleh Bintari (2020) berkaitan dengan peluang dan tantangan perempuan dalam pilkada, meski kepala daerah perempuan tidak menjamin memperjuangkan isu-isu perempuan, akan tetapi setidaknya disitu ada pengakuan politik bahwasannya tidak hanya laki-laki yang memiliki kepentingan politik, tetapi perempuan juga. Di Indonesia perempuan dan politik setidaknya memiliki dua persoalan yaitu rendahnya keterwakilan perempuan, dan partai politik belum memiliki platform yang konkrit untuk membela kepentingan perempuan. Minimnya partisipasi perempuan dalam pilkada dari tahun ketahun mungkin dikarenakan tidak adanya kebijakan yang secara khusus mengatur dan mendorong perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan kepala daerah, berbeda halnya dengan legislatif yang memiliki peraturan minimal 30% kuota perempuan dalam parlemen. Adapun tantangan perempuan maju dalam pilkada yaitu masih menjamurnya budaya patriarki, dan dari sisi regulasi pencalonan itu sendiri. Peluang keterpilihan perempuan pada saat ini menjadi sangat dinamis karena preferensi masyarakat seperti apa dan bagaimana basis dukungannya, latar belakang kandidat, dan kemampuan finansial kandidat.

Studi lain yang dilakukan oleh Haboddin (2023) berkaitan dengan keberadaan perempuan dalam kekuasaan di tingkat lokal, dilihat dari pilkada yang secara langsung membuka akses perempuan untuk berkuasa dan pilkada semakin terbuka dengan menguatnya politik dinasti. Seperti contoh terpilihnya istri petahana Bupati Bayuwangi sebagai Bupati dan istri Walikota Batu sebagai Walikota. Fenomena ini bisa dimaknai sebagai praktik demokrasi prosedural yang mengecewakan banyak pihak dan dengan hadirnya keluarga petahan dalam pemilihan menimbulkan pertanyaan karena demokrasi belum mampu memberikan rasa keadilan antar kandidat. Ini adalah cara petahan untuk mengamankan estafet kepemimpinan melalui perantara istri atau anaknya.

Studi lain yang dilakukan oleh Edrial, Nurhidayati, & Syatri (2019) berkaitan dengan munculnya calon wakil gubernur perempuan di NTB yaitu Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dilihat dari partisipasi dan perilaku pemilih perempuan yang ada di Kecamatan Sumbawa. Dengan keberadaan Sitti Rombli partisipasi pemilih perempuan terbagi menjadi 4 ruang yaitu partisipasi apatis, spektor, gladiator, dan pengkritik. Adapun juga kolaborasi ke sukuan antara calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini mengundang nuansa keterpilihan atas dasar semangat primordialisme, karena Dr. Zulkiefliemansyah sebagai calon gubernur adalah seorang putra daerah yang dirindukan masyarakat. Partisipasi pemilih perempuan dengan hadirnya calon Wakil gubernur perempuan memiliki faktor-faktor seperti keluarga, patriarki, tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, LSM, dan aktivis perempuan.

Studi selanjutnya yang dilakukan oleh Haboddin & Damayanti (2021) berkaitan dengan partisipasi kontestan dalam pilkada di Kabupaten Malang, diikuti oleh tiga pasang calon ada yang melalui jalur partai dan gabungan partai politik, ada yang melalui jalur perseorangan, dan ada juga yang berasal dari kaum perempuan. Ada beberapa nilai yang ingin ditunjukkan oleh kabupaten Malang dengan adanya pilkada ini yaitu nilai kesetaraan dan keterbukaan. Sebab KPUD dan Bawaslu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk ikut serta dalam kontestasi pilkada ini. Dalam persaingan tersebut perlu untuk strategi yang baik dan pentingnya sumber daya personal. Namun partisipasi kontestan dalam pilkada kabupaten Malang juga menunjukkan terlembaganya demokratisasi elitis.

### 3. Partisipasi Perempuan dalam Pilkadaes

Kajian yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam Pilkadaes ini bersumber dari beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik. Bagaimana yang telah dilakukan oleh Wawan & Rosyid (2023); Tokan, Gai, & Negong (2020); dan Adella, Murtasidin, & Ranto (2023) dimana mereka berusaha menganalisis pemimpin perempuan dalam tingkatan yang dibawah yaitu kepala desa. Ada beberapa kasus perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan tentu saja hal ini menyebabkan terjadinya dinamika di Desa tersebut, dikarenakan adanya pro dan kontra di masyarakat apalagi dalam lingkup yang terkecil yaitu desa. Kepala Desa adalah pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, karena lingkup kekuasaannya pun tidak seluas yang lainnya, oleh karena itu ini menjadi menarik untuk dikaji.

Studi yang dilakukan oleh Wawan & Rosyid (2023) yang berusaha menganalisis keterpilihan dan kepemimpinan kepala desa perempuan yaitu Heni Hendrwati di Desa Cijaku dengan menelisik juga peran local strongman dibelakangnya. Setelah melakukan penelitian ternyata memang benar bahwa adanya peran strongman yaitu ayah Heni yang mempunyai julukan ama Ekeng. Hal ini memberikan fakta bahwa terpilihnya Heni di Desa Cijaku bukan karena kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan

gender, melainkan adanya pengaruh yang sangat besar dari ayah Heni yang mempunyai padepokan dan banyak murid yang menganggapnya sebagai panutan. Dilihat dari kepemimpinan Heni sebagai pemimpin perempuan ternyata tidak menjaminkannya isu-isu kepentingan perempuan dalam ruang lingkup publik, terlihat dari minimnya program untuk menarik partisipasi perempuan yang dilakukan oleh Heni.

Studi selanjutnya dilakukan oleh Tokan, Gai, & Negong (2020) terkait partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dilihat dari relasi kuasa dan aksesnya. Dilihat dari akses adalah bagaimana perempuan mempunyai kemampuan atau hak untuk mempengaruhi dan memperoleh kemudahan atas fasilitas dan kontrol sumberdaya pembangunan. Sedangkan relasi kuasa yang baik dalam demokrasi dengan adanya kemudahan bagi perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol dalam memperoleh sumber daya. Dalam kasus di Desa Watoone jabatan pemerintahan desa dipegang oleh laki-laki sedangkan perempuan diberikan jabatan sisa seperti ketua RT dan satu jabatan kepala urusan, dalam prosesnyapun tidak terlepas dari isu kedekatan keluarga. Kurangnya demokrasi yang terjadi ternyata disebabkan oleh tidak adanya laki-laki yang ingin mencalonkan diri mengisi jabatan tersebut, pemilihan jabatan ketua RT dan KAUR itupun dipilih secara langsung oleh Kepala Desa, dimana hal tersebut telah menodai demokrasi. Yang melatar belakangi enggan masyarakat untuk mengisi posisi tersebut karena mereka khawatir dalam persoalan hukum tentang dana desa, karena saat ini penggunaan dana desa dikelola dengan tidak transparan dan akuntabel.

Studi lain dilakukan oleh Adella, Murtasidin, & Ranto (2023) terkait kemenangan perempuan yaitu Amnah dalam pemilihan Kepala Desa Padang Baru. Strategi politik yang dilakukan oleh Amnah adalah dengan memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya, sehingga memudahkan Amnah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan memmberikan aksi nyata dalam membangun sumber daya fisik untuk masyarakat, dan tentunya didukung oleh modal kultural dan modal simbolik (identitas) yang dilegitimasi. Adapun peran modal ekonomi yang tidak kalah penting dalam keberlangsungan pilkades dalam bentuk transaksi politik antara calon dan masyarakat. Modalitas dan strategi tersebutlah sebagai senjata atau modal menjadikan Amnah sebagai pemenang dalam pilkades Padang Baru. Tentu saja terpilihnya Amnah mimicu pro dan kontra di masyarakat, yang pro adalah masyarakat yang sadar akan kesetaraan gender agar terciptanya pemerintahan desa yang adil, sedangkan yang kontra adalah masyarakat yang takut kalau perempuan yang memimpin tidak bisa mengambil keputusan dengan netral karena terlalu terbawa dengan emosi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2007:4-5) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk

penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2009, pp. 4-5).

Berkaitan dengan judul penelitian penulis yang diajukan, maka selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menggali fenomena Perempuan dan Politik dalam Studi Strategi Pemenangan Nur Azizah Pada Pilkada Desa Gubugsari Kabupaten Kendal Tahun 2020. Dengan dilakukan pengamatan dengan cara menyeluruh. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan naratif menurut Clandinin & Connelly (2000:21) yaitu strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif. Di akhir tahap penelitian, peneliti harus menggabungkan dengan gaya naratif pandangan-pandangannya tentang kehidupan peneliti sendiri (Creswell, 2009, p. 21).

## 2. Sumber dan Jenis Data

Terdapat dua sumber dan jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer sendiri adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer terkait dengan narasi-narasi tentang Perempuan dan politik, tim sukses dan strategi mobilisasi. Narasi ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan dan masyarakat sekitar. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, jenis data sekunder pada penelitian ini dijadikan sebagai pendukung data utama. Penelitian ini memperoleh dan mengumpulkan data sekunder berupa artikel-artikel untuk mendukung penelitian (Sugiyono, 2012, p. 62).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan bagian yang penting, karena tujuan dari peneliti adalah mendapatkan data yang sesuai, adapun peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg (2002:72) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan melakukan wawancara tersebut menurut Susan Stainback (1988:72) peneliti akan mengetahui hal-hal dengan lebih mendalam seputar partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini akan sulit didapatkan melalui observasi (Sugiyono, 2012, p. 72). Dalam penelitian ini yang akan diwawancara sekitar 10 orang, yaitu terdiri dari Nur Azizah sendiri selaku Kepala Desa Perempuan terpilih, tim sukses Nur Azizah, dan masyarakat Desa Gubugsari.

### b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012, p. 82). Dalam penelitian ini dokumen yang akan digunakan sebagai data pendukung adalah laporan pelaksanaan Pilkades dan foto-foto.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan bersifat induktif, adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012, p. 88). Oleh karena itu Milles & Huberman (1984:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai selesai, adapun langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut (Sugiyono, 2012, pp. 91-99):

##### a. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk selanjutnya melakukan pengumpulan data, dan mencarinya apabila diperlukan.

##### b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain lain. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

##### c. Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data pada industri lain yang luas, maka akan dapat menjadi teori.

## G. Sistematika Penulisan

### BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan terkait latar belakang penelitian yang selanjutnya dipaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya dijabarkan tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini. Selain itu dalam penelitian ini akan dijelaskan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Pada BAB ini dijelaskan mengenai teori-teori yang telah dimasukkan dalam proposal sebelumnya secara komprehensif. Dan penjelasannya akan semakin dikerucutkan agar lebih matang pemahaman mengenai konsep yang digunakan sebagai kerangka dalam berfikir dan melakukan Analisa terhadap data.

## **BAB III LANDSCAPE DESA GUBUGSARI DAN DINAMIKA PILKADES 2020**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum Desa Gubugsari Kabupaten Kendal yang menjadi objek penelitian, dan bagaimana dinamika pilkades di Desa Gubugsari.

## **BAB IV STRATEGI MEMBANGUN TIM SUKSES**

Dalam bab ini akan dijelaskan secara mendetail tentang bagaimana Nur Azizah dalam membangun tim sukses untuk menyukseuskannya dalam Pilkades Desa Gubugsari Tahun 2020.

## **BAB V STRATEGI MOBILISASI PEMILIH**

Dalam bab ini akan menjelaskan strategi apa yang dipakai oleh Nur Azizah dalam memobilisasi pemilih pada Pilkades di Desa Gubugsari tahun 2020.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan, dan merangkumnya kedalam jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. Dan di bab ini juga akan disampaikan saran untuk penelitian sehingga bisa memmberikan manfaat.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

Bab ini membahas mengenai definisi konseptual dan landasan teoritik dalam teori mesin politik dan patronase oleh Adward Aspinall. Teori-teori ini digunakan untuk menganalisis strategi Nur Azizah membentuk tim sukses dan strategi Nur Azizah memobilisasi pemilih untuk memenangkan Pilkadaes Desa Gubugsari Kabupaten Kendal.

#### **A. Definisi Konseptual**

##### **1. Politik Perempuan**

Pada saat reformasi partisipasi perempuan dalam politik mengalami peningkatan, karena setelah berakhirnya orde baru perempuan diberikan peluang untuk ikut berkontestasi dalam politik, tapi memang pada awal-awal masih belum banyak perempuan yang terjun dalam politik. Terbitnya peraturan yang mengharuskan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, dan harus ada minimal 30% keterlibatan perempuan dalam partai politik membawa angin segar bagi perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik juga disinyalir karena ada tokoh kuat yaitu laki-laki dibelakangnya atau adanya faktor X, tapi banyak juga perempuan-perempuan yang berkualitas dan mempunyai di politik. Menurut Soeseno (2014:27) sebetulnya banyak perempuan yang memiliki kualitas yang kemampuan yang mempunyai tapi sayangnya masyarakat masih berpandangan negatif jika ada perempuan yang terjun dalam kontestasi politik. Keresahan-keresahan perempuan dalam politik ini sudah diperjuangkan dimulai tahun 1999 sampai saat ini dengan melakukan tekanan-tekanan kepada pemerintah agar membuat kebijakan untuk politik perempuan agar lebih ramah dan tetap melindungi hak-hak perempuan. Adapun faktor-faktor penghambat politik perempuan yaitu seperti adanya pandangan yang salah bahwa politik itu hanya untuk laki-laki dan identik dengan kekerasan dan anarkisme, perempuan tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian yang tinggi, masih mengakarnya budaya di masyarakat bahwa yang seharusnya menjadi pemimpin adalah laki-laki, selanjutnya faktor keuangan, dan yang terakhir yaitu soal kualitas yang kurang mempunyai dari perempuan itu sendiri (Fauzan, 2017, pp. 23-37).

##### **2. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah sesuatu yang mendasar dalam demokrasi, dan untuk menjadi indikator untuk menganalisis sistem politik sebuah negara. Partisipasi menurut Dahl (2005:45) adalah bagian yang sangat menentukan sampai sejauh mana demokrasi mampu memberi dampak terhadap sistem politik pemerintahan. Kebebasan sipil dan politik

merupakan faktor yang sangat penting dalam konstruksi demokrasi, adapun dimensi utama demokrasi yaitu mencakup persaingan atau kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Oleh karena pentingnya partisipasi politik, maka demokrasi akan kehilangan maknanya jika tidak adanya kebebasan warga negara dalam proses bernegara. Partisipasi politik timbul dimasyarakat secara lebih luas diakibatkan oleh beberapa hal yaitu adanya modernisasi dalam semua bidang, perubahan dalam struktur kelas, pengaruh kelompok intelektual dan komunikasi yang semakin modern, adanya konflik antar kelompok pemimpin politik, dan keterlibatan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. demokrasi mengeklem kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, oleh karena itu partisipasi politik merupakan perwujudan dari itu karena melalui partisipasi semua rakyat untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan. Menurut Conway (2000:45) partisipasi politik dipercayai merupakan alat untuk mendapatkan kebijakan yang diharapkan. Semakin tinggi partisipasi politik memperlihatkan demokrasi yang semakin baik (Fadli, 2017, pp. 44-46).

### **3. Tim Sukses**

Tim sukses adalah kelompok yang sangat mempengaruhi kemenangan para calon, biasanya yang diutamakan bergabung kedalam tim sukses adalah orang yang punya keahlian, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap calon, dan tidak kenal waktu dalam menjalankan kegiatannya. Tim sukses juga harus mempunyai kemampuan leadership dan memiliki daya ikat yang bisa menjaga timnya untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama untuk memenangkan calon. Tim sukses harus proaktif dalam mengidentifikasi masalah, karakter, dan budaya masyarakat, agar nantinya program-program yang sudah direncanakan tim sukses menjadi tepat sasaran, dan masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Masyarakat sebagai subjek bukan objek dimaan sering terjadi perubahan-perubahan secara dinamis, karena sifatnya yang tidak permanen, oleh karena itu tim sukses harus melakukan pendekatan sesuai dengan masyarakat tersebut agar nantinya diterima dengan mudah. Dalam pendekatannya tim sukses harus bisa melihat, menganalisis dan mencoba untuk memahami dari sisi masyarakat itu, seperti kondisi sosial yang meresahkan, kekecewaan, harapan, impian, dan permasalahan-permasalahan sosial. Mengetahui keadaan dilapangan beserta permasalahannya sangat penting bagi tim sukses untuk memberikan strategi terbaik yang dituangkan dalam sebuah program agar lebih tepat sasaran (Khalik, Rembang, & Tulung, pp. 2-4).

### **4. Strategi Mobilisasi**

Menurut Firmanzah(2008:35) ada beberapa strategi untuk mendapatkan hati masyarakat yaitu strategi penggalangan dan mobilisasi dalam mempengaruhi opini publik, melakukan koalisi dengan partai politik peserta pemilu yang lain, serta mengembangkan dan memberdayakan organisasi politik yang ada. Menurut Nugroho (2011:35) mobilisasi adalah usaha untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat yang dilakukan oleh partai politik dengan tujuan mendapatkan distribusi kekuasaan. Mobilisasi ini juga merupakan sebuah upaya untuk menggiring massa agar berada dalam satu barisan yang memiliki tujuan yang sama. Biasanya dilakukan oleh partai politik atau aktor politik yang memiliki kepentingan didalamnya, dan mobilisasi ini di sesuaikan dengan kondisi daerahnya. Mobilisasi dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya yaitu mobilisasi langsung dan tidak langsung. Mobilisasi langsung berupa pengarahan secara langsung kepada pemilih agar mereka melakukan sebuah tindakan politik secara langsung, contohnya melakukan sosialisasi langsung, kampanye terbuka, konvoi di jalan, dan lain lain. Sedangkan mobilisasi secara tidak langsung yaitu dengan mempengaruhi cara pandang pemilu melalui media sosial, debat visi misi, iklan politik, dan lain-lain (Dewi, Mufarikhin, & Rohmaniah, 2019, pp. 35-36).

## **5. Kampanye Politik**

Kampanye politik merupakan suatu kegiatan yang terorganisir yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Dalam demokrasi, kampanye politik yang paling menonjol yaitu fokus pada pemilu terutama pada pemilihan presiden di Indonesia. Pengertian kampanye menurut Rogers & Snyder (2002:8), kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang biasanya dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau organisasi politik dalam waktu tertentu dengan tujuan memperoleh dukungan dari masyarakat. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Berdasarkan surat keputusan KPU no. 35 Tahun 2004, ada beberapa jenis kampanye yaitu debat publik, kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, memasang alat peraga di tempat umum, menyebarkan kepada umum terkait bahan kampanye, penyebaran melalui media cetak dan elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, pertemuan terbatas, rapat umum, dan tatap muka dan dialog (Fatimah, 2018, pp. 7-9).

## **B. Landasan Teoritik**

### **1. Mesin Politik (Jaringan Mobilisasi)**

Ada beberapa manfaat dari mesin politik untuk membantu politisi dalam menerapkan strategi pemilu berbasis patronase. Pertama, membantu para politisi merekrut, mengorganisir, dan memberikan penghargaan kepada broker mereka. Para politisi yang menjalankan strategi patronase harus bergantung pada broker atau perantara yang dapat mengidentifikasi calon penerima, memberikan perlindungan kepada konstituen tersebut, dan melakukan apa yang mereka bisa untuk memantau dan menegakkan pertukaran klientelistik. Kedua, dapat membantu banyak politisi untuk mengkoordinasikan kegiatan kampanye mereka. Dengan memanfaatkan skala ekonomi yang memungkinkan mereka untuk menggunakan tim perantara yang sama dan mengumpulkan sumber daya patronase jika mencalonkan lebih dari satu kandidat di satu daerah pemilihan. Atau bisa juga memusatkan kegiatan kampanye dan patronase di distrik-distrik yang sangat kompetitif atau krusial (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 71-72).

Ketiga, dapat membantu mengatur akses politisi terhadap patronase. Yang paling jelas adalah bahwa seorang politisi yang menjadi anggota partai politik yang mengendalikan atau berpartisipasi dalam pemerintahan mungkin dapat mengakses dana dan sumber daya negara. Nantinya dapat disalurkan kepada konstituennya. Bahkan bisa memperoleh manfaat dari program pemerintah yang menasar pemilih secara langsung dan memberikan manfaat. Mesin politik lokal juga akan dapat mengakses sumber daya patronase – sejauh sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan di tingkat lokal atau melalui tawar menawar dengan politisi nasional. Sebaliknya, organisasi kampanye yang bersifat sementara seperti tim sukses, pada dasarnya bertujuan untuk menghubungkan seorang politisi dengan para pemilihnya dan hanya mempunyai sedikit peran dalam menyediakan akses terhadap sumber daya (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 72).

Ada tiga jenis mesin politik atau jaringan mobilisasi yang digunakan politisi untuk mengatur dan mendistribusikan patronase mereka, yang dilihat dari contoh negara-negara di Asia Tenggara. Pertama, mesin politik lokal yang umumnya bersifat kekeluargaan tetapi memiliki hubungan yang lemah (dan tidak menentu) dengan partai politik nasional. Jenis jaringan ini bisa sangat stabil dan bertahan lama, bahkan ketika koneksi mesin lokal dengan sistem politik tingkat yang lebih tinggi berubah-ubah dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Salah satu negara yang sering menggunakan mesin politik ini yaitu Filipina (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 11).

Kedua, partai nasional merupakan jaringan yang terpusat pada partai politik nasional dan koalisi. Seperti yang sering dijumpai di Malaysia. Loyalitas para aktor politik terhadap partai sering kali sangat kuat dan bertahan lama. Mereka yang memilih organisasi partai yang menang akan mendapatkan berbagai manfaat, mulai dari bantuan keuangan pada saat dibutuhkan hingga posisi di pemerintahan. Jenis jaringan politik ini menunjukkan tingkat pelebagaan yang kuat, dengan konsistensi yang signifikan dalam hubungan kekuasaan sepanjang siklus pemilu dan antar tingkat pemerintahan (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 11).Ketiga, tim kampanye pribadi ad hoc atau yang sering dikenal sebagai tim sukses yang sering dijumpai di Indonesia. Ditandai dengan organisasi kampanye lokal kurang koheren, namun keterkaitan kandidat dengan partai politik nasional umumnya lebih kuat dibandingkan dengan kandidat dengan mesin politik lokal.

Bahkan, peraturan pemilu di Indonesia (sebagian besar) melarang partai lokal dan mengamanatkan keterkaitan dengan partai nasional. Tim ad hoc adalah yang paling tidak stabil di antara ketiga jenis jaringan politik dalam hal struktur di basisnya. Walaupun para politisi petahana sering kali mampu memperoleh dukungan dari klien setia mereka dalam siklus pemilu berulang, sebagian besar kandidat sedikit banyak membangun tim mereka sendiri dari awal setiap pemilihan (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 11).

**Tabel 1. Perbedaan Mesin-Mesin Politik**

|   | <b>Malaysia<br/>(Partai Nasional)</b>   | <b>Filipina<br/>(Mesin Lokal)</b>   | <b>Indonesia<br/>(Jaringan Ad Hoc)</b>  |
|---|---|---|---|
| <b>Peran partai dalam jaringan mobilisasi</b> | Partai-partai nasional merupakan jaringan utama dan agen politik distributif.   | Partai nasional hanya dijadikan sebuah lebel oleh politisi, jaringan mobilisasi utama mereka adalah mesin lokal.  | Partai nasional hanya memberikan sedikit koordinasi atau bantuan, jaringan mobilisasi utama mereka adalah jaringan ad hoc (tim kampanye yang dibentuk oleh kandidat).               |
| <b>Siapa yang memimpin?</b>                   | Pemimpin nasional   | Pemimpin politik di tingkat pemerintah kota atau tingkat provinsi   | Kandidat itu sendiri  |
| <b>Tingkat pelebagaan atau permanensinya</b>  | Para aktivis partai meniti karir seumur hidup melalui partai mereka, pertama-tama membuktikan kesetiaan mereka kepada atasan di tingkat cabang, kemudian ke struktur partai, hingga mampu mencalonkan diri untuk posisi senior partai atau kantor legislatif. | Jika dibangun berdasarkan dinasti politik yang dominan, mesin-mesin tersebut bisa bersifat multigenerasi, sering kali terpecah dan terkonfigurasi ulang seiring dengan perubahan aliansi politik lokal. | Organisasi sementara yang bersifat fana dan hanya bertahan selama kampanye berlangsung, banyak broker yang bergabung dengan tim sukses untuk imbalan materi yang bersifat langsung. |

*Sumber:* (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 69-71)

Di Malaysia, perpaduan antara partai dan negara hampir selesai, sehingga memberikan dana yang cukup kepada partai-partai yang berkuasa, memungkinkan mereka untuk menopang jaringan mobilisasi partai dengan mengarahkan program-program meso-partikularisme dan makro kepada kelompok-kelompok pendukungnya. Koordinasi sentralisasi patronase untuk tujuan partai jarang terjadi di negara ini Filipina, namun di sana politisi lokal dapat memanfaatkan akses mereka terhadap publik sumber daya untuk mendistribusikan meso dan mikro-partikularisme melalui

mesin lokal mereka sepanjang siklus pemilu. Sebaliknya, peran Indonesia masih menonjol birokrasi dalam mengalokasikan sumber daya publik, dan kesulitan beberapa politisi (terutama legislator) dalam mengakses sumber daya tersebut secara bebas, memberikan batasan kemampuan politisi untuk terlibat dalam meso-partikularisme yang sedang berlangsung. Pola ini menghasilkan semakin sulit bagi para politisi untuk membangun dan memelihara mesin-mesin lokal yang mampu bertahan lama sejauh mungkin di Filipina. Sebagai konsekuensinya, penyediaan partikularisme mikro dan meso kemungkinan besar didanai oleh swasta dan dikonsentrasikan selama periode pemilu (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 72-73).

Sejauh mana partai merupakan kendaraan utama untuk mobilisasi dan distribusi patronase sehubungan dengan pemilu. Yang membedakan mesin partai dari mesin lokal adalah organisasinya bersifat nasional dan relatif stabil. Simbol dari mesin partai yang ada di Malaysia adalah UMNO (Organisasi Nasional Melayu bersatu). UMNO membangun organisasi partai yang kuat, menembus pedesaan tempat sebagian besar orang Melayu tinggal dan mengikat pemilih di pedesaan melalui distribusi manfaat pertanian dan manfaat lainnya. Kembali ke tiga fungsi yang dapat dijalankan oleh jaringan mobilisasi politisi patronase (mengorganisir broker, mengoordinasikan kampanye, dan mengatur sumber daya), UMNO terus-menerus mahir dalam bermain-main ketiga peran tersebut. Baik melalui strukturnya sendiri maupun melalui pengaruhnya terhadap birokrasi, pemerintah daerah, dan informal jaringan sosial – menjadi mesin politik akar rumput yang tangguh (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 77-78).

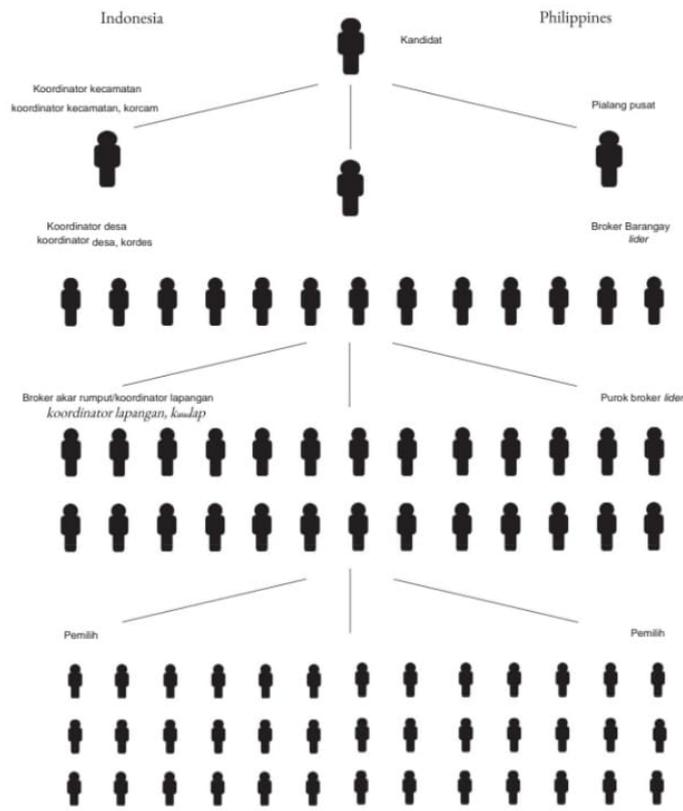
Meskipun jaringan mobilisasi yang berpusat pada partai di Malaysia menghubungkan masyarakat dengan layanan pemerintah, memfasilitasi distribusi mesopartikularisme, membantu memastikan pemilih menghargai partai dan kandidat atas keuntungan yang mereka terima, dan mengunjungi rumah-rumah untuk memberikan suara selama musim pemilu. Disana tidak secara sistematis mendistribusikan uang atau barang kepada masing-masing pemilih sebagai bagian dari upaya mobilisasi tersebut. Salah satu alasan mengapa organ-organ partai memainkan peran perantara yang penting antara negara dan warga negara adalah karena tidak lama setelah kemerdekaan, aparat pemerintah daerah tidak lagi berfungsi sebagai lapisan independen negara Malaysia. Hal ini sebagian besar telah digantikan oleh mesin politik partisan, karena pihak berwenang secara bertahap menghapuskan pemilihan umum untuk jabatan-jabatan di pemerintahan daerah. Sebaliknya, pemerintah tingkat negara bagian di Malaysia menunjuk anggota dewan lokal, Jabatan-jabatan ini secara efektif telah menjadi imbalan patronase bagi para pekerja setia partai dan partai yang akan datang (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 79-80).

Ringkasnya, pola patronase dalam rezim mesin partai di Malaysia melibatkan berbagai bentuk pembajakan program pemerintah dan distribusi meso-partikularisme yang semuanya diorganisir dan disalurkan melalui lembaga-lembaga nasional. Sebaliknya, kita hanya melihat sedikit sekali bentuk mikro partikularisme. Mengenai fungsi ketiga dari jaringan mobilisasi, UMNO dan mitra koalisinya di Malaysia juga sangat efektif dalam mengoordinasikan kampanye pemilu: menyeleksi kandidat dan menempatkan mereka pada kursi yang paling tepat; memberikan mereka dana, relawan, dan perlengkapan kampanye; pengorganisasian dan pendanaan liputan media; mengelola

keluarnya kebijakan dan program, termasuk penyaluran patronase; mengalokasikan kursi di antara partai-partai anggota koalisi (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 82).

Di Indonesia, sebagian besar kandidat politik pada dasarnya adalah kandidat independen ketika mereka mencalonkan diri. Kebanyakan dari mereka memilih untuk membangun struktur kampanye yang dipersonalisasi, umumnya dikenal sebagai “tim sukses”, untuk menghubungkan calon dengan pemilih dan mengatur kampanye mereka. Biasanya, mereka memulai dengan merekrut sejumlah orang kepercayaan dekat (kerabat, teman, mitra bisnis, dan sejenisnya) untuk membentuk inti tim. Beberapa dari orang-orang ini menangani fungsi khusus kampanye seperti keuangan atau periklanan, sementara yang lain membentuk tim pialang yang terorganisir secara geografis. Meskipun beberapa kandidat memanfaatkan struktur dan anggota partai dalam membangun tim ini, sebagian besar kandidat hanya mendapat sedikit dukungan dari partai. Menariknya, tim-tim sukses ini umumnya tidak hanya bersifat personal, namun juga merupakan organisasi yang berumur pendek. Dibentuk secara ad hoc menjelang pemilu, mereka biasanya bubar segera setelahnya, sering kali didasarkan pada hubungan yang bersifat jangka pendek dan bersifat instrumental. Kebanyakan orang yang terlibat sebagai kandidat atau anggota tim sukses secara terbuka mengakui bahwa tim-tim ini bertujuan untuk saling bertukar keuntungan jangka pendek. Kunci keberhasilan tim yang bekerja dengan baik adalah “biaya operasional” (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 84-85).

Ironisnya situasi ini adalah bahwa Indonesia mempunyai tradisi pengorganisasian partai yang relatif kuat dan partai-partai tetap menjadi pemain penting dalam politik nasional. Tim-tim tersebut bisa sangat besar, memobilisasi ribuan anggota untuk pemilu berskala besar, atau hanya mencakup puluhan anggota untuk menduduki jabatan tingkat rendah, seperti kursi di DPRD. Namun secara fungsional, tim-tim tersebut secara umum serupa. Tergantung pada kecanggihan dan pendanaan kampanye. Setiap kandidat berharap untuk membentuk tim yang dipimpin dari atas ke bawah oleh orang-orang yang loyal secara pribadi, biasanya karena mereka telah memperoleh manfaat dari bantuan atau sumbangan kandidat tersebut di masa lalu, atau terhubung melalui ikatan organisasi atau jaringan sosial lainnya (Tawakkal et al.2020). Namun sebagian besar anggota tim umumnya adalah anggota masyarakat biasa yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kandidat. Masing-masing dari mereka ditugaskan untuk merekrut sejumlah pemilih lain dari segelintir hingga beberapa lusin untuk memilih kandidat mereka. Untuk memfasilitasi pengorganisasian pialang tingkat dasar tersebut, tim sukses ini umumnya terstruktur secara piramidal dan terorganisir secara geografis yang bisa dilihat dari gambar 1. Struktur pialang di Indonesia dan Filipina (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 85-87).



**Gambar 1. Struktur Pialang di Indonesia dan Filipina**

**Sumber:** (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 88)

Secara khusus, para kandidat sering kali melakukan outsourcing setidaknya sebagian dari fungsi perantara kepada para pemimpin organisasi sosial di tingkat masyarakat. Negosiasi yang signifikan mungkin diperlukan, di mana kandidat akan memberikan barang-barang milik klub seperti jalan desa, menara baru, traktor tangan, peralatan memasak – untuk memperkuat tawar menawar. Oleh karena itu, secara keseluruhan, tim sukses pada dasarnya adalah struktur jangka pendek yang dirancang untuk mengatur kampanye pemilu dan memobilisasi perantara. Tim sukses hanya memainkan sedikit peran dibandingkan partai lain di Malaysia, seperti membantu kandidat mendapatkan akses terhadap sumber daya patronase atau berkoordinasi dengan kandidat lain. Meskipun sebagian besar kandidat memiliki afiliasi yang lemah dengan suatu partai, para kandidat biasanya harus mandiri dalam mengatur dana yang dibutuhkan untuk strategi patronase. Yang menjadi petahan tentu bisa mengakses sumber daya negara. Namun banyak kandidat yang mendanai sendiri atau menerima sumbangan kampanye dari sponsor bisnis. Tim sukses juga tidak berperan banyak dalam penggalangan dana, mereka adalah mesin untuk menyalurkan patronase pemilu, bukan untuk mengumpulkannya. Kandidat yang tidak berhasil di Indonesia sering kali harus berjuang selama bertahun-tahun untuk melunasi utang kampanyenya (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 89-90).

Kesimpulannya, pola tim ad hoc di Indonesia dipengaruhi oleh runtuhnya rezim otoritarian yang telah lama mendominasi. Ketika rezim tersebut runtuh, tokoh-tokoh politik lokal yang berkuasa, yang sebagian besar dibina oleh jaringan informal yang masuk ke dalam negara,

mempunyai posisi yang baik untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Untuk mengatur kampanyenya, mereka dapat mengandalkan jaringan dan pemimpin formal dan informal yang memiliki pengaruh di masyarakat lokal, memanfaatkan sumber daya dan koneksi mereka, dan mencoba membeli kesetiaan mereka dengan tawaran patronase dan gaji jangka pendek. Pada saat yang sama, sistem pemilu pasca tahun 2009 memberikan sedikit insentif bagi para aktor politik yang baru saja mendapatkan kekuasaan untuk bergantung pada partai-partai dalam mengkoordinasikan kampanye mereka. Partai-partai politik masih belum mempunyai banyak hal yang dapat ditawarkan dalam hal akses terhadap patronase atau dukungan kampanye. Secara keseluruhan, yang mereka tawarkan kepada banyak kandidat hanyalah sebuah tempat dalam pemungutan suara. Hasilnya adalah pola persaingan pemilu yang didominasi oleh struktur perantara suara ad hoc dan berfokus pada mikro partikularisme dan meso partikularisme (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 91).

Di Filipina, bentuk organisasi pemilu yang dominan paling baik dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang menggabungkan unsur-unsur tim kampanye ad hoc Indonesia dan partai-partai Malaysia yang sangat terkoordinasi dan terlembaga. Seperti di Indonesia, calon pejabat politik di Filipina mengatur tim hierarki yang terdiri dari broker lokal. Jaringan-jaringan ini yang mungkin menyebut diri mereka sebagai partai atau setidaknya “tim”. Tidak bersifat sementara dibandingkan jaringan-jaringan di Indonesia, karena sering kali berlangsung selama beberapa siklus pemilu dan didasarkan pada bentuk-bentuk klientelisme relasional yang bertahan lama. Hal ini biasanya juga melibatkan kolaborasi antar kelompok kandidat, bukan hanya berpusat pada satu kandidat atau pasangan kandidat. Berbeda dengan pola di Malaysia, mesin-mesin tersebut pada umumnya bersifat lokal atau provinsi, bukan nasional. Singkatnya, mereka benar-benar merupakan mesin lokal, yang dikumpulkan dan dilembagakan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia, namun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan di Malaysia (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 91-92).

Di Filipina, kekuatan dominan yang muncul di tingkat lokal pada awal abad kedua puluh adalah kelompok keluarga yang mengorganisir mesin politik lokal yang kuat dan bertahan lama. Sejak kemerdekaan, mesin-mesin lokal ini telah mengikatkan diri pada partai-partai politik nasional, umumnya melalui perjanjian jangka pendek yang bertujuan untuk memaksimalkan akses mereka terhadap sumber daya patronase nasional. Mengingat konteks ini, organisasi-organisasi kunci selama pemilu adalah mesin politik lokal. Dalam struktur dasarnya, mesin lokal di Filipina terlihat sangat mirip dengan struktur broker yang digunakan di Indonesia. Keduanya mengadopsi bentuk piramidal yang sama. Seperti di Indonesia, para kandidat sangat tertarik untuk merekrut tokoh masyarakat informal ke dalam tim mereka, dan menggunakan jaringan pribadi dan pengaruh sosial broker mereka untuk menghasilkan dukungan. Namun, kesamaan yang jelas dalam bentuk dan gaya struktur perantara di Filipina dan Indonesia menutupi dua perbedaan utama yang membantu mendefinisikan dan membatasi mesin partai lokal dibandingkan tim ad hoc yaitu tingkat kerja sama dan koordinasi antar kandidat, dan sejauh mana struktur tersebut bertahan selama dan selama pemilu (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 92-94).

Mesin lokal di Filipina cenderung lebih bersifat kooperatif dibandingkan organisasi kampanye di Indonesia. Di Indonesia, para kandidat membentuk tim sukses yang bekerja untuk memilih satu

pasangan kandidat saja (dalam pilkada) atau berbeda dari, dan bersaing dengan, tim dari rekan-rekan mereka (dalam pemilihan legislatif). Sebaliknya, di Filipina, mesin lokal biasanya melakukan mobilisasi atas nama seluruh kandidat. Daftar ini dapat mencakup calon gubernur, walikota, anggota dewan provinsi dan kota, dan, pada tingkat lebih rendah, calon pejabat nasional. Para pemimpin mesin juga sering bernegosiasi dengan kandidat di tingkat yang lebih tinggi, termasuk kandidat presiden dan partainya, untuk memanfaatkan sumber daya pemilu dan patronase di masa depan. Namun, hubungan mereka dengan partai-partai nasional pada umumnya fleksibel. Tim kampanye biasanya mencetak contoh surat suara (yang sering kali diisi dengan uang tunai), mencantumkan semua kandidat yang terhubung dengan mesin tersebut mulai dari presiden hingga anggota dewan kota dan mendesak para pemilih untuk mendukung seluruh daftar kandidat (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 94).

**Tabel 2. Membandingkan Broker Filipina dan Indonesia**

|   | Filipina | Indonesia |
|---|----------|-----------|
| <i>Apakah broker bekerja untuk setidaknya satu kandidat lain pada pemilu yang sama?</i> |          |           |
| TIDAK   | 47.4     | 91.9      |
| Ya  | 52.6     | 8.1       |
| <i>Kompensasi yang diharapkan oleh broker</i>   |          |           |
| Tidak ada   | 58.1     | 29.9      |
| Gaji atau pengeluaran   | 7.5      | 62.9      |
| Pekerjaan atau patronase  | 34.5     | 6.9       |
| <i>Apakah broker mengharapkan imbalan atas kinerja tinggi?</i>                          |          |           |
| Tidak Iya   | 28.0     | 91.1      |
| Tidak Iya   | 72.0     | 8.9       |

**Sumber:** (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 96)

Meskipun mesin Filipina dimobilisasi dan dikerahkan selama musim pemilu, pada intinya adalah klientelis dan/atau hubungan keluarga yang bisa dan memang bertahan seumur hidup, dan bahkan sering kali terlewat dari satu generasi politisi dan broker ke generasi berikutnya. Mereka beroperasi di antara pemilu melalui jalur patron-klien yang lebih tradisional: perantara mengharapkan untuk menerima bantuan (pekerjaan, proyek pembangunan, bantuan biaya sekolah, dll.) dari para politisi mereka, dengan imbalan tetap menjadi penggerak suara (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 96).

Ringkasnya, struktur dan tujuan tim sukses Indonesia dan mesin politik lokal Filipina memiliki beberapa kesamaan mendasar. Di kedua negara, organisasi-organisasi yang dipersonalisasi ini menggantikan partai-partai nasional yang kuat. Broker, yaitu mereka yang memiliki ikatan yang lemah dengan kandidat, yang pekerjaannya bersifat sementara dan bersifat transaksional. Namun data dari dua survei broker mengkonfirmasi bahwa rasio loyalis terhadap instrumentalis jauh lebih tinggi di Filipina dibandingkan di Indonesia. Apa yang terjadi di Malaysia partai-partai nasional menyusun organisasi kampanye dan mobilisasi. Meskipun para kandidat dapat memobilisasi pendukung mereka sendiri, baik anggota partai atau bukan. Untuk mendukung upaya kampanye mereka, merek partai hampir selalu menjadi yang terdepan. Partai-partai menyediakan setidaknya sebagian sumber daya dan materi kampanye, melakukan koordinasi antar kandidat, dan

menerapkan meso-partikularisme strategis di sela-sela pemilu untuk membantu membangun dan memperkuat merek partai (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 97-98).

## 2. Patronase

Patronase dan klientalisme merupakan konsep atau istilah yang berkaitan erat namun berbeda, meskipun beberapa pakar menganggap kedua konsep tersebut sama (misalnya, Kitschelt dan Wilkinson 2007). Patronase adalah sumber daya material, yang disalurkan untuk keuntungan tertentu untuk tujuan politik dan secara umum (tetapi tidak selalu) yang berasal dari sumber publik. Definisi ini menyempurnakan upaya-upaya sebelumnya untuk mengkonseptualisasikan patronase, termasuk definisi Shefter (1994, 283): “Patronase melibatkan pertukaran keuntungan publik untuk dukungan politik atau keuntungan partai,” dan para politisi mendistribusikannya kepada “pemilih individu, pekerja kampanye, atau kontributor” (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 6). Sehingga patronase adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditunjukkan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok atau komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara) atau dari dana publik (misalnya, proyek-proyek pork barrel yang dibiayai pemerintah) (Aspinall & Sukmajati, 2015, p. 4).

Klientalisme, di sisi lain, menggambarkan hubungan kekuasaan yang bersifat personalistik. Dalam definisi klasiknya, orang-orang dengan status sosial yang lebih tinggi (patron) terhubung dengan mereka yang berstatus sosial lebih rendah (klien) melalui ikatan timbal balik yang bersifat tatap muka dan bertahan lama yang dapat bervariasi dalam isi, tujuan, dan arah sepanjang waktu. Seperti yang dijelaskan James Scott (1972, 93), “Ada ketidakseimbangan dalam pertukaran antara kedua pasangan yang menunjukkan dan mencerminkan perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan, dan status relatif mereka.” Oleh karena itu, hubungan klientelis biasanya bersifat hierarkis dan melibatkan interaksi pribadi yang berulang dan berkelanjutan di mana perilaku masing-masing pihak bergantung pada perilaku pihak lain (Hicken 2011) (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 7). Lebih jauh patronase dan klientalisme dibedakan sebagai berikut. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya klientalisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung (Aspinall & Sukmajati, 2015, p. 4).

Ada tiga modifikasi definisi patronase, yang pertama patronase biasanya, namun tidak selalu, diperoleh dari sumber-sumber publik. Hal ini juga dapat melibatkan pihak swasta, seperti ketika politisi menggunakan sumber daya mereka sendiri, memanfaatkan dana dari kegiatan terlarang, atau (yang paling umum) menerima sumbangan dari pengusaha dan perusahaan untuk mendanai sumbangan mereka. Yang paling jelas adalah ketika para politisi membagikan pembayaran tunai pribadi atau hadiah lainnya kepada para pemilih, mereka biasanya menyajikannya sebagai hadiah pribadi, meskipun sumber utama dari hadiah tersebut adalah uang yang diperoleh secara korup dari kantor pemerintah. Kedua, politisi dan mesin atau partainya sering kali mendistribusikan patronase

tidak hanya kepada individu tetapi juga kepada berbagai kelompok. Ketiga, patronase tidak hanya mencakup ikatan kandidat-pemilih pada saat pemilu, patronase umumnya juga diberikan pada seluruh tingkatan pemerintahan (dari nasional hingga subnasional) dan sepanjang siklus pemilu (yakni, sepanjang periode sejak berakhirnya suatu pemilu hingga penyelenggaraan pemilu (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 6).

Adapun juga tiga tipe utama patronase (sekali lagi berangkat dari Hutchcroft 2014b). Pertama, mikro partikularisme, melibatkan pencairan manfaat kepada individu dan rumah tangga. Contohnya termasuk pembelian suara atau distribusi pekerjaan di sektor publik untuk keuntungan politik, termasuk posisi berketerampilan rendah yang menawarkan keuntungan partisan (Brierley 2021). Pada tingkat yang lebih tinggi, mikro partikularisme dapat melibatkan sejumlah besar dana pembangunan daerah pemilihan kepada masing-masing anggota parlemen berdasarkan ikatan khusus yang mereka miliki dengan para pemimpin partai atau pemerintah. Kita juga dapat merujuk pada jenis partikularisme ini sebagai patronage personalistik, karena partikularisme ini sering kali melibatkan hubungan langsung antara mereka yang menyalurkan dan mereka yang menerima (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 7).

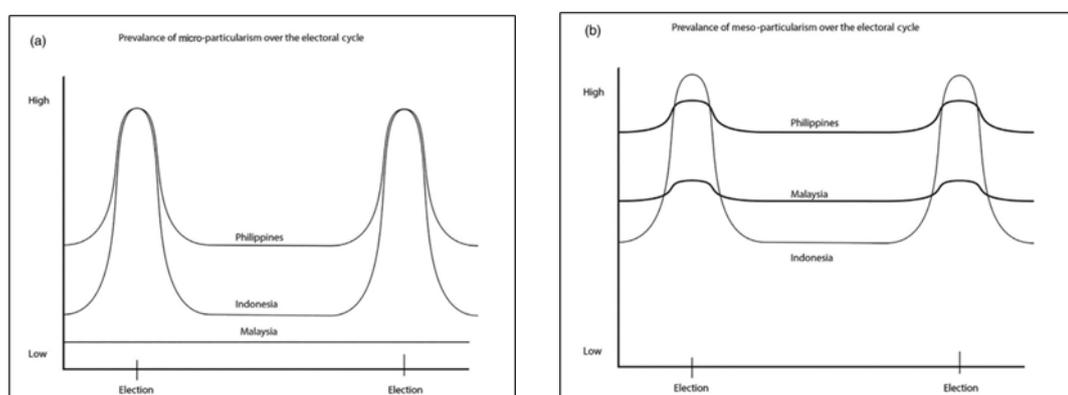
Kedua, meso partikularisme adalah kolektivitas yang lebih besar, baik secara geografis (misalnya desa atau distrik kongres), asosiasi (misalnya kelompok agama lokal), atau sektoral (misalnya serikat pekerja atau organisasi pekerjaan). Contoh manfaat materi mencakup segala hal mulai dari proyek infrastruktur skala kecil hingga menengah hingga peralatan untuk klub atau asosiasi. Meso-partikularisme tidak selalu melibatkan ikatan personalistik antara donor dan penerima. Kategori ini secara luas berhubungan dengan barang club atau barang publik lokal yang bisa digunakan oleh banyak orang, bukan sebagai barang individu tapi kolektif. Barang-barang club dapat dikecualikan bagi mereka yang berada diluar batas-batas grup tetapi tidak bagi mereka yang berada dalam batas-batas tersebut. Contohnya mencakup jalan lokal, perbaikan sekolah, dan infrastruktur lokal lainnya yang menyasar kelompok atau komunitas lainnya (Magaloni 2006; Kitschelt dan Wikinson 2007; Diaz-Cayeros dkk., 2016) (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 8).

Ketiga, makro partikularisme yang melibatkan program tingkat nasional atau regional yang “dibajak” oleh partai atau politisi. Dalam kasus-kasus ini, penargetan penerima manfaat seolah-olah mengikuti kriteria programatik dan universal seperti tunjangan tunai untuk keluarga miskin, pensiun untuk orang-orang di atas usia tertentu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi dalam ujian masuk universitas, dan seterusnya. Namun tampaknya politisi kenyataannya melakukan intervensi untuk memberikan manfaat kepada pendukung politik. Makro partikularisme dibagi ke dalam tiga sub-kategori yaitu yang pertama pengklaiman kredit, yang melibatkan upaya untuk meyakinkan pemilih bahwa partai atau politisi bertanggung jawab atas akses penerima terhadap program nasional atau daerah. Meskipun program tersebut, pada kenyataannya, tidak melibatkan pelaksanaan diskresi di luar birokrasi. Yang kedua Fasilitasi, mengacu pada membantu konstituen mengakses program di mana mereka secara formal memenuhi syarat. Fasilitasi sering kali merupakan bentuk layanan konstituensi yang sepenuhnya bersifat terbuka, seperti ketika legislator nasional membantu dewan daerah mengajukan permohonan kepada lembaga pemerintah (misalnya, untuk inisiatif transportasi,

kesehatan, atau lingkungan hidup setempat), namun hal ini juga dapat melibatkan birokrasi (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 8).

Ketiga morselisasi, terjadi ketika legislator memotong program nasional atau provinsi menjadi beberapa bagian dan kemudian menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mengucurkannya demi keuntungan politik atau pemilu, seperti ketika seorang politisi mendapat akses terhadap sejumlah kartu asuransi kesehatan atau beasiswa dan membagikannya kepada pekerja partai. Atau ketika dia melakukan intervensi dalam proses penganggaran untuk menyalurkan paket hibah rehabilitasi sekolah ke daerah pilihannya sendiri. Akibatnya, hal ini dapat melibatkan politisi yang mengubah program nasional atau regional menjadi patronase mikro atau meso. Namun karena sumber utamanya adalah program yang luas, setidaknya dialokasikan berdasarkan kriteria non-politik yaitu karena kebijakan/ manfaat yang dimaksud biasanya berasal dari program, dengan kebijaksanaan, umumnya hanya pada bagian marginal, kami menyebut semuanya sebagai makro partikularisme (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 9).

Selanjutnya akan diilustrasikan tingkat relatif patronase mikro dan meso partikularisme dalam tiga kasus negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Untuk menyoroti apakah dan bagaimana distribusi berubah selama siklus pemilu berdasarkan pola yang kami analisis secara lebih dalam melalui grafik dibawah ini (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 75).



**Gambar 2. Tingkat mikro partikularisme (a) dan meso partikularisme (b) di atas siklus pemilu**

**Sumber:** (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 76)

Dihat dari grafik diatas terdapat keberagaman dalam siklus pemilu yang tertinggi terjadi di Indonesia dan terendah di Malaysia, sementara di Filipina, prevalensi klientelisme pemilu dan akses terhadap sumber daya yang dapat digunakan untuk meso partikularisme di antara pemilu sejalan dengan siklus pemilu yang lebih nyata di kalangan mikro partikularisme daripada meso partikularisme. Ringkasnya, perbedaan dalam sifat jaringan mobilisasi berhubungan dengan perbedaan dalam campuran dan pola patronase yang disebut sebagai rezim mobilisasi elektoral (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 77).

Melihat patronase dari contoh kasus di tiga negara di Asia Tenggara, yaitu Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Di filipina, mikro partikularisme mendominasi, serta meso partikularisme

substansial dalam bentuk proyek-proyek kreatif yang sangat beragam (Holmes 2019), serta banyak peluang untuk mengklaim penghargaan dan mengambil keuntungan dari program pemerintah nasional. Di Malaysia, politik patronase pada dasarnya ditandai dengan “pembajakan” program-program publik di tingkat makro. Selama berpuluh-puluh tahun, pemerintahan yang dipimpin Barisan Nasional (Front Nasional) mempertahankan kekuasaannya dengan meluncurkan program-program nasional yang memberikan berbagai manfaat, terutama kepada para pendukung inti mereka yang berasal dari Melayu, dengan memberikan pemahaman kepada para penerimanya bahwa mereka akan terus menerima manfaat-manfaat tersebut hanya jika mereka mendukung Barisan Nasional secara politik (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 10).

Sedangkan di Indonesia, pola yang paling menonjol adalah gabungan patronase swasta di tingkat mikro dan meso. Di Indonesia, calon pejabat politik kemungkinan besar akan menginvestasikan dana pribadinya untuk mendistribusikan proyek infrastruktur skala kecil dan manfaat lainnya ke desa, lingkungan sekitar, dan kelompok masyarakat, serta mendistribusikan hadiah kepada pemilih perorangan. Kami juga mengamati perbedaan dalam pola temporal. Beberapa politisi Indonesia terutama kepala daerah dan pada tingkat lebih rendah, anggota legislatif yang sedang menjabat dapat mengakses sumber daya negara untuk mendukung patronase mereka. Strategi pejabat terpilih tersebut telah berusaha keras untuk mendapatkan kewenangan diskresi yang lebih besar atas alokasi dana negara sejak transisi menuju demokrasi 20 tahun silam. Namun, beberapa politisi Indonesia mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya negara. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kendai masih berada di tangan birokrat yang tidak melalui pemilu, dan karena politikus hanya memberikan sedikit bantuan kepada mereka dalam hal ini. Akibatnya, banyak politisi yang tidak mempunyai alternatif lain. Hingga mereka menginvestasikan sumber daya swasta dalam strategi patronase mereka, yang pada gilirannya mereka sering membatasi pencairan dana pada waktu pemilu (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 10-11).

Rezim mobilisasi merupakan gabungan yang saling membangun antara jaringan dan patronase. Mesin berbasis partai yang menentukan politik Malaysia berjalan seiring dengan strategi mobilisasi yang menggabungkan banyaknya partikularisme makro, meso-partikularisme, dan kebijakan programatik, dengan sebagian besar distribusinya terjadi di luar musim pemilu. Politisi jarang menargetkan individu atau rumah tangga secara langsung, terkait dengan tingkat partikularisme mikro yang cukup rendah di luar wilayah anomali tertentu dan sebagian besar sumber daya patronase berasal dari sumber publik dan pemerintah. Hal ini sangat kontras dengan Filipina, yang merupakan negara lokal mesin, dan Indonesia, dengan tim ad hocnya. Penargetan individu dan rumah tangga merajalela dalam kedua kasus ini, namun di Filipina, partikularisme mikro umumnya bercampur dengan partikularisme meso dan makro, dan didanai oleh sumber-sumber publik dan swasta. Distribusi patronase terjadi di seluruh kalender pemilu, dengan mikropartikularisme sangat dominan selama kampanye pemilu. Sebagai perbandingan, distribusi partikularisme mikro dan meso di Indonesia terkonsentrasi pada pemilu (dengan lebih sedikit partikularisme makro) dan kemungkinan besar didanai melalui sumber daya swasta dibandingkan dengan yang terjadi di Filipina (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 12-13). Lebih jauh dapat dilihat melalui tabel dibawah:

**Tabel 3. jaringan Mobilisasi dan Pola patronase di Asia Tenggara**

|  | Party machines<br>(Malaysia) | Local machines<br>(Philippines) | Ad hoc teams<br>(Indonesia)                               |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Micro-particularism (Chapter 4)</b>           |                              |                                 |   |
| Dimana-mana Waktu utama distribusi               | terbatas – selama pemilu     | luas antara Dan                 | luas selama pemilu  |
| <b>Meso-particularism (Chapter 5)</b>            |                              |                                 |   |
| Di mana-mana Waktu utama distribusi              | sedang, di antara pemilu     | luas diantara dan selama pemilu | , sedang beberapa di antara, sebagian besar selama pemilu |
| <b>Macro-particularism/Hijacking (Chapter 6)</b> |                              |                                 |   |
| Keberadaan di mana-mana klaim kredit             | ekstensif                    | ekstensif                       | sedang  |
| Keberadaan di mana-mana fasilitas                | ekstensif                    | sedang                          | terbatas  |
| Keberadaan di mana-mana morselisasi              | terbatas                     | luas                            | sedang <sup>a</sup>                                       |
| Waktu utama distribusi                           | di antara pemilu             | diantara dan selama pemilu      | diantara dan selama pemilu                                |
| <b>National public goods</b>                     |                              |                                 |   |
| Keberadaan di mana-mana                          |                              | , moderat,                      | terbatas, terbatas  |
| <b>Primary sources of patronage</b>              |                              |                                 |   |

**Sumber:** (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 12)

Mesin-mesin berbasis partai yang kuat, terutama mereka yang menjalankan dominasi nasional tidak hanya selama bertahun-tahun tetapi selama beberapa dekade, seperti di Malaysia, mempunyai akses istimewa yang tinggi terhadap sumber daya dan program negara. Penguasaan negara menjelaskan keunggulan makro-partikularisme: politisi dari partai yang berkuasa mampu berpartisipasi dalam program-program negara dengan hambatan yang relatif kecil. Politisi lokal terlibat dalam praktik yang dirancang untuk mencapai tujuan pemilu pribadi mereka dan untuk mendukung kepentingan partai nasional. Mikro partikularisme relatif jarang terjadi karena kandidat politik mencalonkan diri dibawah partai pemerintah dan dapat mengklaim kredit atau memfasilitasi akses terhadap program pemerintah. Ketika dua jenis jaringan lainnya, yaitu mesin lokal dan tim ad hoc, mendominasi, maka politisi di tingkat lokal kurang bisa berkoordinasi dengan tingkat nasional. Tidak ada yang bisa menandingi penyampain program nasional yang dilakukan secara teratur dan konsisten melalui partai atau koalisi nasional yang memiliki institusi pemerintahan yang kuat seperti di Malaysia. Akibatnya, pemerintahan di negara-negara tersebut mempunyai orientasi yang lebih lemah terhadap seruan terprogram, dan politisi lokal lebih mengandalkan distribusi patronase (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 14).

Namun masih terdapat perbedaan penting dalam cara mesin lokal dan tim ad hoc menerapkan patronase. Dalam kasus Filipina, fakta bahwa mesin-mesin di tingkat lokal yang seringkali berbasis pada satu keluarga mampu mengendalikan organ-organ lokal negara. Terkadang selama beberapa

dekade, menjadikan mereka berada dalam struktur kekuasaan lokal. Penguatan ini memberi mereka peluang besar untuk mengakses program pemerintah yang didistribusikan dari pusat, memungkinkan mereka membangun hubungan yang berkelanjutan dengan perantara dan pemilih, termasuk dengan mendistribusikan manfaat di sela-sela pemilu. Dalam kasus Indonesia, tim pialang pribadi umumnya didasarkan pada hubungan jangka pendek. Akibatnya, sebagian besar distribusi patronase kepada pemilih juga bersifat sementara, terkonsentrasi pada waktu pemilu (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, pp. 14-15).

Pada tahap awal perkembangan negara modern, ada satu partai mampu menguasai pemerintah pusat, memonopoli sumber daya, dan menggunakan sumber dayanya agar memiliki jaringannya sendiri untuk memobilisasi pemilih, mereka akan dapat mengandalkan klaim kredit makro partikularisme untuk memobilisasi pendukung. Pola yang terjadi di Malaysia di mana satu partai secara teknis merupakan koalisi partai, namun terdaftar secara bersama-sama mampu merebut otoritas pemerintah sejak dini pada masa transisi menuju kemerdekaan. Dengan partai patronase terpusat mendominasi akses terhadap sumber daya pemerintah, yang kemudian dimiliki oleh kandidat politik sedikit insentif (jika berasal dari koalisi pemerintah) atau peluang (jika berasal dari partai oposisi) untuk berinvestasi dalam bentuk patronase swasta (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 16).

Sebaliknya, baik di Filipina maupun di Indonesia, faktor sejarah dan kelembagaan bersekongkol untuk memelihara pola distribusi patronase yang sangat berbeda. Di Filipina, mesin lokal yang kuat memperkuat dominasi mereka. Pada awal abad ke-20, ketika para administrator kolonial AS berkonsentrasi perhatian mereka bukan pada pengembangan birokrasi nasional yang kuat, melainkan pada pembentukan jabatan-jabatan pilihan di tingkat lokal – yang segera diikuti secara penuh memilih majelis nasional dan, akhirnya, Senat. Pembatasan hak pilih dan keuntungan sumber daya memungkinkan adanya kekuasaan lokal elite pemilik tanah untuk memperoleh kekuasaan politik, mereka segera menikmati pengaruh besar atas penunjukan birokrasi, sumber daya yang melimpah, pinjaman dari perusahaan milik negara bank, dan banyak lagi (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 16).

## BAB III

### LANDSCAPE DESA GUBUGSARI DAN DINAMIKA PILKADES 2020

Pada bab ini penulis memberikan gambaran lanscape Desa Gubugsari dilihat dari kondisi geografi, Demografis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Desa Gubugsari. Selain itu juga akan di jelaskan sejarah Desa Gubugsari, profil Nur Azizah, dan dinamika Pilkades yang terjadi di Desa Gubugsari tahun 2020.

#### A. Gambaran Umum Desa Gubugsari

##### 1. Kondisi Geografis dan batas Administrasi

Desa Gubugsari merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal provinsi Jawa Tengah. Desa Gubugsari berjarak 36 Km dari Kota Semarang yang merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara Desa Gubugsari berbatasan dengan Desa Pucang Rejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Mulyo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Penanggulan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Mulyo. Luas wilayah administratif Desa Gubugsari secara keseluruhan memiliki luas wilayah 2,08 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 5 Dusun, yaitu Gersan, Pagubugan Selatan, Pagubugan Utara, Diwek, dan Minongo.



**Gambar 3. Peta Wiayah Administrasi Desa Gubugsari**

**Sumber: Google Maps Desa Gubugsari Website Resmi Desa Gubugsari Kabupaten Kendal**

##### 2. Demografis Desa Gubugsari

Jumlah masyarakat Desa Gubugsari tahun 2020 yaitu diketahui sebanyak 4.390 jiwa. Dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 2.253 dan perempuan sebanyak 2.137. Jika dilihat berdasarkan data, di desa Gubugsari lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Selisih jumlah

penduduk antara laki-laki dan perempuan sebanyak 116. Data mengenai jumlah penduduk Desa Gubugsari berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Statistik Penduduk Desa Gubugsari Berdasarkan jenis Kelamin Tahun 2020**

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------|
| Laki-laki     | 2.253  |
| Perempuan     | 2.137  |
| Jumlah Total  | 4.390  |

**Sumber: Data Demografi Desa Gubugsari 2020**

Penjabaran lebih lanjut mengenai data penduduk Desa Gubugsari berdasarkan kelompok umur. Diketahui bahwasannya komposisi penduduk didominasi oleh penduduk dengan rentang usia 35-39 tahun yaitu sebanyak 396 jiwa. Di posisi terbanyak kedua yaitu penduduk dengan rentang usia 40-44 tahun yaitu sebanyak 365 jiwa. Dan diposisi terbanyak ketiga yaitu penduduk dengan rentang usia 20-24 tahun yaitu sebanyak 347 jiwa. Sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah penduduk dengan rebtang usia 70-74 tahun yaitu sebanyak 83 jiwa. Data mengenai jumlah penduduk Desa Gubugsari berdasarkan kelompok umur tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Statistik Penduduk Desa Gubugsari Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020**

| No           | Keterangan | L     | P     | Jumlah |
|--------------|------------|-------|-------|--------|
| 1.           | 0 – 4      | 144   | 145   | 289    |
| 2.           | 5 – 9      | 168   | 158   | 326    |
| 3.           | 10 – 14    | 189   | 138   | 327    |
| 4.           | 15 – 19    | 160   | 139   | 299    |
| 5.           | 20 – 24    | 172   | 175   | 347    |
| 6.           | 25 – 29    | 177   | 163   | 340    |
| 7.           | 30 – 34    | 183   | 156   | 339    |
| 8.           | 35 – 39    | 200   | 196   | 396    |
| 9.           | 40 – 44    | 189   | 175   | 365    |
| 10.          | 45 – 49    | 145   | 166   | 311    |
| 11.          | 50 – 54    | 150   | 157   | 307    |
| 12.          | 55 – 59    | 150   | 123   | 273    |
| 13.          | 60 – 64    | 85    | 108   | 193    |
| 14.          | 65 – 69    | 75    | 61    | 136    |
| 15.          | 70 – 74    | 36    | 47    | 83     |
| 16.          | 74 - ~     | 54    | 72    | 126    |
| Jumlah Total |            | 2.277 | 2.179 | 4.456  |

**Sumber: Data Demografi Desa Gubugsari 2020**

Selanjutnya yaitu mengenai jumlah penduduk Desa Gubugsari berdasarkan pendidikan akhirnya. Masyarakat Desa Gubugsari dari segi pendidikan masih didominasi oleh penduduk yang tidak/belum sekolah dengan jumlah 1.300 jiwa. Yaitu sekitar 29,6% dari jumlah penduduk Desa Gubugsari. dan diurutkan kedua terbanyak yaitu penduduk dengan pendidikan akhir tamat SD/ sederajat dengan jumlah 1.297 jiwa, beda dikit dengan penduduk yang tidak/belum sekolah. Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yaitu sekitar 29,5%. Sedangkan jumlah penduduk yang berkuliah dilihat dari lulusan Diploma III, Akademi/Diploma III/S.Muda,

Diploma IV/Strata I, Strata I, dan Strata II. Yaitu sebanyak 159 jiwa atau sekitar 3,6% dari jumlah seluruh penduduk Desa Gubugsari. Data mengenai jumlah penduduk Desa Gubugsari berdasarkan pendidikan akhir tahun 2020 dapat diligat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Statistik Penduduk Desa Gubugsari Berdasarkan Pendidikan Akhir Tahun 2020**

| No           | Keterangan                 | L     | P     | Jumlah |
|--------------|----------------------------|-------|-------|--------|
| 1.           | Tidak/Belum Sekolah        | 641   | 659   | 1.300  |
| 2.           | Belum Tamat SD/Sederajat   | 106   | 87    | 193    |
| 3.           | Tamat SD/Sederajat         | 668   | 629   | 1.297  |
| 4.           | SLTP/Sederajat             | 402   | 409   | 811    |
| 5.           | SLTA/Sederajat             | 367   | 263   | 630    |
| 6.           | Diploma III                | 3     | 7     | 10     |
| 7.           | Akademi/Diploma III/S.Muda | 14    | 26    | 40     |
| 8.           | Diploma IV/Strata I        | 50    | 56    | 106    |
| 9.           | Strata II                  | 2     | 1     | 3      |
| 10.          | Strata III                 | 0     | 0     | 0      |
| Jumlah Total |                            | 2.253 | 2.137 | 4.390  |

**Sumber: Data Demografi Desa Gubugsari 2020**

Agama yang dianut oleh penduduk Desa Gubugsari pada tahun 2020 hanya 2 agama yaitu islam dan katholik. Tidak ada masyarakat yang beragama kristen, hindu, buddha, khonghucu, dan kepercayaan. Agama islam masih sangat mendominasi di Desa Gubugsari yaitu sebanyak 4.383 jiwa memeluk agama islam, atau sekitar 99,84%. Sedangkan penduduk yang beragama katholik di Desa Gubugsari yaitu sebanyak 7 jiwa, atau sekitar 0,16%. Data mengenai jumlah penduduk Desa Gubugsari berdasarkan agama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Statistik Penduduk Desa Gubugsari Berdasarkan Agama Tahun 2020**

| No           | Keterangan  | L     | P     | Jumlah |
|--------------|-------------|-------|-------|--------|
| 1.           | Islam       | 2.251 | 2.132 | 4.383  |
| 2.           | Kristen     | 0     | 0     | 0      |
| 3.           | Katholik    | 2     | 5     | 7      |
| 4.           | Hindu       | 0     | 0     | 0      |
| 5.           | Buddha      | 0     | 0     | 0      |
| 6.           | Khonghucu   | 0     | 0     | 0      |
| 7.           | Kepercayaan | 0     | 0     | 0      |
| Jumlah Total |             | 2.253 | 2.137 | 4.390  |

**Sumber: Data Demografi Desa Gubugsari 2020**

### **3. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Desa Gubugsari**

Desa gubugsari adalah sebuah Desa di Kabupaten Kendal dengan pemandangan yang indah dan masyarakat yang ramah-ramah. Hubungan antar masyarakat masih terjalin dengan harmonis, masih seringnya dijumpai sesama warga yang masih mengumpul membicarakan keresahan satu sama lain, komunikasi yang terjalin masih sangat baik. Desa yang terbagi menjadi 5 dusun atau dukuh ini dipimpin oleh kadus-kadus yang bisa dengan baik membawa kerukunan antar warganya. Budaya gotong-royong yang masih sangat terasa di Desa Gubugsari, ditandai dengan banyaknya kegiatan yang ada di Desa dilakukan bersama-sama tanpa pamrih. Masyarakat masih peka dengan sekitarnya, terutama dengan tetangganya. Jika sekitarnya sedang mengalami musibah atau sedang mengadakan sebuah acara mereka dengan sigap menawarkan bantuan yang bisa mereka berikan, baik itu berupa materi atau tenaga. Ataupun jika ada acara bersama seperti 17 Agustusan dan lain sebagainya, mereka bersama-sama mengelola acara tersebut dengan harmonis.

Mayoritas masyarakat Desa Gubugsari menganut agama islam yang masih sangat kental, terbukti dengan masih sering diadakannya acara-acara keagamaan yang dimasih sangat diminati oleh masyarakatnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kultur NU yang tertanam di Desa Gubugsari. Organisasi-organisasi NU tumbuh dengan baik di sana, dari mulai remaja hingga ibu-ibu ikut terlibat aktif disana. Dari remajanya ada organisasi IPNU dan IPPNU, sedangkan untuk ibu-ibunya ada muslimat dan fatayat NU. Organisasi-organisasi tersebut yang biasanya menyelenggarakan acara keagamaan tersebut. Dan organisasi tersebut juga sebagai wadah untuk mendiskusikan dan saling berkumpul untuk membahas terkait menjaga keagamaan di Desa Gubugsari. Atau bisa disebut sebagai garda terdepan dalam hal yang berbau keagamaan.

Selain itu ada juga budaya bancaan yaitu kebiasaan makan bersama-sama dengan beralaskan daun pisang untuk merayakan atau memperingati suatu peristiwa. Biasanya setiap warga membawa makanan masing-masing lalu dikumpulkan menjadi satu atau juga mereka masak bersama-sama, lalu nanti dimakan bersama-sama juga. Budaya seperti ini penting untuk dilestarikan, karena bisa terus menjaga kekeuargaan antar warga desa Gubugsari. Biasanya acara bancaan dilakukan untuk memperingati hari kemerdekaan, muharoman, isra mi'raj, dan lain sebagainya. Biasanya warga membawa makan dari rumah masing-masing atau ada yang bertugas memasak sisanya membawa cemilan dan pelengkap lainnya. Nanti disetiap gang atau per RT digelar karpet lalu ditaruh makanannya diatas daun pisang, lalu dimakan bersama-sama. Tetapi sebelumnya ada sambutan terlebih dahulu dan doa bersama.

Masyarakat di Desa Gubugsari mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, baik itu petani padi, bawang merah, tembakau, jagung, dan dan sebagainya. Akan tetapi lebih banyak yang memilih bertani bawang merah sekaligus tembakau, karena dinilai memiliki harga jual yang lumayan. Terlebih lagi tanah di Desa Gubugsari cocok untuk ditanami bawang merah. Banyak yang berprofesi sebagai petani lantaran masih sangat banyak dan subur nya lahan yang ada di sana, sehingga dimanfaatkan oleh warga untuk bercocok tanam. Banyak petani yang menjual kepada orang brebes, dan nantinya oleh orang brebes dijual dengan merek brebes. Karena bawang-bawang yang dihasilkan adalah yang besar-besar seperti bawang brebes. Bahkan banyak masyarakat Brebes yang mempunyai lahan pertanian atau menyewa lahan

pertanian yang ada di Desa Gubugsari untuk ditanami bawang merah. Ada yang dikelola langsung oleh mereka, tetapi banyak juga yang dikelola oleh orang Desa Gubugsari. jadi masyarakatnya hanya sebagai petani nya saja, bukan pemilik lahan. Setelah panen biasanya lanjut tugas ibu-ibu untuk mrotol atau memotong daun di tunai bawang merah agar siap dijual.

Selain menjadi petani, banyak juga masyarakat Desa Gubugsari yang menjadi TKW di negara-negara tetangga. Entah itu laki-laki ataupun perempuan, sama saja. Banyak nya lembaga atau yayasan yang memfasilitasi mempermudah masyarakat yang ingin bekerja diluar. Pekerjaan ini dijadikan alternatif bagi mereka jika sudah tidak ada pekerjaan yang menguntungkan di negeri sendiri, bahkan di Desa Gubugsari. Negara-Negara yang menjadi Incaran biasanya Korea, Taiwan, China, dan lain sebagainya. Mereka biasanya bekerja kurang lebih lima tahun untuk mengumpulkan uang, setelah terkumpul mereka membeli sawah di Desa sebagai lahan penghasilan mereka. Banyak yang menjadi TKW adalah anak-anak muda kisaran umur 20an yang pergi untuk mengumpulkan uang sebagai modal menikah dan tabungan kedepannya. Setelah terkumpul mereka pulang dan menikah, dan lanjut bekerja kembali di Desa Bubugsari. Akan tetapi ada juga yang betah di Negeri orang dan melanjutkan kontrak disana. Karena menjadi TKW dinilai lebih menguntungkan dibanding bekerja di Negeri sendiri. Jika ditanya juga kepada orang tua-orang tua yang ada di Desa Gubugsari, banyak dari mereka yang pernah bekerja sebagai TKW pada masa mudanya.

## **B. Sejarah Desa Gubugsari**

Sebelum terbentuknya Desa Gubugsari, dulu sekitar Tahun 1850-an Desa Gubugsari adalah wilayah-wilayah kecil yaitu:

1. Gersan dipimpin oleh Kyai Anggoreso dari keturunannya melahirkan pimpinan-pimpinan yang berkiprah dipemerintahan Desa Gubugsari yaitu Bunawi, Suwandi, Musmani, Sutjipto, Joko Narimon (Kadus 1), Agus Santosa (Kaur Keuangan), Bakti Utami (Kaur Perencanaan Pembangunan), dan Trias Rizki (Kasi Pemerintahan).
2. Pagubugan dipimpin oleh Kyai Gubug dari keturunannya melahirkan pimpinan-pimpinan yang berkiprah dipemerintahan Desa Gubugsari (Kepala Desa) Rendwan, Muntari, Achmad Khudori. Keturunan yang berkiprah dipemerintahan Desa Gubugsari adalah Karnadi, Lebar, Sukir, Sartin, H. Abdul Ghofur, Juremi, H. Basari, Murhadi, Jumro (Kasi Kesejahteraan), Munawir (Kaur Umum), Joko Edi Siswanto (Kadus II), Rahmatul Amalia (Carik / Sekdes).
3. Diwek dipimpin oleh Kyai Jiwo dari keturunannya melahirkan pimpinan-pimpinan yang berkiprah dipemerintahan Desa Gubugsari (Kepala Desa) Syim. Keturunan yang berkiprah dipemerintahan Desa Gubugsari adalah Sepan, Redi, Abdul Sakur (Kadus III).
4. Minongo Kulon dipimpin oleh Kyai Senogati dari keturunannya melahirkan pimpinan-pimpinan yang berkiprah dipemerintahan Desa Gubugsari (Kepala Desa) seperti Sanam Lurah Minongo Tahun 1901 (Keturunan ke 5), H. Abdul Ghani Lurah Minongo Tahun 1915 (Keturunan 6), HM. Suwarno Kepala Desa Tahun 1951-1988 (Keturunan ke 7), H. Rofi'i Kepala Desa Tahun 1988-1998 dan 2007-2013 (Keturunan ke 8), Muslikhul Amri Kepala Desa Tahun 2013-2019 (Keturunan ke 9) dan masih banyak lagi keturunan Kyai Senogati yang

berkiprah di Pemerintahan Desa sebagai Perangkat Desa Gubugsari, Seperti H. Toha Kaur Umum (Keturunan ke 7), Kumaidi Bayan (Keturunan ke 8), Achmad Arifin Modin (Keturunan ke 8), Agus Sunarko Bekel (Keturunan ke 8) .

5. Minongo Wetan dipimpin oleh Kyai Brojotongko, setelah Kyai Brojotongko meninggal dunia Minongo Wetan bergabung ke Minongo Kulon. Dari keturunannya melahirkan pimpinan-pimpinan yang berkiprah dipemerintahan Desa Gubugsari adalah Mas'ud (Kadus IV).

Pada Tahun 1900-an keempat wilayah kecil itu digabung menjadi dua bagian yaitu: Gersan dan Pagubugan dipimpin seorang Lurah Pagubugan bernama Tamsli Tahun 1901, lalu digantikan oleh Lurah Rendwan Tahun 1910. Sedangkan Minongo dan Diwek dipimpin seorang Lurah Minongo bernama Sanam Tahun 1901 lalu digantikan oleh Lurah H. Abdul Ghani Tahun 1915. Pada tahun 1925 Kelurahan Minongo dan Kelurahan Pagubugan mengadakan kesepakatan agar wilayah kelurahan kecil ini disatukan menjadi satu kelurahan lebih besar dan lebih makmur, dengan adanya kesepakatan tersebut maka diadakan pemilihan lurah adapun calonnya adalah ada tiga yaitu Sahri warga Minongo Wetan (mengundurkan diri) Rendwan Lurah Pagubugan, H. Abdul Ghani Lurah Minongo yang menghasilkan satu orang pemimpin yaitu Rendwan memenangkan pemilihan dan memimpin empat wilayah yaitu: Gersan, Pagubugan, Diwek dan Minongo dengan nama Desa Gubugsari.

Asal nama Gubugsari adalah pemberian nama dari Kyai Gubug Pemimpin Wilayah Pagubugan Tahun 1850-an, Gubug artinya Rumah, Sari artinya Ramai, sehingga nama itu dijadikan nama Desa oleh Lurah Rendwan Tahun 1925. Lurah Rendwan memimpin cukup lama dari Tahun 1925 sampai dengan Tahun 1942 yang dibantu Carik dan Perangkat Desa lainnya. Walaupun kantornya/balai desa belum ada tetapi untuk pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Pelayanan masyarakat pada saat itu berada dirumahnya. Setelah itu digantikan oleh Syim dari Dukuh Diwek Tahun 1943-1946 yang memimpin hanya 3 tahun karena meninggal dunia. Dengan kekosongan Pimpinan Desa Gubugsari dimasa Pemerintahan Orde Lama, maka Kepala Desa Gubugsari dipimpin oleh Lurah Moentari dari Dukuh Diwek Tahun 1946-1950, setelah Lurah Moentari lengser diadakan Pemilihan Kepala Desa dengan sistem lama yang dimenangkan HM. Suwarno dari Dukuh Minongo memimpin desa dari Tahun 1951 sampai Pemerintahan Orde Baru Tahun 1988 (Kades Terlama).

Dari kepemimpinan HM. Suwarno inilah Desa Gubugsari makin berkembang pembangunan dengan meluruskan jalan-jalan desa yang sebelumnya berkelok-kelok. Perkerasan jalan-jalan kampung, pembangunan jembatan dan gorong-gorong, pengadaan sarana pemerintahan desa, pendidikan, seni dan olahraga dan juga peribadatan. Setelah dikeluarkan Perda Tk. II Kendal tentang pembatasan masa kepemimpinan Kepala Desa, maka HM. Suwarno lengser dari Tampuk Kepemimpinan Desa Gubugsari diusianya yang sudah mencapai 65 tahun. Sehingga kekosongan pimpinan desa dijabat oleh Sutjipto (Carik Desa Gubugsari).

Pada akhir Tahun 1988 adanya kekosongan Kepala Desa, maka diadakanlah Pilkades yang diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu Sunaryo (mengundurkan diri), Rofi'i, Murhadi (Kadus Pagubugan), dan Moch Iknak, dari hasil pilkades menghasilkan kades terpilih Rofi'i, beliau meneruskan pembangunan pendahulunya dengan membangun sampai ke jalan-jalan kampung bisa terjamah aspal, sarana pemerintahan, sosial, produksi, Ekonomi, pembangunan mental/spiritual dan lain-lain juga membuat balai desa. Menjabat selama 10 Tahun dari 1988-1998. Setelah berhentinya

Rofi'i dari jabatan kepala desa, kekosongan kepala desa dijabat oleh Sutjipto (Carik Gubugsari) dan diadakan pilkades yang diikuti oleh 4 (empat) kontestan yaitu Rofi'i (Mantan Kades), Murhadi (Kadus Pagubugan), Achmad Khudori (Kaur Pembangunan) dan Asrur. Yang meloloskan Achmad Khudori sebagai Kepala Desa terpilih dan meneruskan pembangunan. Pada masa beliau pembangunan desa tambah maju dengan adanya tambahan dana/ bantuan dari kabupaten atau pemerintah yang semakin besar. Pada masa ini jalan mulai dipavingisasi, gedung pemerintahan dipoles, sarana prasarana kantor lebih modern lagi. Wilayah desa dimekarkan menjadi 5 (lima) dusun/dukuh yaitu: Gersan, Pagubugan Utara, Pagubugan Selatan, Diwek dan Minongo. Achmad Khudori menjabat sebagai kepala desa selama 9 tahun (1999-2007).

Setelah berakhirnya masa tugas Achmad Khudori dari Kepala Desa Gubugsari diadakan Pilkades yang diikuti 4 (empat) yaitu Nur Mustamidah (mengundurkan diri), Munawir (Kebayan), H. Rofi'i Minongo dan Maryanto Pagubugan Selatan. Dan meloloskan H. Rofi'i untuk memimpin Desa Gubugsari kali kedua sejak dari Tahun 2007 sampai November 2013, yang dibantu Carik Sutjipto dan Perangkat Desa lainnya, beliau inilah merencanakan pembangunan fisik, non fisik (ekonomi), serta mental /spiritual secara cermat dan merata. Baru saja menjabat Kepala Desa langsung membangun pemavingan jalan penghubung Gersan–Pagubugan. Yang tadinya orang gersan sulit bersosialisasi dengan Pagubugan/Balai Desa dan Anak sekolah dari Gersan sulit melewatinya. Merenovasi asphal Pagubugan yang begitu parahnya, membanbngun paving jalan Diwek, membangun rabat beton jalan antar desa di Gersan, membangun jalan Gersan, membangun paving Jalan Kebo Pagubugan Utara, membangun Rabat Beton Jalan Pagubugan yang tadinya selalu tersisih dari pembangunan desa, dan merencanakan pembangunan senderan irigasi tersier Pagubugan. Pada tahun 2008 Carik Sutjipto purna tugas karena usia, jabatan Carik diberikan kepada Agus Sunarko. Namun sejak tahun 2010 berdasarkan aturan semua Carik diangkat menjadi PNS, termasuk Carik Desa Gubugsari yang masih kosong harus diisi dari PNS, Maka Carik/Sekdes diisi oleh Sudarminto kebetulan dari Dukuh Minongo Desa Gubugsari. Yang menjadikan pemerintahan desa lebih tertata dan lebih kondusif.

Berakhirnya masa jabatan Lurah H. Rofi'I, dilakukan Pilkades yang diikuti oleh 2 (dua) kontestan yaitu Munawir (Kebayan) dan Muslikhul Amri dari Minongo. Para calon memaparkan program kerja juga menyampaikan Visi dan Misi nya yang akan dilaksanakan pada saat dia memimpin selama 6 tahun. Pada masa kepemimpinan Kepala Desa Muslikhul Amri dilakukan perampingan Dusun Menjadi 4 Dusun Yaitu Dusun Gersan, Dusun Pagubugan, Dusun Diwek, dan Dusun Minongo. Karena penyampaian Program Kerja, Visi dan Misi oleh calon yang baik dan mengena dihati rakyat, maka terpilihlah Muslikhul Amri menjadi Kepala Desa Gubugsari sejak November 2013-2019.

Berakhirnya masa jabatan Lurah Muslikhul Amri, maka diadakan Pilkades yang diikuti oleh 2 (dua) kontestan yatu Musikhul Amri Dukuh Minongo dan Nur Azizah, SE. Dukuh Minongo. Para calon memaparkan program kerja juga menyampaikan Visi dan Misi nya yang akan dilaksanakan pada saat dia memimpin selama 6 tahun. Penyampaian Program Kerja, isi dan Misi oleh calon yang baik dan mengena dihati rakyat, maka terpilihlah Nur Azizah, SE menjadi Kepala Desa Gubugsari yang merupakan Kepala Desa Perempuan Pertama. Yang dilantik sejak Mei 2020-2026 dengan komitmen pengabdian untuk Desa Gubugsari untuk perubahan yang lebih baik dengan

berlandaskan Agama, Iptek dan Inovasi, yang dibantu oleh Rahmatul Amalia, S.Pd (Carik / Sekdes), Agus Santosa (Kaur Keuangan), Bakti Utami, S.Pd (Kaur Perencanaan Pembangunan), Munawir (Kaur Umum), Trias Rizki, S.Pd. (Kasi Pemerintahan), Jumro (Kasi Kesejahteraan), Achmad Arifin (Kasi Pelayanan), Joko Narimo (Kadus Wilayah Dukuh Gersan), Joko Edy Siswanto (Kadus Dukuh Pagubugan), Abdul Sakur (Kadus Wilayah Dukuh Diwek), Mas'ud (Kadus wilayah Dukuh Minongo). Nama-nama Kepala Desa Gubugsari yang pernah menjabat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Nama-nama Demang/Lurah/Kepala Desa Gubugsari**

| No  | Periode     | Nama Kepala Desa | Keterangan |
|-----|-------------|------------------|------------|
| 1.  | 1925 – 1942 | Ridwan           |            |
| 2.  | 1943 – 1946 | Syim             |            |
| 3.  | 1946 – 1950 | Moentari         |            |
| 4.  | 1951 – 1988 | Suwarno          |            |
| 5.  | 1988 – 1988 | Soetjipto        | PJ         |
| 6.  | 1988 – 1998 | Rofi'i           |            |
| 7.  | 1998 – 1999 | Setjipto         | PJ         |
| 8.  | 1999 – 2007 | Achmad Khudori   |            |
| 9.  | 2007 – 2013 | H. Rofi'i        |            |
| 10. | 2013 – 2019 | Muslikhul Amri   |            |
| 11. | 2019 – 2020 | Abdul Khalim     | PJ         |
| 12. | 2020 – 2026 | Nur Azizah, SE.  |            |

**Sumber: Dokar Kendal**

### C. Profil Nur Azizah

Nama : Nur Azizah, SE  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 20 Januari 1978  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Gubugsari RT 02 RW 05  
 Status perkawinan : Kawin  
 Nama Suami : Agus Tri Suharyono  
 Pendidikan terakhir : S1  
 Riwayat Pekerjaan : 1. BRI Kanca Banjarnegara (2002-2007)

2. BRI Kanca Kendal (2007-2020)
3. Kepala Desa Gubugsari (2020-sekarang)

Riwayat Organisasi : 1. Fatayat  
2. Muslimat

#### **D. Dinamika Pilkades Desa Gubugsari 2020**

Pada tahun 2020 Desa Gubugsari merupakan salah satu Desa Di Kabupaten Kendal yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak se kabupaten Kendal. Pemilihan kepala desa serentak ini diikuti oleh 199 desa dari 266 desa yang ada di Kabupaten Kendal. Sebelumnya pada tahun 2018 kabupaten kendal juga mengadakan pilkades yang diikuti oleh 5 desa, dan di tahun 2016 diikuti oleh 62 desa. Pilkades di Desa Gubugsari dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2020 serentak se kabupaten kendal bila tidak terjadi perpanjangan, dan tanggal 1 April bila terjadi perpanjangan. Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan baik, dan diikuti dengan euforia yang ada di masyarakat. pemilihan kepala Desa yang hanya dilaksanakan enam tahun sekali ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Oleh arena itu pelaksanaannya diikuti oleh dinamika-dinamika yang ada di Desa Gubugsari.

Pelaksanaan Pilkades serentak kabupaten Kendal dilaksanakan mengikuti peraturan tertinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan dibawahnya yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dibawahnya lagi ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dibawahnya lagi ada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal. Dibawahnya lagi ada Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal. Yang terakhir yaitu ada Keputusan bupati kendal Nomor 141/100/2019 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak kabupaten kendal tahun 2020 (Keputusan Bupati Kendal, 2019).

Tahapan dalam pilkades di Desa Gubugsari yaitu tahapan persiapan seperti membentuk panitia pemilihan kepala desa atau yang disebut P2KD yang dibentuk oleh BPD pada tanggal 25 Oktober-7

November 2019. Dalam rapat BPD harus memenuhi unsur Pemdes, LMD (RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM, LKD lainnya), dan unsur tokoh masyarakat. Dalam pembentukannya harus memenuhi prinsip demokratis dengan menjunjung tinggi asas netralitas dan profesionalitas. Jumlah P2KD setiap Desa sebanyak 7 orang, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Di Desa Gubugsari P2KD di ketuai oleh Pak Joko Narimo, dan Legalitas P2KD ditetapkan dengan SK BPD. Adapun juga tugas P2KD yaitu: merencanakan, mengordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pilkades; mengadakan penjaringan dan penyaringan; menetapkan calon kepala desa; menetapkan tatib tata cara pemilihan dan kampanye; menetapkan wilayah pemilihan; melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara; menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara; menetapkan calon terpilih; dan memfasilitasi cetak surat suara dan pembuatan tps.

Tahap selanjutnya yaitu penetapan wilayah pemilihan menjadi TPS yang dilakukan oleh P2KD. TPS harus berjumlah ganjil minimal 3, dan setiap TPS maksimal mempunyai 800 DPT. Wilayah pemilihan dapat dibagi berdasarkan RT, RW, Dusun, Gabungan RT, RW, dan/atau Dusun. Pembagian tersebut didasari keseimbangan jumlah pemilih dan kondisi geografis atau keterjangkauan akses. Di Desa Gubugsari pada saat pemilihan kepala desa kemaren terdapat 5 TPS yang tersebar berdasarkan jumlah dusun yang ada di sana. Setelah selesai penetapan wilayah, selanjutnya yaitu penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Syarat masyarakat memilih yaitu sudah berusia 17 tahun pada tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah menikah, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, dan berdomisili di Desa minimal 6 bulan sebelum disahkan DPS (Daftar Pemilih Sementara). Proses penetapan DPS sendiri yaitu dengan melihat dari data DPT Pemilu terakhir, lalu dimutakhirkan oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang diangkat oleh P2KD dengan mengunjungi rumah-rumah pemilih, selanjutnya divalidasi oleh P2KD dan dituangkan dalam berita acara, dan terakhir yaitu penyusunan dan penetapan DPS berdasarkan berita acara validasi dan diumumkan selama 3 hari.

Pendaftaran calon kepala desa dilakukan oleh P2KD di balai Desa Gubugsari, dilakukan pada tanggal 3 sampai 13 Februari 2020. Yang mendaftar sebagai baka calon kepala Desa Gubugsari sebanyak 2 orang, yaitu Bu Nur Azizah dan Bapak Musliikhul Amri. Yang pertama mendaftar yaitu Bapak Musliikhul Amri, disusul oleh Bu Nur Azizah di hari-hari selanjutnya. Pak Musliikhul Amri adalah kepala desa terpilih pada periode sebelumnya. Pada saat itu Bu Nur Azizah belum berhenti dari pekerjaannya sebagai kepala cabang BRI Kabupaten Kendal. Salah satu alasan Bu Nur Azizah ingin menjadi kepala desa yaitu karena ingin memiliki alasan yang kuat untuk keluar dari pekerjaannya. Bu Azizah pun setelah mendaftar masih terdapat beberapa keraguan. Yang pertama karena profesi sebagai Kepala Desa berbeda jauh dengan profesi sebelumnya. Yang kedua yaitu Bu Azizah bukan penduduk asli Desa Gubugsari. dan yang ketiga yaitu karena Bu Azizah merasa saingannya sangat berat, yaitu pak Amri yang merupakan petahana dan bagian dari dinasti politik yang dibangun ayahnya. Akan tetapi Bu Azizah di yakinkan oleh orang-orang terdekatnya dan tokoh desa yang ingin adanya perubahan kepemimpinan di Desa Gubugsari. dan ditambah dengan denda yang akan ditanggung bu Azizah jika mengundurkan diri setelah penetapan calon, sehingga beliau tetap maju dengan beberapa pertimbangan.



**Gambar 4. Pendaftaran Calon Kepala Desa Gubugsari Masa Jabatan 2020-2026**

**Sumber: Website Resmi Desa Gubugsari Kabupaten Kendal**

Lamaran calon kepala desa bisa diketik atau ditulis tangan dan ditunjukkan kepada ketua P2KD. Adapun syarat menjadi calon kepala desa yaitu satu, berstatus sebagai WNI. Dua, bertakwa kepada tuhan yang maha esa. Tiga, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika. Empat, minima pendidikan terakhir SMP/ sederajat. Lima, Berusia min 25 tahun pada saat mendaftar. Enam, bersedia mencalonkan menjadi kepala desa. Tujuh, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Delapan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Sembilan, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sepuluh, berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari RSUD dr. Soewondo Kendal. Sebelas, tidak pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak tiga kali masa jabatan. Dua belas, berkelakuan baik, jujur, dan adil. Tiga belas, tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai. Empat belas, izin atasan bagi TNI, POLRI, BUMN, dan BUMD. Lima belas, surat izin dari bupati bagi kepala desa dan anggota BPD. Enam belas, surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa. Tujuh belas, izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS. Delapan belas, bebas zat narkotika dan psikotropika, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RSUD dr. Soewondo Kendal. Sembilan belas, bersedia menjadi penduduk desa setempat apabila terpilih sebagai kepala desa. Dua puluh, pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar.



## **Gambar 5. Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa Sekaligus Penetapan dan Pengambilan Nomor Urut Calon Kepala Desa**

**Sumber: Website Resmi Desa Gubugsari Kabupaten Kendal**

Penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa sekaligus penetapan dan pengambilan nomor urut calon Kepala Desa Gubugsari dilakukan di Balai Desa Gubugsari dengan dihadiri oleh panitia, bakal calon, dan masyarakat Desa Gubugsari. Setelah diperiksa kelengkapan berkasnya, Pak Amri dan Bu Azizah dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran calon Kepala Desa. Selanjutnya mereka berdua mengambil nomor urut calon, bu Azizah mendapatkan nomor urut satu, dan Pak Amri mendapatkan nomor urut dua. Dan setelah itu mereka menyampaikan visi misi yang akan mereka lakukan untuk Desa Gubugsari jika mereka terpilih. Di Desa Gubugsari pada saat kampanye tidak ada debat dan lain sebagainya, hanya penyampaian visi misi dan pemasangan alat peraga kampanye seperti banner saja.

Kampanye di desa gubugsari dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat. Melihat masyarakat yang masih memiliki budaya sosial dan bertetangga yang tinggi, dan sering mengadakan acara rutin di masyarakat sebagai tempat untuk bertemu dan bercengkrama. Maka Bu Azizah melakukan kampanye dengan melihat peluang-peluang tersebut, dengan sering mengikuti acara rutin dan kumpul-kumpul masyarakat. Dengan begitu Bu Azizah bisa dengan mudah untuk mengumpulkan masa untuk melakukan kampanye. Bu Azizah pun masuk ke dalam organisasi-organisasi Desa yang sering melakukan perkumpulan seperti Organisasi Fatayat NU, IPNU&IPPNU, organisasi PKK, dan karang taruna. Karena keemot organisasi yang bisa dibidang aktif melakukan kegiatan di Desa. Apalagi ditambah Bu Azizah adalah seorang perempuan yang mendapatkan keuntungan untuk bisa bebas masuk ke pengajian yang dilakukan ibu-ibu. Berbeda dengan lawannya yaitu Pak Amri yang agak sulit untuk masuk ke pengajian perempuan.

Pandemi covid-19 yang pertama kali masuk ke Indonesia yaitu tanggal 2 Maret 2020, membuat heboh masyarakat. Akan tetapi pada awal-awal covid-19 masyarakat masih menyepelekan, karena pada saat itu masih sedikit yang terjangkit. Masyarakat Indonesia hanya memperkirakan bahwasannya covid-19 ini akan cepat beralalu dan tidak berkepanjangan, karena menganggap covid-19 ini tidak terlalu berbahaya. Sehingga pelaksanaan pilkades serentak di Kabupten Kendal tetap dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pilkadespun dengan melakukan pembatasan sosial yang seadanya, karena belum turunnya peraturan dari pemerintah pusat. Sehingga kampanye tetap boleh dilakukan dengan tata muka tetapi melalui pertemuan terbatas.

Dialog antar warga tetap diperlukan oleh Bu Azizah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, dan keresahan-keresahan apa saja yang dimiliki masyarakat. Dan ternyata dalam lingkup Desaupun tetap memerlukan alat peraga kampanye untuk meramaikan suasana pilkades. Pemasangan alat peraga ini ditentukan oleh P2KD. Yang menarik pada Pilkades di Desa Gubugsari kemarin adalah ada sedikit cekcok antar jago calon terkait pemasangan alat peraga berupa banner calon. Ada salah satu banner yang dicopot pemasangannya oleh jago lawan, sehingga jago yang banner calonnya dicopot merasa

tidak terima. Sehingga terjadilah sedikit percekocokan mulut antar jago, meskipun tidak terlalu lama. Biasanya itu orang yang iseng saja mencopot banner seperti itu.

Masa tenang pilkades adalah satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dan saat itu seluruh kegiatan kampanye harus dihentikan. Calon kepala desa tidak boleh lagi melakukan sosialisasi, pengumpulan masa, dan lain sebagainya. Alat peraga kampanye harus sudah dicabut, agar desa menjadi steril dari kegiatan kampanye. Masa tenang ini seharusnya dilakukan sampai hari pemungutan suara selesai. Akan tetapi di Desa Gubugsari masih banyak budaya serangan fajar yang beredar. Setiap jago dari masing-masing calon berlomba-lomba mendapatkan masa melalui pemberian serangan fajar. Serangan fajar di desa dinilai masih sangat efektif dibanding serangkaian kegiatan kampanye lainnya yang telah dilakukan calon. Meskipun ini sebenarnya melanggar peraturan, akan tetapi budaya seperti ini masih dilestarikan hingga saat ini.

Masuk pada tahap pemungutan suara, sebelum hari pemungutan suara pemilih diberikan undangan pemilih. Undangan pemilih diberikan paling lambat H-3 pemungutan suara yang didistribusikan oleh KPPS bisa dibantu oleh ketua RT/RW dengan mendatangi tempat tinggal pemilih langsung. Isi dari undangan tersebut adalah nama pemilih, tanggal pemungutan suara, jam pemungutan suara, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara. Undangan ini wajib dibawa oleh pemilih pada saat akan memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, yang diberikan kepada KPPS tiap TPS. Jika tidak membawa undangan ini, maka pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Pada saat hari pemungutan suara, pemilih memberikan undangan pemilihan kepada anitia untuk ditukarkan dengan surat suara. Pemilih wajib membuka surat suara dihadapan KPPS, untuk meminimalisir bila ada suara rusak atau sudah tercoblos wajib diganti. Seperti pemungutan suara pada umumnya yang dilakukan di bilik suara dengan alat berupa paku yang telah disediakan. Lalu lipat surat suara dan masukan ke kotak suara, setelah itu celupkan jari ada tinta pertanda sudah memilih. Dan dilarang melakukan dokumentasi pada saat berada dalam bilik suara. Jika ada pemilih disabilitas yang bisa datang ke TPS akan dibantu oleh KPPS atau orang lain sebagai pendamping atas permintaan pemilih tersebut. Jika tidak bisa datang ke TPS maka bisa melalui pihak lain yang ditunjuk oleh pemilih untuk menyampaikan permintaan untuk memberikan suara di luar TPS dalam wilayah desa yang bersangkutan. Pemilih disabilitaspun harus melakukan permohonan untuk didampingi, boleh didampingi jika ada persetujuan dari ketua KPPS, dan pendamping wajib merahasiakan pilihan yang didampingi.

Penghitungan suara dilakukan setelah selesainya pemungutan suara, dilakukan ditempat yang sama dengan pemungutan suara oleh KPPS. Perhitungan suara dapat disaksikan oleh saksi calon, pengawas dari Kecamatan, BPD, dan masyarakat. Setelah selesai panitia KPPS tiap TPS membuat berita acara sebagai laporannya. Hasil suara dimenangkan oleh Nur Azizah dengan jumlah 1854 dan lawannya yaitu Muslikul Amri dengan jumlah suara 879. Untungnya di Desa Gubugsari kedua calon saling menema hasil yang diperoleh tanpa adanya perselisihan. Karena memang selisih hasil yang didapatpun terpaut sangat jauh.

Setelah selesai perhitungan suara, dihari yang sama ketua KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara kepada ketua P2KD. Besoknya pada tanggal 19 Maret 2020, dilakukan pleno oleh P2KD dengan melakukan rekapitulasi penghitungan hasil dari masing-masing TPS. Dihari selanjutnya

lagi pada tanggal 20 Maret 2020 P2KD menyerahkan hasil penghitungan suara kepada BPD. Pada tanggal 23 Maret 2020 BPD melaporkan hasil Pilkades kepada Bupati. Bu Nur Azizah sebagai Kepala Desa terpilih dan sejumlah kepala Desa terpilih lainnya di Kabupaten Kendal dilantik di pendopo Kabupaten Kendal pada tanggal 26 Mei 2020 Oleh Bupati Kendal, Ibu dr. Mirna Anissa, M.Si. Sedangkan sertijab antara Kepala Desa Gubugsari terpilih yaitu Ibu Nur Azizah dengan PJ Kepala Desa Gubugsari yaitu Bapak Abdul Khalim dilakukan di balai Desa Gubugsari.



**Gambar 6. Sertijab Kepala Desa Gubugsari Masa Jabatan 2020-2026**

**Sumber: Website Resmi Desa Gubugsari Kabupaten Kendal**

## BAB IV

### STRATEGI MEMBANGUN TIM SUKSES

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan data dan hasil temuan dilapangan mengenai tim sukses sebagai mesin politik Nur Azizah dalam Pilkades Desa Gubugsari tahun 2020. Data diperoleh secara langsung melalui narasumber utama dan narasumber pendukung pada lokasi penelitian. Nur Azizah yang berstatus bukan sebagai penduduk asli ditambah melawan petahana yang merupakan penduduk asli Desa Gubugsari, memberikan tantangan tersendiri dalam membentuk tim sukses sebagai alat untuk memobilisasi pemilih pada pemilihan Kepala Desa Gubugsari Tahun 2020. Fokus pembahasan pada bab ini mengenai proses Nur Azizah dalam membangun tim sukses, alur kerja tim sukses Nur Azizah dan relasi Nur Azizah dengan tim suksesnya sehingga bisa memenangkan pilkades di Desa Gubugsari tahun 2020.

#### A. Gambaran Umum Bentuk Tim Sukses (Tim Ad Hoc)

Tim sukses merupakan organisasi-organisasi yang menyerupai sebuah piramida pekerjaan broker yang digunakan oleh para calon yang ingin berkompetisi dalam pemilihan. Ada banyak istilah yang digunakan, namun lebih terkenal dengan istilah tim sukses (Aspinall & Berenschot, 2019, p. 137). Tim sukses dibentuk sebagai perantara untuk menghubungkan calon melalui rantai para broker perantara kepada para pemilih. Karena biasanya tim sukses ini membentuk sebuah struktur yang besar dan melibatkan banyak broker yang saling terhubung (Aspinall & Berenschot, 2019, p. 137). Adanya tim sukses memudahkan calon untuk terjun langsung di masyarakat. Tim sukses dibuat jauh-jauh hari sebelum pemilihan, agar tim sukses memiliki waktu untuk melakukan pendekatan di masyarakat.

“Saya membentuk tim sukses untuk membantu saya melakukan kampanye agar dikenal dimasyarakat, hingga akhirnya bisa memenangkan pemilihan Kepala Desa.” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 23 Januari 2024).

Tim sukses yang dibentuk Nur Azizah secara dadakan untuk keperluan pemilihan pada saat itu saja dan bersifat sementara sampai pemilihan berakhir. Orang-orang yang tergabung dalam tim sukses ditentukan oleh calon biasanya dengan pertimbangan mereka mempunyai visi dan misi yang sama dengan calon. Karena jika mereka tidak mempunyai tujuan yang sama dengan calon, maka kemungkinan mereka membelot dan tidak terbentuk tim yang kuat akan sangat besar. Mereka yang tergabung dalam tim sukses memberikan banyak manfaat untuk membantu calon agar lebih dikenal di masyarakat dan membantu menyebarkan patronase kepada masyarakat. Hal tersebut sangat membantu Nur Azizah karena Nur Azizah tidak terkenal di Desa Gubugsari lantaran bukan asli warga Gubugsari. Kesehariannya sebagai pekerja kantoran pun membuat Nur Azizah tidak punya waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Biasanya tim sukses mengadakan pertemuan di rumah pemenangan calon yang dijadikan sebagai markas.

Tim sukses memiliki peranan yang besar karena sebagai jembatan untuk menghubungkan antara calon dengan pemilih. Karena jumlah pemilih yang banyak, sedangkan calon hanya satu orang. Jika dikerjakan sendiri calon akan kelelahan atau mungkin tidak dapat tergapai semua, meskipun dalam

lingkup wilayah Desa. Tim sukses juga berfungsi untuk memobilisasi masyarakat dengan menyebar ke beberapa wilayah dan kelompok yang ada dimasyarakat. Tim sukses yang tersebar di beberapa wilayah, memudahkan calon untuk mengetahui kekuatan kemenangan mereka dan lawan mereka. Dilihat dari lingkup wilayah kecil yang diawasi, sehingga mereka saling berkoordinasi antara tim sukses yang satu dengan tim sukses yang lainnya. Tim sukses akar rumput atau yang bertemu dan berinteraksi langsung dengan masyarakat sangat berpengaruh besar sekali dalam hal ini. Tapi jika dalam lingkup Desa hampir semua tim sukses berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, karena lingkup wilayahnya yang kecil.

“Tugas utama kami adalah mengenalkan Nur Azizah kepada masyarakat Desa Gubugsari, agar dikenal oleh masyarakat. Kami juga bertugas untuk mobilisasi mereka agar memilih Nur Azizah pada ajang pemilihan Kepala Desa. Nantinya kami sebagai tim mendata secara garis besar mana saja yang kira-kira yang akan memilih Nur Azizah. Setelah memiliki datanya baru dapat disalurkan uang ganti kerja yang diberikan Nur Azizah kepada masyarakat.” (Wawancara Arya (bukan nama sebenarnya), tim sukses, 25 Januari 2024).

Tim sukses juga berfungsi untuk menyebarkan patronase dari calon kepada masyarakat, agar lebih memudahkan calon. Organisasi tersebut harus memiliki struktur yang jelas, sehingga lebih mudah terkontrol. Di Indonesia sendiri tim sukses tidak berfungsi sebagai penyedia materi, tapi mereka hanya sebagai penerima materi dan menyebarkan materi. Dana untuk patronase yang nantinya disebarkan itu berasal dari uang calon sendiri dan dari pihak swasta yang mengharapkan keuntungan timbal balik jika calon tersebut menang. Jarang sekali dana kampanye didapatkan dari partai politik, jika adapun juga jumlahnya tidak seberapa.

Calon kepala desa tidak boleh berasal dari pengurus partai, karena pemilihan kepala desa tidak menggunakan basis partai politik sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di Indonesia dalam pemilihan Kepala Desa tidak menggunakan basis partai politik, sehingga tidak diperlukannya surat rekomendasi dari partai untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Tidak ada sekolah politik yang diperuntukan untuk calon-calon kepala desa yang ingin maju, sehingga calon kepala desa bisa berasal dari mana saja asalakan dia mampu, bersedia, dan memenuhi syarat menjadi kepala desa.

Mesin politik ad hoc atau tim sukses paling sering di gunakan di Indonesia dibandingkan dengan mesin partai dan mesin lokal. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah panjang pada era Soeharto yang melakukan segala cara untuk melumpuhkan partai politik, meskipun setelah itu partai-partai masih relatif tangguh. Akan tetapi tetap saja beberapa faktor bersekongkol untuk tetep melemahkan partai dan memotivasi calon untuk membangun sendiri jaringan perantara ad hoc. Alasan tersebut karena calon merasa partai tidak terlalu bisa diandalkan dalam memobilisasi pemilih (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 85).

Ada perbedaan antara mesin lokal Filipina dengan mesin ad hoc Indonesia dari segi kampanye yang dilakukan. Mesin ad hoc di Indonesia hanya membentuk tim sukses untuk mendukung satu pasangan calon atau satu calon saja saja meskipun calon tersebut berasal dari satu partai yang menurunkan lebih dari satu calon. Berbeda hal nya dengan mesin lokal Filipina, mereka melakukan kampanye atas nama seluruh kandidat yang mencakup calon Gubernur, Walikota/Bupati, anggota dewan, dan calon pejabat nasional. Biasanya mesin-mesin ini beroperasi dibawah kepemimpinan satu atau lebih calon pemimpin

daerah. Mesin lokal juga lebih bertahan lama dibandingkan mesin ad hoc di Indonesia yang bersifat fana dan sementara (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 94).

Adapun juga kelebihan mesin politik ad hoc sendiri yaitu tim sukses hanya berfokus kepada satu calon, sehingga fokusnya tidak terbagi. Dalam pelaksanaan kampanye nya pun lebih terstruktur dan terorganisir. Sedangkan kelemahannya sendiri yaitu dalam prakteknya, perihal kesetiaan antara calon dan anggota tim sukses mereka. Lingkungan politik di Indonesia termasuk dalam lingkup patronase, sehingga sangat kental sekali dengan calon yang menawarkan materi kepada pemilih dan pekerja kampanye. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan dengan cara membelot untuk menjual informasi kepada lawan. Hal tersebut bisa terjadi karena lemahnya hubungan calon dengan tim suksesnya. Menjadi ketakutan ketika calon sudah memberikan patronase tapi penerima tidak memilih calon tersebut (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 85).

“Di Desa Gubugsari ada sebutan sendiri untuk tim sukses yaitu jago, di Kendal kebanyakan nyebutnya jago. Berbeda dengan di Pemalang, jago itu adalah sebutan untuk kandidat kepala Desanya, sedangkan untuk tim suksesnya disebut dengan pecut. Sebutan itu biasanya beda-beda tiap daerah.” (Wawancara Arya (bukan nama sebenarnya), tim sukses, 25 Januari 2024).

Dibeberapa daerah di Indonesia tim sukses memiliki sebutan tersendiri yang beraneka ragam. Salah satu contohnya seperti di Kabupaten Demak yang memiliki sebutan gapet untuk tim suksesnya dan kandidat kepala desanya disebut gacok. Berbeda halnya di Kabupaten Pemalang yang menyebut tim sukses kandidat sebagai pecut dan kandidat kepala desanya sendiri disebut jago. Sedangkan di Kabupaten Kendal berbeda sedikit dengan di Kabupaten Pemalang, untuk tim suksesnya disebut dengan jago sedangkan kandidat kepala desanya disebut dengan calon. Dan masih banyak lagi sebutan untuk tim sukses di berbagai daerah lainnya.

Jago adalah sebutan untuk tim sukses atau mesin politik di Kabupaten Kendal dalam sebuah dinamika politik di Desa dengan tujuan untuk memenangkan calon dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa. Adanya jago ini sangat penting untuk memobilisasi suara masyarakat. Apalagi ditambah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ini tidak menggunakan partai politik seperti halnya pemilihan Presiden, pemilihan Legislatif, dan pemilihan Kepala Daerah. Sehingga kekuatan satu-satunya yang bisa diandalkan dalam pemilihan Kepala Desa ini adalah jago atau tim sukses saja.

## **B. Proses Membangun Tim Sukses**

Dalam mengikuti kompetisi sebuah pemilihan Kepala Desa, dalam kampanyenya tidak bisa dilakukan sendirian, harus dibantu oleh tim sukses. Tim sukses sangat penting untuk membantu Nur Azizah dalam mendapatkan informasi mengenai warga Desa Gubugsari, sehingga bisa mengambil keputusan mengenai strategi apa yang nantinya akan dipakai oleh Nur Azizah. Tim sukses juga bertugas untuk memobilisasi pemilih untuk memilih Nur Azizah, tanpa tim sukses akan sulit bagi Nur Azizah untuk memenangkan Pilkades. Tim sukses yang terbangun dengan kokoh akan berguna untuk menunjang citra Nur Azizah di masyarakat. Dalam menciptakan tim sukses yang kokoh dilihat dari proses-proses Nur Azizah membangun tim suksesnya. Karena

kedua belah pihak yaitu Nur Azizah dan tim suksesnya mengharapkan sebuah keuntungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pembentukan tim sukses ini membutuhkan waktu selama kurang lebih dua bulan sebelum Nur Azizah mencalonkan diri secara resmi sebagai Kepala Desa Gubugsari. karena memang terlihat mudah, tapi sebenarnya cukup sulit untuk memilih orang-orang yang bisa dipercaya. Apalagi pada saat itu Nur Azizah masih aktif bekerja, sehingga sulit untuk menilai orang. Sehingga seringkali Nur Azizah mempercayakan tugas itu kepada tim sukses intinya. Tidak banyak perkumpulan tim sukses secara resmi dengan Nur Azizah hanya sebanyak dua kali, satu kali hanya bersama tim inti dan dua kali dengan seluruh tim sukses. hal itu terjadi lantaran kesibukan Nur Azizah yang masih bekerja. Dalam proses membangun tim suksesnya Nur Azizah tidak menggunakan sistem perekrutan umum, tapi menggunakan sistem yang sifatnya penunjukan. Ada tiga cara yang diadopsi oleh Nur Azizah dalam proses membangun tim suksesnya, yaitu sebagai berikut:

### **1. Pengajuan Tim Inti dari Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama**

Cara pertama yang dilakukan Nur Azizah untuk membangun tim suksesnya adalah membentuk sebuah tim inti yang nantinya sebagai tiang utama dalam menyangga tim suksesnya. Tim inti ini berasal dari orang-orang yang sebelumnya telah diajukan oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama yang menyarankan Nur Azizah untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Pemilihan orang-orang tersebut dengan pertimbangan bahwa orang-orang ini akan bisa membantu Nur Azizah untuk membuat strategi yang baik dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa Gubugsari. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang asli masyarakat Desa Gubugsari yang suaranya didengar oleh masyarakat. Hal ini sangat menguntungkan Nur Azizah karena bisa sebagai penghubung antara Nur Azizah dengan masyarakat.

“Saya mencalonkan diri itu awalnya karena diminta oleh para tokoh masyarakat dan pemuka agama karena dianggap mampu dari segi finansial dan kepemimpinan. Selain itu juga saya dianggap mampu untuk melawan dinasti politik Kepala Desa Gubugsari yang dikuasi oleh satu keluarga saja. Saya juga ingin mengabdikan untuk Desa Gubugsari meskipun saya bukan warga asli. Di sisi lain juga saya ingin berhenti bekerja dari pekerjaan lama saya dan ingin lebih banyak waktu dengan keluarga. Oleh karena itu saya harus memiliki alasan yang kuat untuk keluar, dan masih tetap memiliki penghasilan.” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 23 Januari 2024).

“Kepala Desa sebelumnya itu turun temurun, awalnya dari bapaknya sampai ke anaknya. Sebetulnya kepemimpinannya bagus-bagus saja, tapi kami ingin ada wajah baru di Desa Gubugsari. Kami juga ingin memiliki pemimpin yang adil di masyarakat juga. Waktu itu juga ada beberapa orang yang katanya mau nyalonin, tapi pas tau Bu Azizah nyalon mereka gak jadi nyalonin” (Wawancara Wira (bukan nama sebenarnya), masyarakat, 20 Januari 2024).

Pada awalnya Nur Azizah tidak terpikir untuk menjadi kepala Desa, karena kesehariannya hanya bekerja dan menghabiskan waktu dengan keluarga saja. Kemudian ada tokoh masyarakat dan pemuka agama yang meminta Nur Azizah untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Gubugsari. Alasan mereka memilih Nur Azizah lantaran mereka yakin kalau Nur Azizah memiliki modal dari segi finansial dan kepemimpinan yang mumpuni untuk memimpin masyarakat Desa Gubugsari. Selain itu, mereka yakin dengan modal yang dimiliki Nur Azizah mampu untuk mengalahkan Kepala Desa sebelumnya yang digadang-gadang akan mencalonkan kembali. Yang kurang disukai masyarakat dari Kepala Desa Sebelumnya yaitu karena berasal dari dinasti politik keluarga. Masyarakat ingin adanya wajah baru yang menjadi sosok pemimpin mereka, apalagi kecil kemungkinan Nur Azizah untuk membangun dinasti politik karena Nur Azizah tidak mempunyai keluarga yang tinggal di Desa Gubugsari. Sebelumnya ada beberapa nama yang diisukan akan mencalonkan diri untuk melawan petahana, akan tetapi mereka mundur dan merapatkan barisan setelah tahu Nur Azizah akan mencalonkan diri.

Beberapa tokoh masyarakat dan pemuka agama di Desa Gubugsari dengan giat meminta Nur Azizah untuk mencalonkan diri agar mau melawan petahana. Tokoh-tokoh tersebut juga menawarkan diri untuk membantu Nur Azizah agar terpilih menjadi Kepala Desa. Dengan melalui pertimbangan yang panjang akhirnya Nur Azizah mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Gubugsari. Oleh karena itu pada awal-awal proses pembentukan tim sukses Nur Azizah merekrut tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di Desa Gubugsari. Terutama tokoh yang meminta Nur Azizah untuk mencalonkan, dijadikan tim sukses inti untuk memenangkan kontestasi Pilkades. Selain itu juga mereka menarik beberapa orang untuk diajukan menjadi tim sukses inti kepada Nur Azizah. Tentunya dengan melalui beberapa pertimbangan yang menguntungkan Nur Azizah seperti mereka adalah tokoh yang berpengaruh di Desa, pintar membangun strategi, mempunyai jabatan yang strategis, dan disegani di masyarakat.

Tim inti tersebut berisikan lima orang, satu tokoh agama, satu PJ Kepala Desa, dua perangkat Desa, satu mantan kepala Desa sebelum-sebelumnya. Tim inti ini dijadikan sebagai tonggak awal tim sukses yang dibangun Nur Azizah. Tokoh agama sangat berpengaruh untuk menyusupkan kampanye untuk memilih Nur Azizah melalui acara-acara keagamaan yang ada di Desa. Apalagi dengan adanya dukungan dari tokoh agama ini, sehingga kyai-kyai hampir semuanya mendukung Nur Azizah. Sehingga masyarakat mulai mau menerima sosok pemimpin perempuan untuk memimpin mereka, karena tokoh agamanya pun mendukung hal tersebut. PJ Kepala Desa hadir untuk memperkuat barisan tim sukses Nur Azizah dari segi pemerintahannya. Ada juga dua perangkat Desa lainnya yang bisa diandalkan untuk memobilisasi masa. Selain itu juga ada mantan kepala Desa sebelum-sebelumnya, yang tentunya sudah mempunyai basis-basis suara dan berpengalaman untuk memenangkan Pilkades Desa Gubugsari.

## **2. Memaksimalkan Fungsi Keluarga**

Keluarga memiliki peran tersendiri dalam membantu Nur Azizah memenangkan Pemilihan kepala Desa. Keluarga adalah orang yang paling bisa dipercaya oleh Nur Azizah. Nur Azizah memiliki enam orang saudara di keluarganya, semua saudaranya sudah menikah. Sehingga Nur Azizah memanfaatkan keluarganya tersebut untuk menjadi tim suksesnya, meskipun saudara Nur Azizah tidak tinggal di Desa Gubugsari tapi mereka tetap mau membantu. Nur Azizah memanfaatkan enam saudaranya beserta pasangannya, serta lima keponakan untuk memegang

dana patronase masing-masing RT. Agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan patronase tersebut. Yang Nur Azizah takutkan jika terjadi ketidaksesuaian antara uang yang dikeluarkan dengan penerima yang mendapatkan amplop atau jumlah uang diamplop yang berkurang.

“Untuk membagikan uang ganti kerja, saya dibantu sama keluarga untuk mengelola dana tersebut, agar lebih memudahkan saya, soalnya saya juga masih harus bekerja” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 11 Juni 2024).

Dalam mengelola uang patronase Nur Azizah mengandalkan keluarga inti Nur Azizah yang bukan berasal dari Desa Gubugsari untuk ikut membantu dalam tim suksesnya untuk memenangkan Nur Azizah. Penunjukan keluarga sebagai pemegelola patronase ini didasari oleh ketakutan Nur Azizah jika uang patronase tidak sampai kepada penerimanya. Biasanya hal tersebut yang sering dilakukan oleh oknum-oknum tim sukses kebanyakan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut maka Nur Azizah meminta keluarganya. Apalagi Nur Azizah saat melakukan kampanye masih aktif bekerja di BRI, sehingga waktu yang dimiliki Nur Azizah sedikit untuk terus-terusan mengawasi banyak hal. Keseluruhan keluarga yang membantu Nur Azizah yaitu sebanyak tujuh belas orang, dimana masing-masing orang memegang satu RT di Desa Gubugsari.

Seperti contoh kasus yang ditemukan Ulfah (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Calon Independen dalam Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2011”. Dalam penelitian ini diketahui bahwasannya salah satu faktor dari kalahnya calon independen dalam Pilkada Pati Tahun 2011 adalah karena tim sukses yang lemah dalam pengorganisasiannya, dan juga karena politik uang yang tidak sampai kepada pemilih (Fitriyah, 2015). Dengan adanya contoh kejadian seperti itu yang membuat Nur Azizah menggunakan keluarganya untuk membantu Nur Azizah agar uang ganti kerja tersebut sampai kepada masyarakat. Nur Azizah tidak mau jika sampai uang ganti kerja yang sudah disiapkan oleh Nur Azizah salah sasaran, sehingga bisa menyebabkan kekalahan Nur Azizah. Sehubungan dengan terbatasnya waktu yang dimiliki Nur Azizah dan dana yang dikeluarkan harus digunakan semaksimal mungkin, sehingga strategi yang diambil Nur Azizah adalah dengan memaksimalkan fungsi keluarga ini. Nur Azizah sangat percaya dengan keluarganya ini, hanya ada kemungkinan kecil keluarganya untuk berkhianat, karena mereka juga tidak punya kepentingan di Desa Gubugsari.

### **3. Pembentukan Partisipan Oleh Tim Inti**

Cara terakhir yang dilakukan Nur Azizah untuk membangun tim suksesnya yaitu dengan membentuk tim partisipan oleh tim inti. Partisipan ini di pilih oleh tim inti Nur Azizah yang sudah memegang satu Dusun untuk satu orang tim inti. Tim inti memilih orang-orang yang berminat masuk ke dalam tim sukses Nur Azizah dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan Nur Azizah. Mereka sebagai penghubung antara Nur Azizah dengan masyarakat. Penunjukan partisipan oleh tim inti ini dilatar belakangi Nur Azizah yang tidak terlalu mengetahui banyak mengenai masyarakat Desa Gubugsari. Sehingga Nur Azizah menyerahkan tugas ini kepada tim inti yang

lebih mengetahui orang-orang yang cocok berada di tim sukses Nur Azizah. Nantinya dalam bekerjapun partisipan ini membantu tugas tim sukses inti yang menjadi penanggung jawab di Dusunnya masing-masing. Di setiap RT nya partisipan tim sukses Nur Azizah diambil 4 orang saja.

“Saat akan mencalonkan diri saya sadar kalau saya bukan masyarakat asli Desa Gubugsari dan kurang dikenal di masyarakat, karena saya memang jarang bersosialisasi lantaran harus pergi bekerja. Oleh karena itu saya melakukan pendekatan-pendekatan tipis terlebih dahulu untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Pendekatan ini juga penting agar banyak orang yang merapat untuk menjadi tim sukses” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 23 Januari 2024).

Nur Azizah sebagai wanita karir memiliki kelemahan yaitu kurang berinteraksi dengan masyarakat Desa Gubugsari karena kesibukannya yang berangkat pagi pulang sore atau malam. Oleh karena itu Nur Azizah perlu untuk membangun tim sukses yang bisa mendekatkan dirinya dengan masyarakat. Langkah awal yang dilakukan Nur Azizah dalam membangun tim suksesnya yaitu dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat Desa Gubugsari. Seperti menyempatkan diri berbaur dengan tetangga di saat memiliki waktu senggang, melakukan jalan pagi sampai mengobrol dengan masyarakat, mengikuti pengajian rutin jika diadakan di malam hari atau Nur Azizah libur dan tidak kemana mana, dan masih banyak lagi. Pentingnya memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat agar adanya ikatan emosional antara Nur Azizah dengan masyarakat. Pendekatan-pendekatan tersebut juga berfungsi agar orang-orang yakin untuk menjadi tim sukses Nur Azizah, sehingga mereka bisa lebih mendekatkan Nur Azizah dengan masyarakat. Selain itu untuk membangun kedekatan dan lebih dikenal di seluruh masyarakat Nur Azizah melakukan kampanye door to door. Mendatangi langsung rumah warga dan meminta doa restu kepada mereka untuk menjadi kepala Desa Gubugsari. Meskipun bukan sebagai masyarakat asli tetapi Nur Azizah benar-benar bersedia untuk membangun Desa Gubugsari. Dan tugas Nur Azizah juga untuk meyakinkan masyarakat kalau perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin.

“Dengan melakukan pendekatan-pendekatan di masyarakat, maka akan terlihat mana yang tertarik untuk masuk kedalam tim sukses saya. Selain itu juga perekrutan tim sukses di bantu oleh tokoh masyarakat yang ada diawal tadi” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 23 Januari 2024).

Setelah melakukan pendekatan yang baik di masyarakat, maka muncul lah nama-nama yang ingin bergabung dengan tim sukses Nur Azizah. Setelah adanya kedekatan emosional yang terjalin, maka dengan sukarela masyarakatpun akan bergabung menjadi tim sukses yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan Nur Azizah. Adapun nantinya mereka memiliki tugas masing masing dalam memenangkan Nur Azizah berdasarkan wilayah mereka. Karena relasi diawal tadilah sehingga masyarakat sudah memiliki kecenderungan untuk mendukung siapa. Tokoh masyarakat yang juga sebagai tim sukses inti Nur Azizah, memiliki tugas diawal yaitu untuk merekrut orang-orang terbaik untuk menjadi tim sukses partisipan dibawah mereka. Karena mereka lebih mengenal orang-orang di Desa Gubugsari dibandingkan dengan Nur Azizah yang jarang bersosialisasi di

masyarakat diakibatkan kesibukannya. Berkat relasi para tokoh-tokoh penting yang ada di tim sukses Nur Azizah dalam merekrut orang-orang yang dianggap mampu dan bisa memberikan nilai plus Nur Azizah di mata masyarakat. Mereka juga memberikan masukan kepada Nur Azizah dalam menilai orang-orang yang akan bergabung dengan tim suksesnya. Sehingga nantinya bisa menyeleksi mana yang cocok menjadi tim sukses dan mana yang tidak. Setelah ada daftar namanya, tinggal menunggu persetujuan dari Nur Azizah.

“Kami memilih orang untuk bergabung kedalam tim sukses kami dengan kriteria aktif di Desa, dikenal banyak orang, bisa mempengaruhi masyarakat, memiliki banyak saudara, dan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di Desa” (Wawancara Arya (bukan nama sebenarnya), tim sukses, 25 Januari 2024).

Dalam merekrut tim suksesnya, Nur Azizah memiliki beberapa kriteria-kriteria. Pertama yaitu orang-orang yang aktif di Desa, sangat menguntungkan jika menjadi tim sukses. Kedua, yaitu dikenal banyak orang terutama di Desa Gubugsari. Ketiga, bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilih Nur Azizah dalam Pemilihan Kepala Desa Gubugsari. Keempat, memiliki banyak keluarga dan sanak saudara. Jika sudah ada satu perwakilan satu orang yang berasal dari satu keluarga besar, maka akan dengan mudah untuk menarik anggota keluarga lainnya melalui orang tersebut. Apalagi jika dia adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk percaya pada apa yang dia katakan. Oleh karenanya, orang yang seperti itu sangat bermanfaat jika berada dalam tim sukses. Kelima, yaitu tokoh berpengaruh di Desa, baik itu tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Mereka juga adalah jenis orang-orang yang didengarkan suaranya oleh masyarakat. Apalagi masyarakat Desa Gubugsari yang masih sangat menjunjung tinggi agama dan tokohnya, akan menuruti omongan atau perintah dari tokoh agama yang disegani. Karena menganggap pilihan Pak kyai adalah pilihan terbaik untuk kesejahteraan umat atau masyarakat Desa Gubugsari. Sedangkan tokoh masyarakat adalah orang yang bisa leluasa juga dalam mempengaruhi masyarakat.

### **C. Alur Kerja Tim Sukses**

Dalam menjalankan tugasnya, tim sukses memiliki alur agar tidak keluar dari zona dan mencapai target yang diinginkan, yaitu memenangkan Nur Azizah sebagai Kepala Desa Gubugsari. Sebelum terjun kelapangan anggota tim sukses pastinya sudah melakukan koordinasi dengan Nur Azizah dan anggota tim sukses yang lainnya, agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Melalui rapat bersama dengan seluruh elemen tim sukses Nur Azizah, disana disamakan tujuan dan pandangannya mengenai kemenangan Pilkades tersebut. Dalam membangun citra yang baik untuk Nur Azizah, tim sukses harus mengetahui informasi-informasi dasar mengenai Nur Azizah, untuk menunjang kampanye di lapangan. Sehingga melalui tim sukses ini masyarakat jadi tahu seperti apa sosok Nur Azizah yang ingin ditonjolkan. Tim suksespun harus sudah mengetahui apa saja tugas-tugas mereka untuk membantu memenangkan Nur Azizah.

“Satu bulan saya habiskan untuk meyakinkan diri, saya melakukan pendekatan-pendekatan dulu kepada masyarakat untuk melihat peluang kemenangan saya di masyarakat. Setelah itu bulan ke

dua dan tiga saya membentuk tim sukses, meskipun masih ada sedikit ragu, setelah itu saya mendaftarkan secara resmi sebagai calon kepala Desa Gubugsari, bulan ketiga selama satu bulan melakukan *door to door* kepada masyarakat sambil ada yang melakukan survei, setelah itu sisa setengah bulan saya melakukan *open house* dan ada juga pengajian selama sebelas hari berturut-turut dimulai dari H-11 pemilihan hingga H-1 pemilihan, agar diberikan kelancaran” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 11 Juni 2024).

Waktu yang dihabiskan oleh Nur Azizah untuk mempersiapkan diri memenangkan pilkades adalah selama empat setengah bulan. Waktu untuk persiapan yang dimiliki Nur Azizah terhitung cepat dibandingkan calon lain yang biasanya membutuhkan waktu minimal satu tahun bahkan lebih untuk mempromosikan diri mereka di masyarakat. Oleh karena itu, waktu yang singkat ini harus digunakan semaksimal mungkin oleh tim sukses Nur Azizah untuk membuat strategi dalam memenangkan Nur Azizah. Apalagi lawannya adalah petahana yang pastinya sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Sejak awal memang Nur Azizah tidak berniat menjadi Kepala Desa, sehingga persiapannya terkesan mendadak.

“Tim sukses yang di bentuk oleh Bu Azizah ada 3 tingkatan, yang pertama tim inti lima orang untuk membahas strategi dan pengkonsep. Kedua tim keluarga berjumlah tujuh belas orang yang dibagi kedalam tujuh belas RT di Desa, masing-masing memegang satu RT sebagai koordinator. Terakhir tim partisipan, satu rt nya ada empat orang untuk memperoleh informasi dan memeriahkan suasana. Dalam tim sukses Bu Azizah tidak ada yang menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Keputusan tertinggi ada di Bu Azizah” (Wawancara Arya (bukan nama sebenarnya), tim sukses, 25 Januari 2024).

Jumlah keseluruhan tim sukses Nur Azizah adalah sekitar sembilan puluh orang. Tim sukses Nur Azizah terdiri dari lima orang tim inti, tujuh belas orang tim keluarga yang terbagi ke setiap RT, dan empat orang perwakilan dari setiap RT di wilayah Desa Gubugsari. Lima orang tim inti terdiri dari Arya (bukan nama sebenarnya) adalah orang yang sedang menjabat sebagai perangkat Desa dan koordinator tim sukses untuk Dusun Gersan, Meli (bukan nama sebenarnya) sebagai perangkat Desa dan koordinator tim sukses Dusun Pagubugan Selatan, Kasim (bukan nama sebenarnya) yang saat itu menjabat sebagai pj kepala Desa Gubugsari dan koordinator tim sukses Dusun Pagubugan Utara, Muslim (bukan nama sebenarnya) sebagai Kyai atau tokoh agama yang disegani di Desa Gubugsari dan sebagai koordinator tim sukses Dusun Minongo, dan yang terakhir yaitu Memet (bukan nama sebenarnya) sebagai mantan kepala Desa Gubugsari sebelum-sebelumnya dan sebagai koordinator tim sukses Dusun Diwek. Lima orang tersebut adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang disegani di Desa Gubugsari, memiliki citra yang baik di masyarakat, aktif bermasyarakat, dan suaranya di dengar oleh masyarakat Desa Gubugsari.

Tugas tim inti yaitu sebagai garda terdepan tim sukses Nur Azizah, terutama dalam pembuatan konsep pemenangan. Dimulai dari pembuatan visi misi yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Gubugsari hingga strategi yang memungkinkan untuk digunakan Nur Azizah dalam upaya mengambil hati masyarakat untuk memilih Nur Azizah. Lima orang ini adalah orang yang paling dipercaya Nur Azizah untuk bisa memenangkan Nur Azizah, karena mereka lebih mengerti tentang seluk beluk masyarakat Desa Gubugsari. Apalagi mereka juga merupakan tokoh-tokoh penting yang

ada di Desa Gubugsari untuk memenangkan Nur Azizah karena mereka memiliki basis-basis suara yang bisa dimanfaatkan Nur Azizah.

Selanjutnya yaitu tujuh belas orang keluarga dari Nur Azizah yang bertugas untuk memegang uang dan menyebarkan patronase kepada masyarakat dengan didampingi oleh tim sukses partisipan atau broker akar rumput yang ada di wilayah tersebut. Tujuh belas orang itu adalah keluarga Nur Azizah tetapi bukan sebagai masyarakat Desa Gubugsari. Yang terdiri dari enam saudara kandung Nur Azizah dengan pasangannya, dan lima berasal dari keponakan Nur Azizah. Alasan Nur Azizah mengikut sertakan keluarganya lantaran tidak terlalu percaya dengan tim suksesnya kalau memegang langsung uang untuk dibagikan ke masyarakat. Karena banyak kasus tim sukses yang berlaku culas dengan memanfaatkan kepercayaan calon untuk mengambil atau mengkorupsi uang yang seharusnya diberikan kepada masyarakat sebagai uang ganti kerja. Oleh karena itu Nur Azizah mensiasatinya dengan melibatkan keluarga yang sangat dipercaya oleh Nur Azizah.

“Tim sukses partisipan berjumlah empat orang dalam satu RT nya. Tugas utamanya hanya sebagai informan untuk saya agar mendapatkan informasi terkait bagaimana masyarakat Desa Gubugsari yang ada di wilayah masing-masing. Dan tentu saja mempengaruhi masyarakat agar mau memilih saya. Yang saya targetkan adalah keluar sebagai pemenang dalam kontestasi pilkades ini dengan suara mutlak.” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 11 Juni 2024).

Tim sukses partisipan berjumlah empat orang dalam setiap RT, dan di Desa Gubugsari ada tujuh belas RT, sehingga keseluruhan tim sukses partisipan Nur Azizah berjumlah enam puluh delapan orang. Tugas tim sukses partisipan Nur Azizah tidak terlalu berat hanya sebagai informan untuk Nur Azizah untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat berdasarkan wilayah tim sukses masing-masing yang sudah tersebar. Bagaimana kecenderungan calon yang dipilih di wilayah tersebut, dan lain sebagainya. Sehingga Nur Azizah bisa memperkirakan patronase yang dibagikan dan strategi apa yang cocok. Selanjutnya tugas tim sukses partisipan Nur Azizah adalah mempengaruhi masyarakat untuk memilih Nur Azizah dengan memberikan gambaran-gambaran yang positif terkait Nur Azizah, agar menciptakan citra Nur Azizah yang baik di masyarakat. Dan juga mereka bertugas sebagai pemeriah suasana dalam pemenangan Nur Azizah. Selanjutnya piramida broker Nur Azizah digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 7. Piramida Broker Nur Azizah**

Tim sukses ini selalu terstruktur secara hierarkis dan diatur secara geografis, melalui kelompok yang terbaik yang merentang dari sekelompok koordinator diposisi puncak yang membantu calon sampai ke para broker yang ada di tingkat paling bawah atau sering disebut dengan broker akar rumput (Aspinall & Berencschot, 2019, p. 137). Sehingga ini membentuk sebuah piramida broker yang tersistematis, pada tingkat atas sampai bawah. Broker koordinator yaitu orang-orang dibawah calon secara langsung. Yang bertugas mengontrol beberapa broker dibawahnya. Biasanya ditunjuk berdasarkan wilayahnya tujuan pemilihan. Seperti halnya tim sukses Nur Azizah yang sesuai dengan piramida broker yang sudah dijelaskan dalam teori Edward Aspinall.

Sedangkan broker akar rumput ini berada pada tingkatan paling bawah, yang berfungsi untuk menyakinkan pemilih tentang kelebihan calon dan tugas mereka sekaligus untuk memberikan uang tunai atau hadiah kepada masyarakat di akar rumput. Broker akar rumput ini berperan sangat penting karena seruan yang dibuat oleh orang yang memiliki hubungan intim dan memiliki pengaruh dengan pemilih lebih efektif dibanding dengan seruan orang yang belum dikenal (Aspinall & Berencschot, 2019, p. 137). Dalam kasus tim sukses Nur Azizah broker akar rumput tidak memberikan langsung patronase atau serangan fajar kepada masyarakat, tapi ada tim koordinator RT yang diisi oleh keluarga Nur Azizah sebagai pemegang dan pemberi patronase kepada masyarakat. Sedangkan broker akar rumput hanya mendampingi dan memberikan informasi.

Model politik Nur Azizah ini sesuai dengan yang ditulis oleh Edward Aspinall melalui temuannya di negara-negara di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. bahwasannya mesin politik yang dibuat sama dengan yang sering dijumpai di Indonesia yaitu Ad hoc. Atau dengan membuat mesin politik secara mendadak dan hanya digunakan untuk kepentingan pemilihan saja, setelah itu dibubarkan. Dan biasanya, manfaat timbal balik yang diterima oleh tim sukses adalah berupa materi. Dan tim sukses yang dibentuk dijalankan mengikuti mekanisme piramida broker berdasarkan wilayah dan hierarkisnya. Selain itu juga tim sukses perlu untuk menjalin hubungan yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Terutama orang-orang yang punya pengaruh kuat di masyarakat.

Selanjutnya yaitu tugas yang dilakukan tim sukses Nur Azizah adalah membuat strategi yang cocok untuk dilakukan di Desa Gubugsari. Mereka sepakat bahwasannya di Desa Gubugsari sendiri masih kental dengan politik uang dan kedekatan calon dengan masyarakat. Dua hal tersebut yang sangat berpengaruh terhadap pemenangan calon kepala Desa Gubugsari jika ingin mengambil hati masyarakat. Oleh karena itu mereka menyarankan Nur Azizah melakukan door to door, mengadakan acara pengajian di rumah Nur Azizah untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, hingga memberikan uang ganti kerja kepada masyarakat. Dalam melakukan *door to door* tim sukses turut serta menemani Nur Azizah untuk mengunjungi satu persatu rumah warga di Desa Gubugsari. Sedangkan pengajian yang diadakan di rumah Nur Azizah diadakan selama sebelas hari berturut-turut dari mulai H-11 pencoblosan. Pengajian yang diadakan di koordinir oleh tim sukses Nur Azizah dalam menyiapkan acaranya. Dan yang terakhir yaitu memberikan uang ganti kerja kepada masyarakat, yang dilakukan oleh tim sukses keluarga yang dibantu oleh tim sukses partisipan.

“Di sini kalau misalnya ada yang nyalonin harus pake uang, soalnya kalau engga udah pasti kalah. Beberapa kali juga ada yang nyalonin tapi gak pake politik uang, pasti aja kalah. Dan warga biasanya lihat dari nominal uang nya, siapa yang ngasih paling besar diantara calon-calon, itu yang mereka pilih. Soalnya momen-momen kaya gini dimanfaatin warga untuk dapat keuntungan sebanyak-banyaknya” (Wawancara Wira (bukan nama sebenarnya), Masyarakat, 20 Januari 2024).

Akan tetapi budaya politik uang dalam pilkades sudah mendarah daging di desa gubugsari dan sulit dihilangkan. Akan sangat sulit keluar sebagai pemenang dalam kontestasi pilkades di Desa Gubugsari jika memiliki modal yang sedikit. Karena masyarakatpun sudah terbiasa dengan politik uang yang selalu hadir pada saat ada pemilihan, terutama pemilihan kepala desa yang lebih dekat dengan masyarakat desa dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan yang lain. Budaya yang ada di desa berpengaruh terhadap bagaimana politik di desa berjalan. Karena budaya tersebut membentuk masyarakat dalam berbagai hal, termasuk dalam berpolitik.

#### **D. Relasi Nur Azizah dengan Tim Suksesnya**

Relasi adalah hubungan berdasarkan kepentingan antara berbagai kelompok atau etnitas yang berada dalam satu etnitas wilayah. Kata relasi dalam konsep relasi kuasa mengacu pada kepentingan hubungan atau interaksi berdasarkan kekuatan yang bentuk-bentuk dan akibatnya ditentukan oleh akumulasi kekuasaan yang dimiliki kelompok atau anggota kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain (Fauziah, 2017, p. 6).

“Hubungan yang terjalin antara saya dengan tim sukses saya berlangsung dengan baik dan sangat kekeluargaan. Fokus tujuan kita sama yaitu ingin memenangkan Pilkades Gubugsari. Akan tetapi tentu saja ada uang ganti kerja yang harus diberikan kepada tim sukses, sebagai upah karena sudah membantu saya” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 23 Januari 2024).

Manusia memerlukan hubungan timbal baik yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, begitu juga berlaku pada saat pemilihan Kepala Desa antara calon Kepala Desa dengan tim suksesnya. Kemungkinan kecil tim suksesnya mengerjakan secara sukarela tanpa ada keuntungan yang didapatkan,

begitu juga dari calon tersebut. Tidak mungkin juga jika calon hanya memberikan materi kepada tim sukses tanpa mengharapkan tim sukses bekerja dengan maksimal untuk memobilisasi masyarakat. Relasi ini tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga berlaku untuk organisasi dengan individu yang harus memiliki hubungan timbal balik dua arah. Lama waktunya relasi ini terjalin tergantung bagaimana kedua belah pihak merawat relasi tersebut. Relasi juga bisa terputus lantaran kedua belah pihak sudah tidak terjalin hubungan timbal balik. Hanya satu pihak yang merasa diuntungkan, sedangkan pihak yang satunya tidak. Akan tetapi ada juga yang tetap mempertahankan relasi tersebut meskipun hanya sekedar formalitas saja. Mengingat saat ini pentingnya sebuah relasi dalam memudahkan kehidupan.

Relasi yang terbentuk antara Nur Azizah dan mesin politiknya yaitu tim sukses terbentuk karena memiliki tujuan yang sama yaitu ingin memenangkan Nur Azizah menjadi kepala desa dengan cara memobilisasi suara masyarakat. Relasi antara Nur Azizah dengan tim sukses ad hocnya ini penting, karena dalam menjalankan strateginya Nur Azizah sangat mengandalkan tim sukses untuk memobilisasi suara masyarakat. Relasi Nur Azizah dengan tim suksesnya menggunakan konsep patronase dengan memberikan materi kepada mereka. Materi tersebut berupa uang tunai, dan manfaat lainnya. politik uang yang sudah biasa terjadi di masyarakat Desa Gubugsari sudah biasa terjadi, apalagi dalam lingkup pemilihan yang paling dekat dengan mereka, yaitu pemilihan kepala desa. Modal utama yang harus dimiliki calon adalah uang. Karena masyarakat Desa Gubugsari tidak tertarik dengan calon selain karena materi yang bisa diberikan kepada mereka.

“Jika seseorang ingin terpilih menjadi kepala desa khususnya di Desa Gubugsari, tentu saja harus mempunyai modal yang nantinya diberikan kepada kami sebagai masyarakat. dan hal itu merupakan hal yang wajar untuk dilakukan, lantaran di Desa Gubugsari juga nanti jika mereka sudah menjabat pasti mendapatkan bengkak yang lumayan menguntungkan. Kami pun juga ingin mendapatkan manfaat tersebut. Apalagi untuk pemilihan kepala desa yang cuman ada 6 tahun sekali saja, tidak setiap tahun.” (Wawancara Hana (bukan nama sebenarnya), masyarakat, 13 Februari 2024)

Masyarakat Desa Gubugsari sadar bahwannya bengkak Kepala Desa sangat lumayan jika orang tersebut menjadi Kepala Desa, sehingga harus ada juga modal yang dikeluarkan oleh mereka. Masyarakat setidaknya bisa sedikit merasakan bengkak desa walaupun hanya 6 tahun sekali melalui money politik yang diberikan oleh calon. Sehingga calon pun berlomba-lomba memberikan politik uang kepada masyarakat, agar mereka mau memilihnya.

“Kami sebagai tim sukses diberikan uang lelah oleh Bu Azizah sebanyak Rp. 50.000,00 disetiap pertemuan dengan Bu Azizah” (Wawancara Bayu (bukan nama sebenarnya), tim sukses, 5 Februari 2024).

“Saya sebagai tim inti Bu Azizah biasanya dikasih uang lelahnya aga sedikit beda yaitu sebanyak Rp. 100.000,00 disetiap pertemuan kalau tidak salah” (Wawancara Arya (bukan nama sebenarnya), tim sukses, 25 Januari 2024).

Dalam merawat tim suksesnya Nur Azizah tidak lupa memberikan upah sebagai uang lelah kepada tim suksesnya agar lebih semangat untuk bekerja. Untuk tim sukses partisipan atau broker akar rumput diberikan sebanyak Rp. 50.000,00, untuk tim intinya sebanyak Rp. 100.000,00, sedangkan untuk tim

keluarganya tidak diberikan apa-apa, itu hanya bagian dari membantu keluarga saja. Selain uang lelah, Nur Azizah juga tidak lupa selalu menyiapkan konsumsi untuk tim suksesnya, sehingga mereka tidak kekurangan makanan.

“Pada saat kampanye Bu Azizah menjanjikan doorprize bagi Dusun dengan perolehan jumlah presentase suara Bu Azizah terbanyak kesatu dan kedua akan mendapatkan yang 10jt dan 3jt. Yang menang waktu itu Dusun Diwek dan Gersan” (Wawancara Arya (bukan nama sebenarnya), tim sukses, 25 Januari 2024).

Dengan adanya doorprize ini warga dan tim sukses yang ada dimasing-masing dusun berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah tersebut. Hadiah tersebut lumayan untuk dipakai warga Dusun membuat sebuah kegiatan yang meriah bagi dusun mereka. Ataupun juga bisa dibagi-bagi atau dibuat makanan bersama satu dusun. Tim Sukses Nur Azizah sangat sat set untuk memobilisasi masyarakat untuk mamilih Nur Azizah agar Dusunnya yang mendapatkan doorprize tersebut. Tapi ternyata yang menang adalah Dusun Diwek dengan jumlah 70,1% suara Nur Azizah. Setelah mendapatkan doorprizenya mereka melakukan makan-makan bersama, dan sisa uangnya dimasukan ke kas. Nantinya uang tersebut dipakai untuk membuat sebuah kegiatan 17san Dusun Diwek yang meriah.

Dengan memberikan materi kepada masyarakat dapat membentuk sebuah citra calon yang baik di masyarakat, bahwasannya mereka tidak pelit dan suka memberi, yang mana harapannya dalam memimpin Desa Gubugsari mereka menjadi royal kepada masarakatnya. Sehingga terbentuk lah sebuah relasi dengan masyarakat Desa Gubugsari, dan masyarakat pun jadi lebih percaya kepada Nur Azizah. Apalagi di tambah dengan adanya dukungan dari para tokoh yang disegani di desa. Setelah pemilihan Kepala Desa selesai, Nur Azizah dengan tim suksesnya sudah tidak memiliki kepentingan satu sama lain. Akan tetapi Nur Azizah tetap merawat tim suksesnya meskipun tidak secara formal dan terus terang. Dan mereka tetap menjalin hubungan baik satu sama lain. Terutama dalam memajukan desa gubugsari menjadi lebih baik lagi.

## BAB V

### STRATEGI MOBILISASI PEMILIH

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai strategi Nur Azizah dalam memobilisasi masyarakat agar memperoleh dukungan untuk memenangkan kontestasi pemilihan Kepala Desa Gubugsari Tahun 2020. Fokus utama pada bab ini adalah strategi yang dilakukan Nur Azizah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar memilihnya menjadi Kepala Desa Gubugsari. Data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber dan data-data pendukung yang diperoleh dari berbagai dokumen yang sesuai. Yang selanjutnya dilakukan proses analisa menggunakan teori-teori yang sesuai dengan topik pembahasan agar terbentuk sebuah karya penulisan yang sistematis dan komperhensif.

#### A. Isu-isu kemenangan kampanye

Kampanye politik merupakan suatu kegiatan yang terorganisir yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Pengertian kampanye menurut Rogers & Snyder (2002:8), kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang biasanya dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau organisasi politik dalam waktu tertentu dengan tujuan memperoleh dukungan dari masyarakat. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Berdasarkan surat keputusan KPU no. 35 Tahun 2004, ada beberapa jenis kampanye yaitu debat publik, kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, memasang alat peraga di tempat umum, menyebarkan kepada umum terkait bahan kampanye, penyebaran melalui media cetak dan elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, pertemuan terbatas, rapat umum, dan tatap muka dan dialog (Fatimah, 2018, pp. 7-9).

Dalam proses pemilihan di Indonesia, proses mempromosikan kandidat disebut sebagai kampanye, tidak terkecuali dalam pemilihan kepala Desa. Kampanye adalah salah satu bagian dari proses untuk mempromosikan kandidat agar dipilih oleh masyarakat. Dalam proses kampanye setiap calon berusaha untuk menampilkan citra yang baik di depan masyarakat. Kandidat turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi dan keluh kesah masyarakat, agar nantinya jika terpilih bisa memperbaiki apa yang kurang di daerah tersebut. Setiap kandidat tentu saja menawarkan penawaran yang menarik dengan imbalan masyarakat harus memilihnya. Penawaran tersebut bisa berupa materi, program, janji-janji yang akan

dilaksanakan kalau kandidat tersebut terpilih, dan bantuan-bantuan lainnya yang bisa didapatkan masyarakat.

“Biasanya untuk calon kepala Desa Gubugsari dalam pelaksanaan kampanye memberikan janji-janji manis, supaya masyarakat memilih calon tersebut” (Wawancara Wira (bukan nama sebenarnya), masyarakat, 20 Januari 2024).

Pada saat kandidat turun ke lapangan untuk melakukan kampanye, kandidat belum bisa memberikan solusi dalam sebuah masalah secara konkret, akan tetapi masih bersifat abstrak. Hal tersebut terjadi karena kandidat tersebut belum memiliki wewenang untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga masyarakat tidak bisa menuntut pemecahan kepada calon, akan tetapi jika sudah terpilih masyarakat berhak untuk menagih janji-janji manis kandidat pada saat kampanye. Agar janji tersebut dapat terealisasi dengan baik oleh calon. Karena biasanya saat melakukan kampanye kandidat memberikan janji-janji kepada masyarakat yang akan dilaksanakan setelah mereka terpilih. Janji-janji tersebut biasanya yang membuat masyarakat tergiur untuk memilih kandidat yang memberikan janji yang paling menguntungkan mereka.

“Biasanya di Desa Gubugsari kalau ada orang yang mau nyalonkan jadi kepala desa itu udah pendekatan ke masyarakat dari jauh-jauh hari bahkan sebelum mendaftarkan diri” (Wawancara Hana (bukan nama sebenarnya), masyarakat, 13 Februari 2024).

Kandidat sudah mempersiapkan melakukan kampanye dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum calon tersebut mendaftarkan diri untuk menjadi calon secara resmi. Mereka biasanya memulai dengan melakukan pendekatan tipis-tipis kepada masyarakat hingga melakukan kampanye secara terang-terangan. Kampanye yang efektif dalam lingkup Desa saat ini masih dengan melakukan tetap muka langsung atau terjun di masyarakat. Meskipun saat ini teknologi sudah berkembang dengan pesat, akan tetapi dalam lingkup desa, masyarakat tetap menginginkan sosok pemimpin yang benar-benar dekat langsung dengan masyarakat. Dengan cara mereka hadir ditengah-tengah masyarakat, baik dalam sebuah acara maupun hanya sekedar beramah tamah dengan tetangga. Karena dalam lingkup desa sosok pemimpin benar-benar terlihat sangat dekat di masyarakat dibanding pemimpin dalam tingkatan yang lebih tinggi seperti Bupati, DPR, Presiden, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana rutinitas sehari-hari yang dilakukan calon, terutama dalam bersosialisasi dan pengambilan keputusan dalam lingkup kecil seperti lingkup keluarga.

“Kalau sebagai masyarakat, saya maunya kepala desa itu yang merakyat dan dekat dengan masyarakat. Supaya nantinya tidak sungkan untuk meminta pertolongan. Kepala Desa pun jadi tahu secara langsung kondisi masyarakat dan masalah apa aja yang ada di masyarakat. Dan biasanya masyarakat melihat calon dari bibit bobot dan bebetnya” (Wawancara Hana (bukan nama sebenarnya), masyarakat, 13 Februari 2024).

Begitu juga yang terjadi di Desa Gubugsari, kampanye ini menjadi sebuah ajang untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sosok calon pemimpin yang kelak akan memimpin desa mereka. Tentu saja pemimpin harus mengenal warganya agar mempermudah mengetahui

kesulitan apa saja yang dialami oleh warganya. Sehingga masyarakat desa sangat teliti dalam memilih sosok pemimpin kelak mereka. Tidak heran biasanya suasana dalam pilkades lebih panas dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan lainnya yang ada di Indonesia. Karena pergerakan calon pada saat kampanye benar-benar dilihat oleh masyarakat, mulai dari bibit, bobot, dan bebetnya. Bahkan bisa terlihat oleh lawan politiknya, mereka mencari celah untuk menjatuhkan lawan politiknya.

“Pada saat pencalonan Kepala Desa kemarin di masyarakat banyak ditampilkan sebuah isu-isu yang dekat dengan masyarakat Desa Gubugsari. Seperti isu perempuan, karena kebetulan pada pemilihan kali ini dan pertama kalinya di Desa Gubugsari ada calon perempuan yang mendaftarkan diri. Jadi banyak pembahasan mengenai perempuan ini. Ada juga isu kepemudaan dan pembangunan yang selalu ada di setiap mendekati ajang pemilihan kepala desa” (Wawancara Wira (bukan nama sebenarnya), masyarakat, 20 Januari 2024).

Keberhasilan Nur Azizah yang keluar sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkades Desa Gubugsari tahun 2020 tidak terlepas dari usaha keras tim suksesnya untuk menyebarkan isu-isu kampanye yang telah didiskusikan bersama. Isu-isu kampanye yang dibawa oleh Nur Azizah yaitu seputar isu perempuan, isu kepemudaan, dan isu pembangunan. Isu-isu tersebut dianggap penting oleh Nur Azizah lantaran tiga hal itu bisa membangun desa gubugsari melalui perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Terfokus dengan membangun sumber daya manusia yang lebih baik lagi di desa gubugsari dengan mensupport kegiatan-kegiatan mereka, agar mereka lebih berkembang lagi. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa isu yang ada dan dibawa Nur Azizah pada saat kampanye di Desa Gubugsari.

## **1. Isu Perempuan**

Desa Gubugsari dalam sejarahnya tidak pernah dipimpin oleh sosok pemimpin perempuan, dari awal berdirinya Desa Gubugsari yang memimpin selalu laki-laki. Bahkan tidak ada calon Kepala desa perempuan yang berani mencalonkan diri. Hingga pada tahun 2020 Nur Azizah sebagai perempuan mencalonkan diri dalam Pilkades Desa Gubugsari, dan berhasil keluar sebagai Pemenang sekaligus menjadi Kepala Desa perempuan pertama di Desa Gubugsari. Isu perempuan yang melekat pada Nur Azizah pada saat kampanye membuat Nur Azizah mengelola hal tersebut ke arah yang lebih baik. Sejak awal mencalonkan Nur Azizah sudah dipandang sebelah mata oleh masyarakat, dikarenakan sebelumnya yang memimpin Desa Gubugsari selalu laki-laki. Masih banyak yang menganggap bahwa perempuan itu tidak cocok menjadi seorang pemimpin, seharusnya yang menjadi pemimpin adalah laki-laki karena mereka seorang imam. Langkah perempuan dinilai terlalu terbatas untuk menjadi pemimpin yang dianggap perlu sigap dan cepet dalam melangkah mengambil keputusan. “Awalnya saya sempat ragu untuk mencalonkan diri sebagai kepala Desa, soalnya saya sebagai perempuan kadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dan masih banyak yang berpandangan di Desa Gubugsari kalau pemimpin itu harus seorang laki-laki. Dan langkah perempuan pun dinilai lebih terbatas ruang lingkungannya dibandingkan laki-laki. Jadi saya pikir sulit untuk bersaing dalam lingkungan ini. Dan saya ingin merubah pemikiran tersebut dimasyarakat, dan ingin membuktikan bahwasannya perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 23 Januari 2024).

“Pada saat Nur Azizah diisukan akan mencalonkan diri, ada sedikit keterkejutan dari masyarakat, lantaran ada perempuan yang berani untuk menjadi seorang pemimpin, karena umumnya dalam islam pun pemimpin itu harus seorang laki-laki” (Wawancara Yoga (bukan nama sebenarnya), masyarakat sekaligus ketua IPNU, 11 Februari 2024).

Pencalonan ini pun sebagai sebuah pembuktian bahwasannya perempuan pun sebetulnya bisa menjadi seorang pemimpin yang sigap dalam menghadapi masalah yang ada di masyarakat. sudah saatnya mengubah pola pikir tersebut di masyarakat. Siapapun bisa menjadi seorang pemimpin, asalkan bisa berlaku adil kepada masyarakatnya. Nur Azizah yang sebelumnya dianggap tidak mampu memenangkan Pilkades karena seorang perempuan, ternyata masyarakat menilai mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Dan pembuktian tersebut juga diharapkan bisa menginspirasi bagi perempuan-perempuan diluar sana, khususnya perempuan-perempuan yang ada di desa gubugsari. Sebagai seorang perempuan tidak menghentikan langkah kita untuk bisa menjadi apapun sesuai dengan apa yang kita inginkan dan cita-citakan. Meskipun dalam lingkup nasional budaya patriarki ini mulai memudar, akan tetapi dalam lingkup desa budaya seperti ini masih terus berkembang. Oleh karena itu perlu adanya pergeseran pemikiran yang lebih baik lagi dimasyarakat.

“Sebagai calon perempuan saya juga berkeinginan untuk memajukan potensi-potensi perempuan melalui program-program di Desa Gubugsari, dan mengembangkan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Desa. Melalui kerjasama dengan ibu-ibu PKK baik itu tingkat Desa maupun tingkat Dusun. Masa nanti kepala Desanya perempuan, tapi PKK nya tidak berjalan dengan baik” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 23 Januari 2024)

Nur Azizah dalam kampanyenya, jika terpilih sebagai kepala desa Gubugsari ingin program-program terkait perempuan dan anak-anak bisa berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya. Salah satunya yaitu dengan lebih mengaktifkan kembali organisasi ibu-ibu PKK yang berjalan sebagai mestinya. Yaitu sebagai garda terdepan dalam program-program terkait perempuan dan anak. Nantinya ibu-ibu PKK ini bisa membantu Nur Azizah dalam menjalankan programnya agar menciptakan desa gubugsari yang lebih baik lagi. Nur Azizah mempunyai keinginan jika dia terpilih, maka PKK desa gubugsari harus menjadi yang terbaik dibandingkan dengan desa-desa tetangga. Dengan cara mengikuti lomba-lomba dan aktif terjun langsung di masyarakat menciptakan sebuah perubahan. Dalam hal kecil seperti mengadakan senam rutinan yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat desa gubugsari. ataupun juga menjadi wadah untuk membuat makanan-makanan yang bergizi agar anak-anak terhindar dari stunting. Atau bisa juga sebagai penyalur informasi tentang makanan mana yang sehat dan tidak kepada masyarakat. ibu-ibu PKK ini diberikan pelatihan dulu sebelumnya, setelah mereka paham baru mereka yang bertugas menyampaikan informasi ini ke masyarakat yang lain di Desa Gubugsari.

Penting untuk mengambil suara dari ibu-ibu Desa, karena mereka nantinya bisa mempengaruhi keluarga untuk memilih Nur Azizah sebagai kepala Desa Gubugsari. Deorang ibu memiliki suara yang sangat di dengar di keluarganya dan bisa mempengaruhi lingkungannya. Biasanya informasi menyebar sangat cepat melalui mulut ibu-ibu, termasuk ibu-ibu yng ada di Desa Gubugsari. Nur Azizah pun memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk dalam kelompok ibu-ibu lantaran Nur Azizah sebagai seorang perempuan dibandingkan lawannya yaitu Amri sebagai seorang laki-laki.

## 2. Isu Kepemudaan

Dalam upaya membangun sebuah Desa yang maju dibutuhkan juga sumber daya manusia yang baik, terlebih lagi anak muda sebagai agen perubahan. Dilihat dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang tercipta berkat adanya partisipasi dari anak muda yang memiliki semangat untuk berjuang, sehingga terciptalah sebuah kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Seharusnya dari sejarah tersebut memberikan kita pelajaran bahwa pentingnya peranan anak muda dalam sebuah perubahan. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat saat ini terlihat semakin berkurangnya peran anak muda di masyarakat. Mereka terlalu sibuk dengan urusannya sebagai anak muda, tanpa memikirkan nasib sekitarnya. Desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil harus memberikan sebuah wadah bagi para anak muda ini untuk menggunakan semangat muda mereka agar bermanfaat bagi masa depan dan lingkungan mereka.

“Ada beberapa perkumpulan atau organisasi anak muda di Desa Gubugsari, seperti Karang Taruna, TSC, IPNU & IPPNU. Dibatasi sebagai wadah bagi para anak muda yang ada di Desa Gubugsari untuk mengekspresikan diri mereka.” (Wawancara Meli, masyarakat sekaligus perangkat Desa, 25 Januari 2024)

Desa Gubugsari memiliki beberapa organisasi kepemudaan yang berfokus dalam bidang sosial, agama dan olahraga. Dalam bidang sosial ada Karang Taruna, tugas mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa. Dalam bidang agama ada IPNU & IPPNU, sebagai organisasi Islam khusus untuk anak muda yang ada dibawah naungan organisasi NU. Tugas mereka untuk menyebarkan ajaran agama, dan menjadi anak muda untuk tetap berpegang pada prinsip keagamaan. Selanjutnya dalam bidang olahraga di Desa Gubugsari ada TSC, yaitu sebuah klub sepak bola bagi para anak muda untuk mengekspresikan dirinya melalui kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga bola ini.

“Di Desa Gubugsari ada klub bola yaitu TSC yang biasanya melakukan banyak pertandingan. Pada kepemimpinan sebelumnya, kepala Desa hanya mementingkan klub itu saja, karena Kepala Desanya juga memang suka bola. Tapi organisasi kepemudaan yang lain seperti Karang Taruna, IPNU & IPPNU kurang diperhatikan. Dan pada saat kampanye Bu Azizah menawarkan pengaktifan organisasi kepemudaan yang lain yang ada di Desa Gubugsari untuk membantu kegiatan desa juga” (Wawancara Yoga, masyarakat, 11 Februari 2024)

Dalam kepemimpinan kepala desa terdahulu, kepala desa lebih mementingkan organisasi sepak bola yang ada di desa Gubugsari. Sehingga kurang memperhatikan organisasi pemuda lainnya yang ada di Desa Gubugsari seperti Karang Taruna, IPNU & IPPNU. Nur Azizah mengangkat isu ini pada saat kampanye, bahwasanya jika terpilih Nur Azizah akan memperhatikan seluruh organisasi pemuda yang ada di Desa Gubugsari. Dengan mendukung kegiatannya melalui keikutsertaan dirinya dan adanya dana yang bisa digunakan dari desa. Tentunya untuk kegiatan-kegiatan positif untuk tujuan membangun Desa Gubugsari.

Karang taruna sebagai sebuah organisasi di Desa menjadi wadah bagi anak muda untuk berkreasi dan berkontribusi untuk membangun desa. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dengan mengikuti karang taruna. Seperti untuk mengembangkan potensi diri sendiri terutama dalam bersosialisasi dan membangun kepercayaan diri. Karena karang taruna sebagai wadah yang efektif untuk ikut dalam sebuah perkumpulan dalam membahas sesuatu, saling berbagi pengalaman dan inspirasi, dan bisa untuk mengasah kreatifitas.

Selain itu juga ada IPNU dan IPPNU sebagai sebuah organisasi islam yang ada di Desa Gubugsari. Seperti halnya karang taruna, oraganisasi ini juga diperuntukan untuk anak muda, akan tetapi IPNU dan IPPNU lebih bernuansa islami dalam membuat sebuah kegiatan. Organisasi ini penting agar masyarakat Desa Gubugsari terutama anak mudanya tidak terlalu jauh dari agama dan tradisi ketimuran yang kita miliki. Apalagi semakin pesatnya kemajuan teknologi dan informasi mengharuskan anak muda memiliki penyaring untuk memfilter informasi yang beredar. Dan agar memiliki pengaman untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif dan terlarang dalam agama.

“Saya dan kawan saya sebagai anak muda sebenarnya ingin membuat kegiatan-kegiatan yang menarik untuk di Desa Gubugsari, tapi kadang suka segan dan takut dengan orang-orang yang lebih senior di desa” (Wawancara Yoga (bukan nama sebenarnya), masyarakat sekaligus ketua IPNU, 11 Februari 2024).

Bonus demografi yang didapatkan indonesia seharusnya bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Saat di masyarakat anak muda masih banyak yang segan dengan para sepuh saat mereka ingin menciptakan sesuatu atau kegiatan di masyarakat. padahal seharusnya anak muda dan para sepuh harus berkolaborasi agar terciptanya sebuah kegiatan yang bersinergi. Para sepuh pun bisa memberikan masukan mengenai sebuah ide atau gagasan yang dibawa oleh anak muda, begitupun sebaliknya. kalau itu terlaksana, maka akan terciptanya lingkungan desa yang nyaman dan harmonis. Tidak ada kecanggungan satu sama lain, barulah dar situ fokus untuk membangun desa.

“Dilihat dari potensi anak muda saat ini dalam mengakses teknologi dan informasi yang lebih pintar dari saya tentunya. Saya ingin mereka mengembangkan kemampuan tersebut untuk kemajuan desa melalui organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Desa Gubugsari. Dan juga saya measukan dalam misi yang untuk membangun masyarakat desa gubugsari berlandaskan agama dan iptek” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 23 Januari 2024).

Anak muda bisa memanfaatkan kemampuan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi yang mereka bisa. Karena biasanya para sepuh memiliki kesulitan untuk mengakses teknologi tersebut. Nantinya mereka berkolaborasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dengan tidak meninggalkan ajaran agama dan budaya lokal. Hal tersebut sesuai dengan misi Nur Azizah dalam pilkades yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dengan landasan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tanpa meninggalkan budaya lokal. Oleh karena itu Nur Azizah ingin mengembangkan kembali organisasi pemuda yang ada di Desa Gubugsari seperti karang taruna, IPNU, dan IPPNU.

“Bu azizah menjanjikan kepada kami, meskipun beliau yang terpilih, beliau tetap akan mendukung organisasi bola TSC, dan mendukung kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Dan juga Bu Azizah ingin mengembangkan olahraga lain juga seperti voli di Desa Gubugsari. Bu Azizah berjanji untuk mendukung penuh dan tidak mengenyampingkan TSC” (Wawancara Bagas (bukan nama sebenarnya), masyarakat sekaligus anggota TSC, 10 Februari 2024)

Nur azizah memiliki keinginan untuk mengembangkan olahraga yang ada di Desa Gubugsari. agar nantinya anak-anak yang ada di Desa Gubugsari lebih sering menghabiskan waktunya diluar untuk berolahraga dibandingkan hanya main handphone dirumah. Sehingga bisa melakukan kegiatan yang produktif, selain itu juga untuk menciptakan masyarakat Desa Gubugsari yang sehat. Sebelum Nur Azizah terpilih sebagai Kepala Desa, olahraga yang berkembang dan di dukung oleh pemerintah desa adalah olahraga sepak bola. Lantaran kepala desa terdahulu sangat menyukai olahraga sepak bola. Bahkan sepakbola desa gubugsari sudah memenangkan banyak pertandingan.

Dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa Gubugsari dibutuhkan anak muda yang pandai bergaul, dan bisa memikat hati masyarakat. Nur Azizah berusaha mendapatkan simpati dari pemuda yang ada di Desa Gubugsari, terutama yang sudah memiliki hak pilih agar mau mendukungnya. Dengan memberikan janji-janji yang sudah disebutkan diatas, dengan harapan mereka nantinya memilih Nur Azizah. berkampanye melalui organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di desapun dinilai lebih efektif lantaran yang ditemui tidak hanya satu dua orang, tetapi mencakup banyak orang atau satu organisasi. Dan biasanya hal mereka inginkan dari kepala desa terpilih hanya mencakup kebutuhan organisasi mereka saja.

“Saat Bu Azizah menang ada kekecewaan dari pendukung setia Pak Amri yang merasa memiliki hutang budi kepada Pak Amri. Mereka menganggap TSC tidak bisa berkembang jika Nur Azizah yang menjadi Kepala Desa” (Wawancara Bagas (bukan nama sebenarnya), masyarakat sekaligus anggota TSC, 20 Februari 2024)

Di dalam organisasi TSC sendiri pernah ada perpecahan karena berbeda dukungan dalam memilih Kepala Desa. Sebagian anggota lebih mendukung lawan Nur Azizah yaitu Muslikul Amri, sedangkan yang lainnya mendukung Nur Azizah. Karena sakit hati dengan kekalahan Muslikul Amri, sebagian anggota keluar dari TSC. Karena rasa solidaritas kepada Muslikul Amri, karena menganggap Muslikul amri yang membangun TSC. Mereka tidak terima jika Nur Azizah yang menang, bagaimana nasib TSC, apalagi Nur Azizah sebagai perempuan yang tidak terlalu mengerti tentang sepak bola. Akan tetapi kondisi tersebut tidak berlangsung lama, mereka akhirnya tetap berdamai dan sama-sama membangun TSC agar lebih baik lagi. Begitupun juga dalam membangun Desa Gubugsari, meski membutuhkan waktu, semuanya sama-sama move on dan lebih memilih membangun Desa Gubugsari kedepannya.

### **3. Isu Pembangunan**

Desa sebagai sebuah wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Kepala Desa yang terus mengupayakan pembangunan yang berasal dari bawah. Suatu wilayah atau negara

yang baik adalah yang memperhatikan seluruh pembangunan dari mulai pembangunan kota hingga pembangunan Desa sebagai satuan wilayah terkecil. Pemerintah Desa harus semaksimal mungkin menggunakan dana yang ada di Desa untuk kepentingan pembangunan Desa. Pembangunan Desa tidak hanya tentang pembangunan secara fisik saja tetapi dalam hal meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga bagian dari upaya untuk pembangunan Desa. Tentu saja perintah Desa harus bekerja sama dan bersinergi dengan warganya untuk upaya pembangunan tersebut.

Dalam kampanyenya Nur Azizah menginginkan adanya pembangunan yang lebih baik di Desa Gubugsari, baik itu dari segi pembangunan fisik maupun nonfisik. Pembangunan dalam bentuk fisik yang ada di Desa berupa infrastruktur seperti balai Desa, jalan-jalan Desa, Rumah ibadah yang ada di Desa, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bentuk nonfisik yaitu dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sejalan dengan meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesmiskinan. Pembangunan ini berupa peningkatan administrasi desa, pelayanan desa, transparansi desa, pemberdayaan ekonomi, dan lain-lain. Pembangunan desa yang baik seharusnya dengan melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut. Agar terciptanya kehidupan masyarakat yang nyaman dan aman di desa.

Dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini pemerintah desa dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan tersebut, karena saat ini semuanya berkembang dengan sangat cepat. Kalau pemerintahan desa tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka kemungkinan desanya akan tertinggal dibandingkan desa yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan aparat pemerintahan desa yang mengerti dan bisa mengajarkan kepada yang sudah berumur tentang teknologi yang bisa dipakai untuk kemajuan desa. Karena saat ini dalam sistem administrasinya pun pemerintah dari yang tertinggi hingga terendah harus menggunakan teknologi, tidak dilakukan secara manual lagi.

“Sebelum saya menjabat, pemerintah Desa Gubugsari masih kurang maju dari segi administrasi dan transparansi. Belum lagi pejabat pemerintahan di desanya pun kurang disiplin. Kadang mereka jarang masuk kantor, atau masuk kantor seenaknya, jadi masyarakat susah kalau mau mendapatkan pelayanan. Dan saya ingin mengubah hal tersebut.” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 23 Januari 2024)

Pada saat pemerintahan sebelumnya di Desa Gubugsari Nur Azizah sebagai masyarakat desa merasa bahwasannya masih kurangnya pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa dari segi administrasi dan transparansi anggaran. Oleh karena itu dalam kampanye Nur Azizah ingin melakukan perubahan-perubahan yang beberapa tertuang dalam visi misinya. Dalam hal pelayanan dan tata kelola pemerintahan Nur Azizah masyarakat Nur Azizah ingin melakukan peningkatan yang cepat, tepat, rapi, dan disiplin. Sehingga saat masyarakat membutuhkan peran pemerintah desa dalam berbagai hal, pemerintah bisa melayani dengan lebih sigap. Termasuk dalam hal mendisiplinkan perangkat desa untuk tetap hadir di balai desa, meskipun tidak ada pekerjaan. Sehingga jika masyarakat membutuhkan pelayanan cepat, perangkat desa ada di balai desa, tanpa perlu mencari kemana-mana.

Begitupun dalam bidang keuangan, apalagi Nur Azizah yang sebelumnya menjabat sebagai kepala cabang BRI Kabupaten Kendal. Nur Azizah ingin mengelola dana desa dengan cara yang maksimal, yang sesuai dengan Undang-Undang. Dan dalam penggunaannya untuk pembangunan

dan pengelolaan harus sesuai dengan skla prioritas. Termasuk juga dalam bidang ekonomi untuk lebih mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang digunakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. selain itu juga Nur Azizah menjanjikan jika dia terpilih maka akan membuat keuangan Desa Gubugsari menjadi lebih transparan.

“Banyak rencana pembangunan-pembangunan Desa yang saya tuangkan dalam misi saya pada saat mencalonkan diri. Baik itu pembangunan secara fisik maupun sumber daya manusianya” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 23 Januari 2024).

Nur Azizah juga merjanji untuk fokus melaksanakan kebijakan dan program pembangunan desa yang berpihak pada warga miskin. Karena pada saat itu dipimpin oleh dinasti politik atau politik keluarga sehingga saat itu hanya mementingkan kelauraganya. Termasuk dalam hal perairan untuk sawah yang ada di Desa Gubugsari, kepala desa terdahulu cenderung tidak adil, dan mementingkan perairan sawah miliknya dan keluarganya saja. Oleh karena itu Nur Azizah juga mencantumkan dalam misinya untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memperbaiki tata kelola penggunaan air di area pertanian

Dalam hal pembagunan sember daya manusianya Nur Azizah mendukung pendidikan formal dan non formal di lingkup Desa Gubugsari dengan pemberian penghargaan bagi siswa miskin dan berprestasi. Program ini nantinya bisa dimanfaatkan dengan masyarakat Desa Gubugsari untuk memudahkan anak-anak mereka memperoleh pendidikan. Jika pendidiakn dlam lingkup desanya baik, maka nantinya juga menghasilkan anak-anak yang bisa diandalkan untuk membangun desa. Selain itu juga Nur Azizah ingin menciptakan Desa Gubugsari yang ramah anak dengan adanya taman bermain dan ruang terbuka hijau. Agar anak-anak Desa Gubugsari bisa bermain dengan aman dan nyaman dengan teman-temannya. Tentu saja dalam pelaksanaan dan prosesnya Nur Azizah tidak bisa sendirian, perlunya juga partisipasi dari masyarakat untuk keberhasilan program-prohram yang sudah dirncanakan tersebut.

#### **4. Visi dan Misi Nur Azizah**

Motto:

Mengabdikan untuk Desa Gubugsari

Visi:

Mewujudkan Desa Gubugsari yang Unggul, religius, dan Bermartabat.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dengan landasan ajaran agama, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tanpa meninggalkan budaya lokal.
2. Melaksanakan program sertifikasi tanah melalui program PTSL.
3. Mensejahterakan masyarakat petani Desa Gubugsari dengan memperbaiki tata kelola penggunaan air di area pertanian.

4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan tata kelola pemerintahan Desa Gubugsari yang cepat, tepat, rapi, dan disiplin.
5. Melaksanakan tata kelola keuangan desa sesuai dengan amanat Undang -Undang.
6. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan dana desa sesuai dengan skala prioritas.
7. Meningkatkan kesejahteraan lembaga dan masyarakat desa dengan optimalisasi pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).
8. Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
9. Melaksanakan kebijakan dan program pembangunan desa yang berpihak pada warga miskin.
10. Mendukung pendidikan formal dan non formal di lingkup Desa Gubugsari dengan pemberian penghargaan bagi siswa miskin dan berprestasi
11. Menciptakan Desa Gubugsari yang ramah anak dengan adanya taman bermain dan ruang terbuka hijau.

## **B. Politik Uang**

Politik uang adalah sebuah istilah untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu (Aspinall & Sukmajati, 2015, p. 3). Politik uang merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh kandidat pada saat mengikuti kontestasi pemilihan sebuah jabatan. Banyak dari para kandidat yang maju untuk mencalonkan diri sebagai salah satu pejabat publik di curigai dengan kuat mereka akan selalu melibatkan materi yang mereka punya untuk dapat memperoleh suara dari masyarakat. Sejak awal adanya pemilu pertama di Indonesia, politik uang sudah muncul hingga saat ini yang seolah olah menjadi sebuah tradisi yang melekat pada pemilu di Indonesia. sehingga sudah menjadi sebuah budaya atau kebiasaan yang sulit untuk dihindari oleh masyarakat Indonesia.

Terdapat beberapa penyebab utama atau pun faktor mengapa strategi politik uang ini di Indonesia merupakan strategi pemenangan yang ampuh dan melekat pada ajang kontestasi pemilihan baik dari pemilihan Presiden hingga pemilihan Kepala Desa. Salah satunya yaitu faktor kemiskinan dan minimnya tindakan yang bisa diambil oleh hukum untuk mencegah atau pun meminimalisir adanya kegiatan money politic pada saat pemilu (Amal, 2022, p. 601). Kemungkinan besar bagi masyarakat miskin untuk mengambil politik uang yang diberikan tentu saja tidak mereka sia-siakan, karena mereka membutuhkannya untuk keberlangsungan hidup mereka. Karena biasanya ideologis akan kalah dengan kebutuhan perut. Mereka tidak memikirkan dampak dari politik uang tersebut, yang mereka pikirkan adalah uang tersebut bermanfaat untuk menyambung hidup mereka, sehingga mereka tidak punya pilihan untuk tidak mengambil uang tersebut. Faktor ekonomi inilah yang menyebabkan masyarakat masih mau untuk dibeli suaranya. Masyarakat juga masih belum mengerti bahwa suara mereka sangat penting untuk keberlangsungan nasib Indonesia kedepannya, dan tentu saja tidak bisa diganti dengan uang berapapun. Masyarakat hanya tergiur dengan kesenangan semata, karena mereka berfikir bahwa itu adalah berkah dari tuhan dan mereka tidak perlu bekerja susah payah untuk mendapatkan uang tersebut.

Banyaknya jumlah uang yang diberikan biasanya tergantung dengan calon tersebut. Ada yang memberikan dalam bentuk uang, tetapi juga ada yang memberikan dalam bentuk bahan pangan, atau baju dan lain-lain. Karena masyarakat juga terbiasa dengan itu, jadi jika tidak memberikan politik uang kemungkinan untung menangnya sangat kecil. Penyusunan terjadi di sana-sini, hal tersebut menyebabkan para politisi yang akan nyalon harus mengeluarkan modal yang besar untuk pemilihan tersebut. Sehingga biasanya jika mereka sudah terpilih mereka memikirkan bagaimana caranya agar uang yang mereka keluarkan pada saat pemilu bisa kembali modal. Sedangkan gaji sebagai pemegang kekuasaan tidak seperti yang diharapkan, kecuali jika daerah tersebut memiliki jatah bengkok untuk pemimpinnya. Selain yang tidak memiliki jatah bengkok, biasanya mereka mencari celah untuk mendapatkan keuntungan melalui korupsi, suap, dan lain sebagainya. Meskipun tidak menutup kemungkinan jika yang memiliki jatah bengkokpun tetap ingin memperkaya kekayaan pribadinya melalui cara-cara yang tidak baik. Tidak jarang para politisi melakukan korupsi untuk mengganti modal yang sudah mereka keluarkan untuk pemilu tersebut. Sehingga hal tersebut mendorong pemerintah yang cenderung korup.

### **1. Patronase**

Merujuk pada shefter, patronase didefinisikan sebagai sebuah pembagian keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka (shefter 1994: 283, n.3). oleh karena itu patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditunjukkan untuk individu, kelompok atau komunitas. Patronasepun bisa berasal dari dana pribadi atau dana publik (misalnya proyek pork barrel yang dibiayai oleh pemerintah) (Aspinall & Sukmajati, 2015, pp. 3-4).

Patronase juga biasanya sering disandingkan dengan klientalisme, beberapa ahli ada yang mengatakan patronase dan klientalisme merupakan hal yang sama, sedangkan beberapa lainnya menganggap berbeda. Karena patronase dan klientalisme seperti memiliki arti yang sama, tetapi sebenarnya berbeda. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya klientalisme merujuk pada karakter telasi antara politisi dan pemilih atau pendukung (Aspinall & Sukmajati, 2015, p. 4). Konsep patronase ini tidak hanya bisa diterapkan pada pemilihan umum seperti Presiden dan legislatif saja, tetapi juga bisa digunakan pada pemilihan kepala daerah hingga pemilihan kepala desa.

Adapun juga 3 tipe-tipe utama patronase yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian bab 2 yaitu mikro partikularisme, meso partikularisme, dan makro partikularisme. Yang pertama mikro partikularisme yang melibatkan pencairan manfaat kepada individu dan rumah tangga. Jenis partikularisme sering melibatkan hubungan langsung antara mereka yang menyalurkan dengan mereka yang menerima (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 7). Seperti pembelian suara pemilih dengan uang atau barang dengan harapan si pemilih tersebut memilih calon yang sudah memberikan materi tersebut. Materi tersebut diberikan beberapa hari sebelum pencoblosan. Salah satu sebutan pembelian suara di Indonesia yaitu serangan fajar (Aspinall & Sukmajati, 2015, p. 24). Biasanya pemberian serangan fajar dilakukan pada saat fajar atau H-1 pemilihan.

Meskipun saat ini praktik serangan fajar ini biasanya dilakukan beberapa hari sebelum pemungutan suara. Biasanya calon memberikan serangan fajar melalui tim suksesnya untuk nantinya diberikan kepada pemilih. Sebelumnya mereka telah memobilisasi tim sukses mereka untuk mendata masyarakat yang akan diberikan serangan fajar kepada siapa saja

“Di zaman sekarang pemilihan kepala Desa kalau tidak pakai uang, maka kemungkinan menangnya tipis. dan kebiasaan ini sudah biasa dilakukan di Desa Gubugsari pada saat ada pemilihan. Disini disebutnya sebagai uang ganti kerja mereka karena tidak bekerja untuk mencoblos” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 23 Januari 2024).

“Pada saat itu saya kan netral ya mba, jadi saya dapet amplop dari bu azizah dan pak amri, jadi saya dapet dari dua-duanya. Meskipun saat saya mencoblos pilihnya satu calon, dilihat dari yang paling banyak jumlah uang yang calon berikan” (Wawancara Wira, masyarakat, 20 Januari 2024).

Begitupun juga yang dilakukan Nur Azizah, tentu saja Nur Azizah menggunakan strategi pembelian suara kepada masyarakat Desa Gubugsari. Karena setiap pemilihan Kepala Desa Gubugsari, jika calon ingin menang pasti harus memberikan politik uang atau bahasa halusya adalah uang ganti kerja kepada masyarakat jika ingin terpilih. Serangan fajar ini diberikan beberapa hari sebelum pemilihan. Akan tetapi yang berbeda dari Nur Azizah adalah, pemberian patronse diberikan oleh anggota keluarga Nur Azizah, bukan oleh tim suksesnya. Meskipun anggota keluarganya bukan masyarakat Desa Gubugsari. Karena yang dipercaya oleh Nur Azizah untuk memegang uang adalah anggota keluarganya. Karena di Desa Gubugsari ada 17 RT, maka Nur Azizah meminta 17 anggota keluarga Nur Azizah untuk memegang masing-masing satu RT. Dalam memberikan politik uang, Tim sukses tidak mendata secara rinci. Semua masyarakat Desa Gubugsari yang sudah memiliki hak pilih diberikan uang ganti kerja oleh Nur Azizah, yang tidak hanya masyarakat yang sudah terlihat memiliki kecenderungan untuk memilih lawan Nur Azizah. Seperti Keluarga, Sahabat, dan tetangga dekat lawan. Lawan politiknya, Muslikul Amri juga memebrikan serangan fajar kepada masyarakat desa gubugsari yaitu senilai Rp. 100.000,00. Karena kedua calon memberikan serangan fajar meskipun pilihan mereka masih abu-abu, sehingga yang abu-abu mendapat amplop dari kedua calon.

“Pada saat masa kampanye Bu Azizah ngasih uang ganti kerja ke warga sebanyak Rp. 150.000,00/ suara. Tetapi setelah itu Bu Azizah melakukan survei dan memperoleh hasil bahwa Bu Azizah kalah meskipun hanya selisih tipis. Kalau ingin menang Bu Azizah harus menambahkan uang ganti kerjanya sebanyak Rp. 100.000,00 kepada masyarakat. agar uang ganti kerja yang diberikan kepada masyarakat akan selisih jauh dengan yang lawannya berikan. Sehingga Nur Azizah harus memberikan uang ganti kerja sebanyak Rp. 250.000,00” (Wawancara Arya (bukan nama sebenarnya), tim sukses, 25 Januari 2024)

Pada awalnya Nur Azizah akan memberikan serangan fajar senilai Rp. 150.000,00 kepada setiap suara. Akan tetapi Nur Azizah melakukan survei pemenangan untuk mengetahui peluang Nur Azizah menang pada pemihan Kepala Desa Gubugsari. Survei dilakukan oleh LSM yang ada di Kabupaten kendal. Dari hasil servei kemungkinan yang keluar sebagai pemenang Pilkades Desa Gubugsari 2020 adalah petahan atau lawan Nur Azizah yaitu Muslikul Amri, tapi hanya selisih tipis.

Oleh karena itu untuk menyalip suara Muslikul Amri, Nur Azizah memiliki strategi untuk menambahkan uang ganti kerja menjadi Rp. 250.000,00/suara. Agar masyarakat tidak ragu memilih Nur Azizah, karena uang yang diberikan Nur Azizah jauh lebih banyak dibandingkan Muslikul Amri yang hanya memberikan Rp. 100.000,00.

“Saya tahu nominal uang ganti kerja yang akan diberikan Pak Amri kepada masyarakat dari tim sukses saya yang mendapatkan informasi dari kenalannya yang berada di tim sukses Pak Amri” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 23 Januari 2024).

Informasi dapur kandidat mudah sekali bocor kepada lawan, karena lingkup Desa yang kecil sehingga masyarakat satu sama lain saling mengenal. Masyarakat Desa Gubugsari masih tinggi sekali budaya bersosialisasinya, sehingga informasi apapun sangat mudah tersebar di masyarakat. Seharusnya informasi dapur calon dan tim suksesnya adalah informasi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat lain, terutama lawan politiknya. Tapi, berkat kebocoran informasi tim sukses Muslikul Amri yang memudahkan Nur Azizah untuk mengganti strategi dalam pemberian uang ganti kerja kepada masyarakat. sehingga menjadi lebih efektif untuk mengambil suara masyarakat.

Adapun juga mikro partikularisme berupa pemberian-pemberian pribadi. Untuk mendukung suara mereka di masyarakat, pemberian uang saja tidak cukup. Kandidat biasanya menyenangkan masyarakatnya dengan memberikan hadiah-hadiah kecil saat bertemu mereka di jalan atau jika sedang melakukan kunjungan di rumah warga. Dengan harapan agar masyarakat bisa terkesan dengan pemberian-pemberian tersebut. Pemberian ini bisa diberikan langsung oleh kandidat atau bisa juga melalui tim suksesnya. Biasanya pemberiannya berupa benda-benda kecil, sembako, hingga pemberian yang berbau agama. Tidak lupa juga kandidat menyiapkan untuk pemberian perintilan-perintilan kebutuhan seperti makanan, rokok, minuman, dan cemilan-cemilan yang disuguhkan pada saat melakukan pertemuan (Aspinall & Sukmajati, 2015, p. 25).

“Biasanya Bu Azizah kalau ketemu anak kecil di jalan atau di sebuah acara, suka ngasih uang ke anak-anak buat jajan. Kalau saat melakukan *door to door* saya hanya memberikan amplop saja sebagai hadiah dan syarat untuk meminta doa restu kepada setiap rumah di Desa Gubugsari” (Wawancara Meli (bukan nama sebenarnya), masyarakat, 11 Juni 2024)

Tentu saja Nur Azizah tidak melewatkan kesempatan untuk menarik perhatian masyarakat dengan memberikan pemberian-pemberian pribadi. terutama saat bertemu anak-anak di jalan biasanya Nur Azizah memberikan mereka uang atau disebut saweran. Meskipun anak-anak tidak memilih, tapi tujuannya adalah agar orang tua mereka ikut senang dengan apa yang didapatkan oleh anaknya. Meskipun hanya uang untuk jajan saja, akan tetapi Nur Azizah mendapatkan citra yang baik di masyarakat. Akan tetapi Azizah dalam memberikan hadiah-hadiah kecil ini biasanya Nur Azizah memberikannya secara langsung tanpa melalui tim suksesnya. Agar masyarakat melihat keseriusan Nur Azizah dan benar-benar diannya sendiri yang turun ke lapangan. Sedangkan untuk rumah-rumah yang didatangi Nur Azizah dalam melakukan *door to door* Nur Azizah memberikan hadiah berupa amplop yang berisi uang kisaran Rp. 200.000,00 untuk keluarga tersebut. Karena Nur Azizah tidak mungkin mendatangi rumah warga untuk meminta doa restu tanpa membawa sesuatu untuk diberikan kepada tuan rumah.

Yang kedua yaitu meso partikularisme yang melibatkan kolektivitas yang lebih besar baik secara geografis (misalnya desa, rw, rt), asosiasi (misalnya kelompok agama lokal), atau sektoral (misalnya serikat pekerja atau organisasi pekerjaan). Contoh manfaat materi mencakup segala hal mulai dari proyek infrastruktur skala kecil hingga menengah hingga peralatan untuk klub atau asosiasi. Meso-partikularisme tidak selalu melibatkan ikatan personalistik antara donor dan penerima. Kategori ini secara luas berhubungan dengan barang club atau barang publik lokal yang bisa digunakan oleh banyak orang, bukan sebagai barang individu tapi kolektif. Barang-barang club dapat dikecualikan bagi mereka yang berada diluar batas-batas grup tetapi tidak bagi mereka yang berada dalam batas-batas tersebut. Contohnya mencakup jalan lokal, perbaikan sekolah, dan infrastruktur lokal lainnya yang menyasar kelompok atau komunitas lainnya (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 7).

“Bu Azizah pada saat mencalonkan biasanya rajin memberikan infak-infak kepada masjid, dan memberikan barang-barang yang dibutuhkan masjid. Seperti Mukena, sajadah, sarung, Al-Qur’an, peralatan kebersihan, dan lain-lain yang memang dibutuhkan oleh masjid” (Wawancara Wirawan (bukan nama sebenarnya), tokoh agama, 15 Februari 2024)

“Di club TSC Bu Azizah memberikan baju bola untuk para pemain sebanyak 25 kaos” (Wawancara Bagas (bukan nama sebenarnya), anggota club TSC, 10 Februari 2024)

Dalam kampanyenya Nur Azizah tidak terlalu bermain dalam ranah meso partikularisme. Hanya kepada 2 kelompok di Desa saja Nur Azizah memberikan meso partikularisme. Karena dorongan dari tim sukses, agar Nur Azizah menarik simpati masyarakat dari hal-hal yang berbau keagamaan dan kepemudaan. Dalam hal keagamaan karena Desa Gubugsari masih yang melihat dari pandangan agama, sehingga akan memilih calon yang lebih mendukung kepada keperluan-keperluan keagamaan. Sedangkan dari kepemudaan yaitu club bola, Nur Azizah harus mengambil simpati pemuda-pemuda dalam club bola tersebut, karena itu adalah kantong suara yang lumayan bagi lawan politiknya. Nur Azizah ingin agar mereka membelok untuk memilih Nur Azizah dibanding Muslikul amri. Ini adalah upaya untuk melakukan sabotase terhadap kantong-kantong suara lawan.

Patronase jenis ini meso partikularisme biasanya bisa berupa pemberian barang atau pelayanan dan aktifitas yang bisa dilakukan oleh calon dalam sebuah kelompok atau organisasi. Barang barang kelompok yang diberikan kepada pemilih untuk kepentingan bersama atau kelompok bukan kepentingan pribadi (Aspinall & Sukmajati, 2015, pp. 26-27). Banyaknya institusi formal dan informal yang ada di Desa Gubugsari seperti kelompok keagamaan, olahraga, pemuda, wanita, koperasi, dan petani. Biasanya pemberian kandidat bisa berupa perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, alat musik, peralatan pertanian, *sound system*, dan lain-lain. Akan tetapi Nur Azizah tidak fokus kepada meso partikularime kelompok-kelompok tersebut, hanya dua saja yang Nur Azizah fokuskan. Kepada yang lainnya Nur Azizah hanya menjanjikan perbaikan dan pengelolaan manajemen yang lebih baik dan akan mendukung secara materi dan moril kegiatan-kegiatan mereka. Akan tetapi hal tersebut akan terjadi setelah Nur Azizah terpilih menjadi Kepala Desa Gubugsari, sehingga pada saat kampanye hanya sebuah janji saja.

“Akan tetapi Bu Azizah memberikan dana atau konsumsi kepada kelompok atau komunitas tersebut yang sedang membuat acara, dengan syarat Bu Azizah boleh kampanye didalamnya. Dan kadang Bu Azizah juga sambil memberikan amplop kepada masing-masing yang hadir disana” (Wawancara Bayu (bukan nama sebenarnya), tim sukses, 5 februari 2024)

Sedangkan dari segi pelayanan dan aktifitas, biasanya dengan memberikan bantuan dana dan tenaga kepada kelompok atau organisasi yang ada di wilayah pemilihan tersebut saat sedang membuat sebuah acara atau perkumpulan. Dengan balasan Nur Azizah diizinkan masuk di tengah-tengah acara forum atau organisasi untuk mempromosikan dirinya. Banyaknya perkumpulan yang bisa dimasuki Nur Azizah sebagai seorang perempuan di Desa Gubugsari, seperti acara pengajian rutin ibu-ibu, pengajian dan kumpul ibu-ibu organisasi Fatayat NU se-Desa Gubugsari yang tentu saja sangat menguntungkan Nur Azizah. Biasanya Nur Azizah membantu dari segi konsumsi untuk perkumpulan tersebut atau juga dengan memberikan sumbangan kepada kas mereka. Setelah itu Nur Azizah memberikan amplop kepada peserta yang hadir pada acara tersebut. Dirumahnya pun pada saat masa kampanye diadakan sebuah pengajian, selain untuk mendoakan juga sebagai ajang untung bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Gubugsari. Acara pengajian besarnya diadakan selama 11 hari berturut-turut, mulai dari H-11 pemilihan hingga H-1.

“Saat organisasi Fatayat NU sedang mengadakan sebuah acara atau rutin organisasi Bu Azizah meminta izin masuk kedalam perkumpulan dengan tujuan untuk melakukan kampanye. Bu Azizah biasanya memberikan uang kepada kas organisasi, dan ibu-ibu yang hadir diberikan amplop oleh Bu Azizah. Amplop yang diberikan berisi uang dengan nominal Rp. 50.000,00 untuk masing-masing orang yang hadir, jika tidak hadir maka tidak mendapatkan amplop tersebut” (Wawancara Ratna (bukan nama yang sebenarnya), masyarakat dan ketua organisasi Fatayat, 20 Januari 2024).

Salah satu strategi kampanye politik Nur Azizah untuk memobilisasi pemilih Desa Gubugsari yaitu dengan menyusup kedalam organisasi atau perkumpulan yang ada di Desa, terutama organisasi atau perkumpulan perempuan yang lebih mudah dimasuki oleh Nur Azizah. Cara tersebut lumayan efektif, lantaran Nur Azizah tidak perlu membuat sebuah agenda acara lagi, tapi tinggal masuk kedalam agenda yang sudah ada secara rutin dan terorganisir. Ada beberapa organisasi perempuan yang ada di Desa Gubugsari, seperti Fatayat NU, Muslimat, dan ibu-ibu PKK. Modal yang dibutuhkan Nur Azizah untuk menghadapi ibu-ibu tersebut adalah uang. Saat ada perkumpulan tersebut Nur Azizah memberikan amplop kepada masyarakat yang hadir, dan juga menyumbang dana untuk dimasukkan kedalam kas organisasi. Dengan memberikan hadiah tersebut Nur Azizah secara tidak langsung meminta orang-orang yang ada di organisasi tersebut untuk memilihnya.

“Biasanya juga Bu Azizah bikin acara-acara pengajian di rumahnya yang mengundang warga sekitar. Orangnyanya juga royal ke warga, gak itungan. Dan keliatannya memang orang berada. Waktu itu sebelum pemilihan ada pengajian selama sebelas hari berturut-turut di rumah beliau” (Wawancara Yoga (bukan nama sebenarnya), masyarakat sekaligus ketua IPNU, 11 Februari 2024)

Nur Azizah pun membuka pintu rumahnya selebar lebarnya jika ada yang ingin bertamu atau mengadakan acara dirumahnya. Dan tentu saja Nur Azizah akan menyediakan minuman dan camilan-camilan secara gratis. Stigma yang ada di masyarakat bahwasannya Nur Azizah sebagai orang berada, mendukung hal tersebut. Cara ini dinilai efektif lantaran selain berupa materi, masyarakat juga ingin mengenal kandidat melalui pelayanan dan aktifitas-aktifitas yang dibuat oleh kandidat. Sehingga masyarakat merasa dekat dengan calon pemimpinnya. Materi yang diberikan dinilai warga sebagai sedekah dan modal jika ingin menjadi seorang pemimpin, terutama pemimpin Desa.

Dan yang ketiga yaitu makro partikularisme yang melibatkan program tingkat nasional atau regional yang “dibajak” oleh partai atau politisi. Dalam kasus-kasus ini, penargetan penerima manfaat seolah-olah mengikuti kriteria programatik dan universal – tunjangan tunai untuk keluarga miskin, pensiun untuk orang-orang di atas usia tertentu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi dalam ujian masuk universitas, dan seterusnya – namun tampaknya politisi atau kenyataan, melakukan intervensi untuk memberikan manfaat kepada pendukung politik (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 8)

Pembajakan program ini paling mudah dilakukan oleh petahana, karena mereka memiliki akses untuk membajak program tersebut. Pembajakan tersebut dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilihan. Enaknya menjadi petahan adalah karena bisa melakukan kampanye terselubung jauh-jauh pada saat masih menjabat. Sehingga sudah mengumpulkan masa melalui masyarakat yang sudah merasa terbantu dengan pembajakan program ini. Dalam lingkup Desa pun pembajakan program ini bisa terjadi, apalagi saat ini maraknya musim bantuan pemerintah. Sedangkan bagi Nur Azizah sendiri sebagai calon baru pemilihan kepala Desa Gubugsari sangat sulit untuk melakukan pembajakan sebuah program. Nur Azizah hanya menjanjikan bagi pendukungnya jika mereka memilih Nur Azizah akan dibantu untuk masuk kaedalam program Desa yang akan dibuat, akan tetapi sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.

Adapun juga yang disebut sebagai proyek-proyek gentong babi yang diartikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditunjukkan untuk wilayah geografis tertentu. Sebenarnya proyek-proyek gentong babi ini ditunjukkan kepada publik dengan menggunakan dana publik. Dengan harapan publik dapat memberikan hak suaranya kepada kandidat tersebut. Banyak kandidat menjanjikan sebuah program-program dan proyek yang didanai oleh dana publik untuk pemilih mereka yang biasanya berupa proyek-proyek kecil atau keuntungan untuk komunitas tertentu, terutama aktifitas yang bisa menghasilkan penghasilan (Aspinall & Sukmajati, 2015, p. 28).

Cara ini biasanya mudah digunakan oleh para petahana yang menunjukkan rekam jejak mereka yang telah berhasil dalam sebuah program untuk meyakinkan pemilih dengan kapasitas yang dia punya. Akan tetapi sulit bagi Nur Azizah karena bukan sebagai Petahan sehingga masyarakat belum mengetahui bagaimana rekam jejaknya dalam menjalankan sebuah program. Oleh karena itu Nur Azizah hanya menjanjikan untuk program kedepannya. Seperti akan membangun taman bermain anak di Desa Gubugsari, sehingga dari pekerjaanya bisa berasal dari pendukungnya. Ataupun dari program irigasi sawah yang lebih terorganisir akan dibangun Nur Azizah. tentu saja Nur Azizah menjanjikan jika mereka mendukungnya, sawah milik mereka akan aman dan terairi dengan baik.

Karena sebelumnya dalam hal perairan sawah ini kepala Desa cenderung tidak adil dan hanya mementingkan sawah miliknya dan keluarganya saja.

“Bu Azizah adalah orang yang dermawan dimata kami sebagai masyarakat. karena beliau tidak pelit dengan apa yang dia punya. Masyarakat pun merasakan kedermawanan beliau. Bagus untuk mempunyai pemimpin yang dermawan, agar nanti kedepannya tidak pelit terhadap uang rakyat. Dan karena Bu Azizah sebagai orang berada kemungkinan kecil untuk beliau melakukan korupsi” (Wawancara Hana (bukan nama sebenarnya), masyarakat, 13 Februari 2024).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya Nur Azizah menggunakan strategi patronase dalam memenangkan pemilihan kepala Desa Gubugsari 2020. Hal tersebut dilakukan Nur Azizah untuk membangun citra dermawan di Desa Gubugsari. Citra dermawan ini berguna untuk mempertahankan dan menjaga suara Nur Azizah, dan diperoleh dari aksi-aksi derwan yang ditunjukkan oleh calon. Nur Azizah sebagai calon yang belum pernah mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Gubugsari harus memiliki citra yang baik di masyarakat, untuk memikat hati mereka. Sebagai orang yang berpendidikan dan sebelumnya juga mempunyai jabatan kerja yang tidak bisa diremehkan. Nur Azizah diapandang oleh masyarakat mampu untuk membangun sebuah perubahan bagi Desa Gubugsari, dan hal ini yang dimanfaatkan oleh Nur Azizah untuk menarik simpati masyarakat. jabatan Nur Azizah seblumnya yaitu Kepala Cabang BRI Kabupaten Kendal seharusnya paham dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi memimpin sebuah Desa dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan ditempat kerja sebelumnya. Meskipun tentu saja menjadi pemimpin sebuah peusahaan berbeda dengan memimpin banyak manusia atau sebagai pelayan masyarakat. akan tetapi setidaknya dalam hal manajemen orang dan anggaran Nur Azizah sudah dianggap mampu dalam bidang itu. Sehingga masyarakat memberikan kepercayaan itu kepada Nur Azizah dengan terpilihnya Nur Azizah sebagai kepala Desa Gubugsari periode 2020-2026.

## **2. Door to Door**

Dalam melakukan kampanyenya Nur Azizah mengusung sistem *door to door* dengan meminta doa restu kepada masyarakat Desa Gubugsari untuk menjadi kepala Desa Gubugsari. Sistem ini dipakai karena Nur Azizah ingin dekat dengan masyarakat secara langsung dengan menemui mereka dari satu pintu ke pintu lainnya. Cara ini dilakukan juga untuk mengetahui bagaimana kondisi secara langsung warganya jika dia terpilih menjadi pemimpin mereka. Sehingga nantinya program apa yang tepat untuk diterapkan di Desa Gubugsari. Selain itu cara ini juga efektif untuk dikenal di masyarakat dan membangun kedekatan dengan mereka.

“Karena Nur Azizah bukan sebagai putera daerah Desa Gubugsari, maka tim sukses dan Bu Azizah sepakat untuk mendatangi seluruh rumah warga satu persatu untuk mengenalkan sosok Nur Azizah Di masyarakat” (Wawancara Arya (bukan nama sebenarnya), tim sukses, 25 Agustus 2024)

Kampanye *door to door* di Desa Gubugsari dinilai efektif untuk mengenalkan Nur Azizah kepada masyarakat, karena Nur Azizah menumui dan bertatap muka langsung dengan masyarakat.

Apalagi lingkup desa bisa terbilang kecil jika dibandingkan dengan lingkup negara atau daerah. Sehingga masih bisa dijangkau oleh Nur Azizah, untuk mendatangi semua rumah yang ada di Desa Gubugsari. Dalam melakukan *door to door* Nur Azizah ditemani oleh tim sukses yang ada di setiap daerah tersebut. Untuk membantu Nur Azizah juga dalam memberikan informasi dan sebagai penghubung ke masyarakat.

“Saya melakukan *door to door* selama kurang lebih satu setengah bulan, setelah pendaftaran calon Kepala Desa secara resmi. Dilakukan setiap hari kecuali hari sabtu minggu, dan waktunya pada malam hari setelah saya pulang kerja yaitu dari setengah delapan sampai jam sepuluh malam. Kurang lebih saya mendatangi rumah warga selama satu minggu itu kira-kira satu dusun. Disusuri rumah warga satu persatu” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 11 Juni 2024).

Dalam waktu satu bulan setengah Nur Azizah habiskan untuk mendatangi rumah warga satu persatu, dilakukan setelah Nur Azizah mendaftar secara resmi menjadi calon Kepala Desa Gubugsari. Dengan mendatangi seluruh rumah warga yang ada di Desa Gubugsari tanpa terkecuali. Padahal ada banyak sekali jumlah seluruh rumah warga di Desa Gubugsari. Bahkan hingga saat ini Nur Azizah hafal siapa saja warganya, dimana rumahnya, dan berapa jumlah anggota keluarganya. Dalam melakukan kampanye *door to door* ini, Nur Azizah melakukan setiap hari kecuali hari sabtu dan minggu karena itu adalah waktu untuk keluarga. Nur Azizah yang pada saat itu masih bekerja sebagai Kepala Cabang BRI Kabupaten Kendal, sehingga Nur Azizah sowan ke rumah warga pada saat pulang kerja di malam hari yaitu dari jam setengah delapan hingga jam sepuluh malam. Rumah yang bisa Nur Azizah datangi selama satu minggu yaitu kurang lebih satu dusun.

“Saya melakukan *door to door* dengan menyusuri saja rumah warga satu persatu, tanpa membedakan. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk sowan satu rumah yaitu 5 menit untuk meminta doa restu dari masyarakat. tidak lupa saya memberikan sedikit hadiah kepada mereka” (Wawancara Nur Azizah, Kepala Desa, 11 Juni 2024)

Dalam kunjungannya Nur Azizah tidak membedakan rumah mana yang lebih dahulu di datangi, tapi semuanya sama rata. Baik itu rumah tokoh masyarakat maupun rakyat biasa. Kurang lebih satu rumah menghabiskan waktu 5 menit untuk meminta doa restu secara singkat kepada setiap rumah. Tidak lupa dalam kunjungannya Nur Azizah tidak mungkin datang dengan tangan kosong. Nur Azizah datang dengan membawa sebuah hadiah kepada tuan rumah yaitu amplop berisi uang, kurang lebih satu rumah Rp. 100.000,00. Apalagi Nur Azizah datang untuk bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan kepada masyarakat. Hadiah tersebut berbeda dengan serangan fajar yang nantinya akan diberikan Nur Azizah. karena saat melakukan *door to door* masih dilakukan di awal-awal, dan Nur Azizah masih mengamati masyarakat yang ada di Desa Gubugsari. Pada saat itu yang penting figur Nur Azizah dikenal oleh masyarakat Desa.

“Waktu Bu Azizah datang ke rumah sih sowan gitu, minta doa restu untuk mau pilih beliau di pilkades gitu. nah setelah itu adalah beliau ngasih uang buat jajan, yang ternyata uang tersebut bukan termasuk serangan fajar, jadi itu beda lagi” (Wawancara Meli (bukan nama sebenarnya), masyarakat sekaligus pemerintah Desa, 25 Januari 2024)

Masyarakat Desa Gubugsari termasuk masyarakat yang belum terlalu kekotaan, sehingga masih memandang pentingnya etika sopan santun bermasyarakat. Tentu saja dengan datangnya Nur Azizah ke kediaman mereka menciptakan suasana ramah tamah antar tetangga satu kampung, dan terjalinnya silaturahmi dan kedekatan yang masih dijunjung tinggi di masyarakat. Saat ada calon kepala desa di Desa Gubugsari yang dilihat pertama kali oleh masyarakat adalah sifatnya pada saat bersosialisasi, bagaimana etika dan sopan santunnya. Jika kedekatan tersebut sudah terjalin maka, kemungkinan besar masyarakat akan memilih karena sosok figurinya yang dekat dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membeda bedakan.

“Penting sekali sikap sopan santun yang harus dimiliki calon, karena kita sebagai masyarakat yang pertama kali dilihat adalah bagaimana figur dari sosok calon kepala desa yang akan memimpin mereka” (Wawancara Yoga (bukan nama sebenarnya), masyarakat sekaligus ketua IPNU, 11 Februari 2024).

Dengan Nur Azizah mengunjungi atau sowan ke setiap rumah di Desa Gubugsari, orang yang dikunjungi pun merasa memiliki rasa terhormat karena merasa dianggap keberadaannya dimasyarakat. Meskipun ada orang yang tidak terlalu bersosialisasi di masyarakat, akan tetapi mereka juga bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat menjadi memiliki ikatan emosional yang kuat, dan Nur Azizah sendiri juga mendapatkan citra sebagai sosok yang baik di masyarakat Desa Gubugsari.

## BAB VI

### PENUTUP

Bab ini berisi terkait kesimpulan dari penelitian yang sudah dibahas sebelumnya. Nur Azizah dalam mengikuti Pilkades membuat tim sukses sebagai penghubung dirinya dengan masyarakat. Selain itu Nur Azizah menggunakan strategi politik uang untuk memobilisasi pemilih.

#### A. Kesimpulan

Dalam upaya untuk memenangkan Pemilihan Kepala Desa ada beberapa strategi yang harus dilakukan, mulai dari strategi membangun tim sukses hingga strategi dalam memobilisasi pemilih. Yang pertama yaitu dalam strategi membangun tim sukses yang dilakukan Nur Azizah dilihat dari proses membangun tim sukses, alur kerja tim sukses, hingga relasi tim sukses dengan calon. Dari proses membangun tim sukses Nur Azizah tidak menggunakan sistem perekrutan umum melainkan menggunakan sistem penunjukan. Ada tiga cara yang dilakukan Nur Azizah dalam proses membangun tim suksesnya yaitu pengajuan tim inti dari tokoh masyarakat dan pemuka agama, memaksimalkan fungsi keluarga, dan pembentukan partisipan oleh tim inti. Pentingnya membangun sebuah tim sukses yang kokoh agar mempermudah membantu Nur Azizah dalam memobilisasi pemilih. Alur kerja tim sukses berfungsi untuk mengetahui apa saja tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam tim sukses tersebut. Dilihat dari piramida brokernya, tim sukses Nur Azizah terbagi menjadi tim inti, koordinator masing-masing RT, dan tim sukses partisipan. Sedangkan relasi tim sukses dan calon penting untuk menciptakan suasana kampanye yang harmonis di dalam tim tersebut. Tim sukses berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan antara Nur Azizah dengan masyarakat Desa Gubugsari. Agar Nur Azizah memiliki kesan yang positif di masyarakat sehingga mau untuk memilih Nur Azizah pada Pilkades Desa Gubugsari Tahun 2020.

Kedua yaitu strategi memobilisasi pemilih, Nur Azizah menggunakan dua cara yaitu menggunakan isu-isu kampanye dan politik uang dengan skema patronase *door to door* yang disertai dengan politik uang. Isu-isu kampanye yang dihadirkan Nur Azizah adalah isu terkait perempuan, kepemudaan, dan pembangunan di Desa Gubugsari. Sedangkan dari segi politik uang yaitu menggunakan sistem patronase yang ditonjolkan adalah mikro partikularisme yaitu berupa pemberian serangan fajar dan meso partikularisme berupa pemberian barang dan materi kepada kelompok masyarakat di Desa Gubugsari. Sedangkan dari segi makro partikularisme tidak digunakan oleh Nur Azizah karena kesulitan sumber daya Nur Azizah yang bukan sebagai petahana, hanya sebagai aktor baru dalam politik Desa Gubugsari. Selain itu juga ada *door to door* langsung menemui masyarakat, untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat. Yang paling menonjol dari strategi Nur Azizah adalah dengan politik uang yang diberikan kepada masyarakat. Karena masyarakat di Desa Gubugsari masih memilih berdasarkan siapa yang memberikan politik uang paling besar dan menguntungkan mereka. Sehingga strategi politik uang ini yang paling diandalkan oleh Nur Azizah untuk memobilisasi pemilih di Desa Gubugsari pada Pilkades 2020. Jumlah uang ganti kerja yang diberikan Nur Azizah berbeda jauh dengan jumlah uang ganti kerja yang diberikan oleh lawan politik Nur Azizah kepada masyarakat.

Pendistribusian patronase yang tepat sasaran juga menjadi faktor kemenangan Nur Azizah dalam pemilihan Kepala Desa Gubugsari Tahun 2020.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan memberikan beberapa saran:

1. Kepada orang-orang yang menjadi tim sukses untuk lebih kreatif lagi dalam memasarkan calonnya, jangan hanya mengandalkan politik uang saja untuk menarik simpati masyarakat dalam memilih calon.
2. Kepada pemerintah untuk lebih memeberikan pendidikan politik yang sungguh-sungguh dan tepat sasaran, agar politik uang ini tidak menjadi sebuah budaya di Indonesia.
3. Kepada masyarakat untuk mulai membangun kesadaran untuk tidak menerima politik uang yang nantinya merugikan masyarakat itu sendiri. Tetap menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat dan adil di masyarakat, dengan memilih kandidat berdasarkan visi misi dan rekam jejaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adella, P., Murtasidin, B., & Ranto. (2023). Perempuan dalam Politik: Modalitas Kemenangan Pada Pemilihan Kepala Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(2), 145-161.
- Amal, I. (2022). Fenomena dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang pada Pemilu di Provinsi Banten. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(3), 61.
- Aspinall, A., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale (Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia)*. Jakarta: KITLV-Leiden.
- Aspinall, A., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang Di Indonesia (Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014)*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Aspinall, A., Weiss, M. L., Hicken, A., & Hutchcroft, P. D. (2022). *Mobilizing for Elections (Patronage and Political Machines in Southeast Asia)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bintari, A. (2020). Perempuan dan Pilkada: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, 53-61.
- BPS. (2024, Juni 4). *Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2019-2021*. Retrieved Desember 18, 2023, from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html>
- BPS. (2024, Juni 4). *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2019-2021*. Retrieved Desember 18, 2023, from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>
- BPS. (2024, Juni 4). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2019-2021*. Retrieved Desember 18, 2023, from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks California: Sage Publications.
- Dewi, N. R., Mufarikhin, & Rohmaniah, D. A. (2019). Strategi Mobilisasi Politik dalam Pemilu 2019 di Indonesia. *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(1), 35-36.
- Dokar. (2024, Juni 4). *Dashboard Dokar*. Retrieved Desember 18, 2023, from dokar.kendalkab.go.id: [https://dokar.kendalkab.go.id/dashbord/public\\_dashbord/D](https://dokar.kendalkab.go.id/dashbord/public_dashbord/D)
- Edrial, Nurhidayati, S., & Syatri, F. A. (2019). Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (Studi Kasus Partisipasi Pemilih Perempuan di Kecamatan Sumbawa). *JRKTL: Jurnal Riset Kajian Teknologi & Lingkungan*, 2(1), 64-70.
- Fadli, Y. (2017). Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 44-46.

- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Resolusi*, 1(1), 7-9.
- Fauzan, I. (2017). Politik dan Perempuan di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(1), 23-37.
- Fauziah, D. (2017). Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. *Jom FISIP*, 4(1), 6.
- Fitriyah. (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati). *Politika*, 6(2), 106-107.
- Haboddin, M. (2023). Perempuan dalam kekuasaan di Tingkat Lokal. *Jurnal Kyberman*, 14(1), 1-9.
- Haboddin, M., & Damayanti, R. (2021). Partisipasi Kontestan dalam Pilkada Kabupaten Malang. *Jurnal Kyberman*, 12(2), 61-69.
- Hartono, R. (2021). Kepemimpinan Perempuan Di Era Globalisasi. *JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 1(1), 89.
- Keputusan Bupati Kendal. (2019). Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kendal Tahun 2020.
- Khalik, N. P., Rembang, M., & Tulung, L. (n.d.). Pengaruh Komunikasi Tim Sukses Partai Politik terhadap Hasil Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Tim Sukses DPAC PDI-P Kecamatan Tombolu Kabupaten Minahasa). 2-4.
- Marzoeki, C. (2022). Sekedar Melengkapi atau Memenuhi Syarat Demokrasi? Membaca Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2019 Di Kota Bekasi. *JAKP: Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 76-94.
- Nasution, L. (2019). Potret Perempuan dalam Bingkai Ketatanegaraan. *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan*, 3(3), 135.
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan budaya. *Karsa*, 23(1), 4.
- Perludem. (2018, Agustus 1). *Potret Perempuan Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2018*. Retrieved Desember 18, 2023, from perludem: <https://perludem.org/2018/08/01/potret-perempuan-kepala-daerah-terpilih-di-pilkada-2018/>
- Saputra, H. A., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018 - 2019. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 12(1), 89-107.
- Sugiyono, p. D. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tokan, F. B., Gai, A., & Negong, Y. (2020). Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Cakra Prabhu*, 4(2), 206-223.

- Tutur, M. (2022). Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif Di Indonesia Perspektif M Quraish Shihab. *Anzima: Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam*, 1(1), 1-16.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6(1), 4-14.
- Wawan, & Rosyid, M. I. (2023). Kepala Desa Perempuan dan Local Strongman: Membunuh Atau Menyuburkan Patriarki di Desa Cijaku Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak. *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3(1), 30-43.

## LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Diikuti oleh berapa calon, dan bagaimana latar belakang masing-masing calon?
2. Bagaimana rangkaian kegiatan pilkades?
3. Bagaimana kampanye yang dilakukan Nur Azizah?
4. Bagaimana suasana pilkades kemarin?
5. Apa terjadi konflik antar paslon atau pendukungnya?
6. Bagaimana respon masyarakat dengan hadirnya calon kepala desa perempuan?
7. Bagaimana pandangan anda terkait kekuasaan kepala desa sebelumnya hanya berputar pada satu keluarga saja?
8. Bagaimana sosok pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat?
9. Bagaimana Nur Azizah membangun tim suksesnya?
10. Strategi apa yang digunakan oleh Nur Azizah untuk mendapatkan suara?
11. Apakah ada uang ganti kerja yang diberikan?
12. Seberapa penting membentuk tim sukses untuk memenangkan pilkades?
13. Berapa jumlah orang dalam tim sukses Nur Azizah?
14. Terbagi menjadi apa jadi tim sukses ini?
15. Apa ada strukturnya seperti ketua, sekretaris, bendahara, penasehat tim, dan pengolah data?
16. Siapa ketua dalam tim sukses nur azizah?
17. Siapa saja yang tergabung menjadi tim sukses?
18. Memilih orang dalam tim sukses berdasarkan apa?
19. Bagaimana pemilihan tim sukses untuk bagian koordinator rw dan rt?
20. Apakah tim sukses terbagi berdasarkan ring 1,2 dan 3?
21. Strategi apa saja yang diusulkan dan dijalan oleh tim sukses untuk kemenangan?
22. Apakah tim sukses membuat target suara untuk kemenangan?
23. Apakah ada pendataan bagi masyarakat yang mendukung bu azizah oleh tim sukses?
24. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membentuk tim sukses?
25. Berapa lama atau dimulai dari kapan persiapan bu azizah untuk menjadi kepala desa?
26. Siapa yang bertugas memberikan uang ganti kerja kepada masyarakat secara langsung? Bu azizah sendiri atau diwakili oleh tim suksesnya?
27. Kapan pemberian uang ganti kerja?
28. Kepada siapa saja pemberian uang ganti kerja itu? Apakah kepada seluruh masyarakat atau berdasarkan data yang sudah diberikan oleh tim sukses saja?
29. Apakah ada survei yang dilakukan Nur azizah? bagaimana hasilnya? Berapa uang yang dikeluarkan untuk biaya survei?
30. Berapa kali Nur Azizah melakukan pertemuan dengan tim sukses?
31. Dan bagaimana kondisinya jika sedang kumpul dengan tim sukses?
32. Dari mulai kapan bu azizah melakukan door to door kepada masyarakat?
33. Berapa lama Bu azizah melakukan door to door?
34. Apa tujuan melakukan door to door?
35. Apa saja isu-isu yang dibawa oleh Nur Azizah saat kampanye?

36. Bagaimana Nur Azizah masuk ke organisasi-organisasi untuk melakukan kampanye?
37. Bagaimana pandangan terkait perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin Desa?
38. Bagaimana Nur Azizah masuk dalam rutinan ibu-ibu?
39. Janji-janji apa yang diberikan oleh Nur Azizah saat kampanye?
40. Pembangunan Desa seperti apa yang direncanakan Nur Azizah?
41. Bagaimana Citra Nur Azizah di masyarakat?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Gambar 4. Pendaftaran Calon Kepala Desa Gubusari Masa Jabatan 2020-2026**



**Gambar 5. Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa Sekaligus Penetapan dan Pengambilan Nomor Urut Calon Kepala Desa**



**Gambar 6. Sertijab Kepala Desa Gubugari Masa Jabatan 2020-2026**



**Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Kepala Desa Terpilih**



**Gambar 9. Wawancara dengan Pemerintah Desa**



**Gambar 10. Wawancara dengan Tim Sukses**



**Gambar 11. Wawancara dengan Masyarakat**



**Gambar 12. Wawancara dengan Masyarakat sekaligus Ketua Fatayat NU**

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020**

KECAMATAN : PEGANDON  
TANGGAL : 30 Januari 2020

| NO | DESA      | TPS   | DPT DALAM HAL TIDAK TERJADI PERPANJANGAN<br>PENDAFTARAN |           |       | DPT DALAM HAL TERJADI PERPANJANGAN<br>PENDAFTARAN |           |       |
|----|-----------|-------|---|-----------|-------|---|-----------|-------|
|    |           |       | LAKI - LAKI   | PEREMPUAN | TOTAL | LAKI - LAKI                                       | PEREMPUAN | TOTAL |
| 1  | GUBUGSARI | TPS 1 | 287   | 291       | 578   | 287   | 291       | 578   |
|    |           | TPS 2 | 384   | 362       | 746   | 384   | 362       | 746   |
|    |           | TPS 3 | 301   | 312       | 613   | 302   | 312       | 614   |
|    |           | TPS 4 | 325   | 335       | 660   | 325   | 335       | 660   |
|    |           | TPS 5 | 377   | 394       | 771   | 378   | 395       | 773   |
|    |           |       | 1674  | 1694      | 3368  | 1676  | 1695      | 3371  |

KETUA P2KD DESA GUBUGSARI



**M SUJARWO**

**Gambar 13. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Gubugsari**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA GUBUGSARI KECAMATAN PEGANDON  
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020**

BERITA ACARA  
PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA GUBUGSARI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020

Nomor : 13/P2KD/III/2020  
Tanggal : 19 Maret 2020

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Gubugsari Panitia Pemilihan Kepala Desa Gubugsai Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2020, telah melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2020, dengan hasil sebagai berikut :

| No. | Nama Calon Kades | Perolehan Suara di TPS |     |     |     |     | TOTAL |
|-----|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
|     |                  | 1                      | 2   | 3   | 4   | 5   |       |
| 1.  | NUR AZIZAH       | 313                    | 404 | 338 | 376 | 423 | 1854  |
| 2.  | MUSLIKHUL AMRI   | 134                    | 199 | 164 | 158 | 224 | 879   |

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan guna seperlunya.

Gubugsari, 19 Maret 2020

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GUBUGSARI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN  
KENDAL

| No. | Nama            | Jabatan Dalam Panitia | Tandatangan |   |
|-----|-----------------|-----------------------|-------------|---|
| 1   | M.SUJARWO       | KETUA                 | 1           | 2 |
| 2   | ACHMAD ARIFIN   | SEKRETARIS            |             |   |
| 3   | RAHMATUL AMALIA | ANGGOTA               | 3           | 4 |
| 4   | JOKO NARIMO     | ANGGOTA               |             |   |
| 5   | IMAM MUHDI      | ANGGOTA               | 5           |   |
|     |                 |                       |             |   |

SAKSI DARI CALON KADES :

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1. | ..... | ..... |
| 2. | ..... | ..... |

**Gambar 14. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Gubugsari Tahun 2020**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nafisa Bintang Diya'ulhaq  
TTL : Bogor, 27 Agustus 2002  
Alamat : Kp. Muara RT 02/RW 01 Desa Muara Jaya Kecamatan Caringin  
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat  
NIM : 2006016091  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Agama : Islam  
Email : staqueen4@gmail.com  
No. Hp : 081292381916  
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 01 Pasir Muncang  
2. SMPN 1 Caringin  
3. SMAN 1 Caringin  
Riwayat Organisasi : 1. DEMA FISIP UIN Walisongo